Harian Umum

MEMIHAK KEBENARAN

SUARA PEMBARUAN

Senin, 7 September 2020

BERITA SATU MEDIA HOLDINGS



Berkas Perkara

Pekan ini Kejagung pastikan apakah berkas perkara Djoko Tjandra dari kepolisian, sudah lengkap (P21) atau belum.

Politik & Hukum > 4

Perkembangan Kasus Covid-19

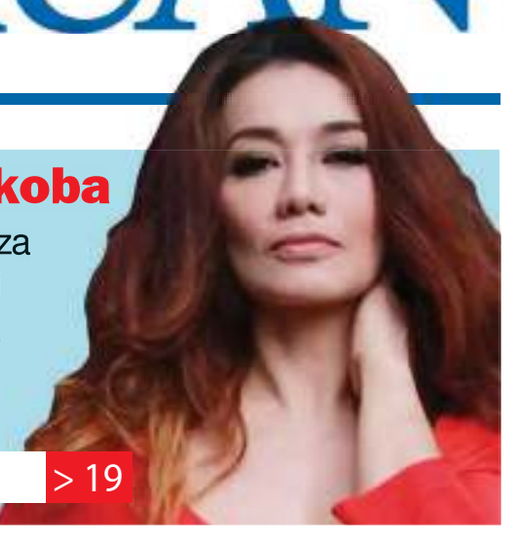
	Total	Sembuh	Kematian
Indonesia	194.109	138.575	8.025
Jakarta	46.691	34.738	1.289
Dunia	27.113.895	19.239.059	884.601

DATA WORLDOMETERS DAN COVID19.GO.ID SAMPAI MINGGU (6/9) PUKUL 20.00 WIB

Terjerat Narkoba

Penyanyi senior Reza Artamevia membeli Sabu-sabu seharga Rp 1,2 juta/paket.

Jakarta > 19



5 Juta Pendaftar Bantuan Usaha Mikro Bakal Dicoret

Pemerintah Antisipasi Salah Sasaran



FOTO: DOK HUMAS KEMKOP DAN UKM

Menkop dan UKM Teten Masduki menyerahkan secara simbolis bantuan produktif usaha mikro kepada pelaku usaha di Bali.

BANTUAN PRODUKTIF USAHA MIKRO (BPUM)

Bantuan berupa hibah modal kerja kepada pelaku usaha mikro yang belum mendapat pembiayaan perbankan.

Besaran Bantuan:
Rp 2,4 JUTA/ PENGUSAHA

Total Anggaran
Rp 28,8 TRILIUN

Target :
12 JUTA Pengusaha Mikro

Pendaftaran:
Sampai **MINGGU Ke-2 SEPTEMBER**

Jumlah Pendaftar:
20 JUTA Pengusaha Mikro
(sampai Minggu, 6 Sept 2020)

Penyaluran
17 AGUSTUS- 31 DESEMBER

SYARAT PENERIMA BPUM

- WNI, punya nomor induk kependudukan
- Punya **usaha mikro** dibuktikan dengan surat usulan dari pengusul
- Bukan pegawai negeri (ASN), anggota TNI/Polri, bukan pegawai BUMN/BUMD
- Sudah punya tabungan dengan nominal di bawah Rp 2 juta
- Belum pernah atau sedang menerima pinjaman dari perbankan

[JAKARTA] Sejak pendaftaran program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dibuka 17 Agustus hingga pekan pertama September 2020 sudah 20 juta pelaku usaha mendaftarkan diri. Padahal target program ini hanya 12 juta pelaku usaha. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengisyaratkan akan menambah kuota menjadi 15 juta penerima. Dengan demikian kemungkinan besar, akan ada sedikitnya 5 juta pendaftar yang dicoret.

Pendaftaran akan ditutup mingu kedua bulan ini. Untuk menentukan siapa yang berhak menerima serta tidak salah sasaran, pemerintah sudah mendesain tata cara pendaftaran dan persyaratan.

"Kita targetnya semua dana untuk itu cair pada minggu kedua September 2020, dan saat itu juga kita tutup pendaftaran," kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Rully Indrawan, kepada *SP*, Minggu (6/9).

Menurut Rully, sampai Minggu (6/9), sudah 20 juta pelaku usaha mikro mendaftar. Sebanyak 3 juta sudah divalidasi oleh Kemkop dan UKM bersama Kementerian Keuangan serta Otoritas Jasa Keuangan. "Sudah ada SK-nyam," kata Rully.

Ketiga lembaga tadi mendapatkan nama-nama pelaku usaha dari pengusul yakni dinas-dinas terkait dari kabupaten dan provinsi, perbankan yang tergabung dalam Himbara, BUMN-BUMN yang menyelenggarakan pembiayaan, koperasi serta kementerian terkait yang membina usaha mikro.

Menurut Rully, syarat-syarat untuk dapat menerima dana tersebut adalah warga negara Indonesia dengan memiliki nomor induk kependudukan, mempunyai usaha mikro dibuktikan dengan surat usulan dari pengusul, bukan pegawai negeri atau Aparatur Sipil Negara (ASN), bukan anggota TNI/Polri, dan bukan pegawai BUMN dan BUMD, serta sedang tidak menerima kredit modal kerja investasi dari perbankan.

Jumlah pendaftar membuktikan bahwa bantuan Rp 2,4 juta per pelaku usaha ini cukup menggiurkan dan bukan tidak mungkin memicu penyelewengan antara lain munculnya usaha mikro dadakan. Modus lain, mengusulkan orang yang dekat secara kekerabatan meski tidak memiliki usaha.

bersambung ke hal > 5

Memompa Optimisme Pelaku Usaha Mikro



DOK SETPRES

Joko Widodo

Bantuan untuk usaha mikro sudah dilakukan sejak Agustus lalu. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri yang memberikannya kepada para pelaku usaha kecil dan mikro, kebanyakan pedagang kecil atau kaki lima. Hal ini dilakukan bukan hanya di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, melainkan juga di Bogor, Yogyakarta, dan bahkan dalam kunjungannya ke Aceh.

Dalam setiap kesempatan itu, Presiden menyempatkan diri berdialog dengan para pelaku usaha mikro. Pada intinya Presiden memompa semangat pelaku usaha mikro untuk terus berjuang dan bertahan selama pandemi. Pemerintah yang menyokong dengan memberikan bantuan.

Selain menerangkan kondisi perekonomian terkini, Jokowi selalu memberikan pesan untuk terus bekerja lebih keras dalam menghadapi masa pandemi Covid-19 sehingga usaha mereka dapat bertahan hingga keadaan menjadi normal kembali.

Dalam cara penyerahan Bantuan Produktif di Istana Kepresidenan Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (28/8), Presiden berdialog dengan para pelaku usaha mikro dan kecil penerima banpres.

bersambung ke halaman > 5



RSD Wisma Atlet Siap Antisipasi Lonjakan Pasien Covid-19

RS Darurat Wisma Atlet Kemayoran

Dibangun
Maret 2016

Diresmikan
Desember 2017
untuk tempat tinggal atlet dan ofisial Asian Games 2018
Total kapasitas untuk menampung 24.000 orang

Biaya Pembangunan
Rp 3,4 Triliun
dengan 10 tower

Difungsikan sebagai RS Darurat Covid-19:
23 Maret 2020 untuk menampung **3.000 pasien (4 tower)**

Fasilitas Tiap Unit
Kamar dengan 2 bed, ruang tamu, kamar mandi dengan water heater, pendingin ruangan, dapur.

- **Tower 1**, untuk dokter dan tenaga medis (650 unit/1.750 orang)
- **Tower 3**, untuk posko Satgas Penanganan Covid-19 (650 unit/1.750 orang)
- **Tower 6**, ruang rawat inap pasien (650/1.750 orang)
- **Tower 7**, lantai 1 IGD, lantai 2 ICU, lantai 3 untuk ruang refreshing. Lantai 4-24 ruang rawat inap pasien (886 unit/2.458 pasien)

Mulai 8 September disiapkan Tower 4 & 5 untuk isolasi mandiri.



[JAKARTA] Meski Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, menambah dua menara untuk ruang isolasi pasien Covid-19, kapasitas seluruh rumah sakit rujukan di Jakarta tak mampu menampung pasien yang harus diisolasi.

Data per Minggu (6/9) menyebutkan bahwa angka kasus aktif di DKI Jakarta mencapai 10.664. Mereka ini adalah pasien dengan kondisi ringan, sedang, maupun berat. Sementara kapasitas *bed perawatan dan* isolasi di 67 RS rujukan Covid-19 di Jakarta sebanyak 4.456. Bila ditambah dengan dua menara RSD Wisma Atlet yang bisa menampung sampai maksimal 3.000 pasien maka masih ada kekurangan 3.000-an *bed* isolasi.

bersambung ke hal > 5



Pilkada Karawang, Demokrat Optimistis Cellica Terpilih Kembali

Yessy-Adly Fairuz Bisa Jadi Kuda Hitam

[JAKARTA] Partai Demokrat (PD) optimistis Bupati Karawang, Jawa Barat (Jabar), Cellica Nurrachadiana terpilih kembali periode kedua. Figur Cellica sangat dicintai masyarakat Karawang.

"Kami optimistis Cellica terpilih lagi. Mohon doa dan restu seluruh masyarakat Karawang," kata Wakil Ketua Umum PD Vera Febyanthy kepada *SP,* Sabtu (5/9).

Vera menuturkan, banyak keberhasilan yang telah dilakukan Cellica. Berbagai program di bidang kesehatan, ekonomi kerakyatan, industri, pertanian, dan lainnya, menurut Vera, tentu perlu dilanjutkan sekaligus ditingkatkan.

Vera menambahkan, pengalaman Cellica tak perlu diragukan. "Cellica pernah menjadi anggota DPRD Jabar, terus wakil bupati Karawang, plt bupati hingga menjadi bupati. Kalau boleh dibilang, pengalamannya luar biasa. Cellica juga sangat dekat dengan rakyat," kata Vera.

Sekadar diketahui, Cellica maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Karawang. Cellica yang didampingi Aep Saepulloh sebagai calon wakil bupati diusung PD, Partai Nasdem, Partai Golkar, dan Partai Keadilan Sejahtera.

"Banyak capaian-capaian positif yang terjadi di Karawang. Ini yang membuat partai lain seperti Nasdem, Golkar, dan PKS ikut mendukung Cellica," kata Vera yang juga Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jabar VII meliputi Karawang, Bekasi, dan Purwakarta.

Cellica-Aep telah mendaftar ke KPU Karawang, Jumat (4/9). Cellica-Aep akan menghadapi dua kandidat lainnya yakni Yesi Karya Lianti-Ahmad Adly Fairuz, dan Zamakhsyari-Yusni Rinzani. Cellica pernah berbicara soal investasi kebaikan yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat.

Menurutnya, investasi kebaikan membutuhkan proses panjang. "Saya pikir investasi kebaikan itu enggak bisa tiba-tiba saja. Ini harus dilakukan bertahun-tahun. Saya bukan siapa-siapa di Karawang. Kerja keras saya sebagai pribadi dan makhluk sosial terus saya jalankan," kata Cellica.



ANTARA

Cellica Nurrachadiana

> **"Saya pikir investasi kebaikan itu enggak bisa tiba-tiba saja. Ini harus dilakukan bertahun-tahun. Saya bukan siapa-siapa di Karawang. Kerja keras saya sebagai pribadi dan makhluk sosial terus saya jalankan."**

Cellica menambahkan, investasi kebaikan tersebut, akhirnya berbanding lurus ketika terjun ke dunia politik. Sebelum menjadi bupati, Cellica dipercaya menjadi wakil bupati, termasuk anggota DPRD Jabar.

"Saya juga tidak pernah lari dari masalah. Ada demo selalu saya hadapi. Demo buruh, aktivis lingkungan, penyampaian aspirasi selalu saya hadapi, dan kami cari solusi terbaik sesuai aturan dan regulasi," ungkap Cellica.

Cellica pun menyebut, "Selama kita bisa penuhi apa yang jadi keinginan rakyat, saya rasa akan berbanding lurus dengan apa yang akan kita dapatkan, khususnya kepercayaan publik kepada pemimpin daerah, terlebih kaum perempuan."

Tak Sembarangan

Pasangan calon bupati-wakil bupati Karawang Yessy Karya Lianti - Adly Fairuz berada di tengah tekanan dua pasangan lain yang merupakan petahana. Yakni bupati petahana Celica Nurrachdiana kini berpadangan dengan Aep Syaepuloh. Sedangkan wakil bupati petahana Zamakhsyari berpasangan dengan Yusni Rinzani.

Kesan Yessy-Adly semacam *underdog* diantara dua pasangan petahana itu tak bisa dihindari. Pengamat Politik M Sukron mengatakan bahwa wajar saja bila ada pendapat seakan keduanya merupakan *underdog n*amun, politik adalah masalah pilihan rakyat.

"Ujungnya, rakyat yang akan menentukan di TPS saat Pilkada 2020 nanti. Pasangan Yessy-Adly punya peluang yang sama dengan pasangan lainnya," kata Sukron, Sabtu (5/9).

Secara peta politik, pasangan Cellica Nurrachadiana dan Aep Syaepuloh diusung Partai Demokrat, PKS, Nasdem dan Golkar. Sementara Zamakhsyari-Yusni Rinzani diusung PKB dan Gerindra.

Sedangkan Yessy- Adly Fairuz juga didukung oleh partai yang tak sembarangan. Pasangan kolaborasi profesi dokter dan aktor tersebut diusung oleh PDI-P, PPP, PAN, dan PBB.

Untuk diketahui, Yessy adalah seorang dokter yang memegang gelar spesialisasi MARS alias Master Administrasi Rumah Sakit.

"Jangan sepelekan pasangan ini. Karena didukung oleh PDI Perjuangan. Mesin partainya paling kuat di lapangan," ujar Sukron, yang juga Direktur Eksekutif Segitiga Institute tersebut.

Soal ketokohan, dia meyakini Yessy-Adly juga patut diperhitungkan. Yang satu dokter, sementara satunya adalah tokoh populer sekaligus masih kerabat Wapres KH Ma'ruf Amin. Pada pilpres 2019 lalu, Adly sempat dihadirkan oleh keluarga Wapres Ma'ruf Amin. Disitu pertama kalinya publik mengetahui bahwa Adly ternyata memiliki hubungan kekerabatan dengan sang kiyai besar tersebut.

"Kesimpulan saya, peta politik pilkada Karawang akan sangat ketat. Dua pasangan calon petahana bukan berarti akan mendominasi sendiri. Yessy-Adly justru berpotensi sekali jadi kuda hitam," katanya. [MJS/C-6]

DPR: Pendaftar Paslon ke KPUD Dibatasi, Manfaatkan *Live* Medsos

[JAKARTA] Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin menyatakan, dirinya meminta agar penyelenggara pemilu dan para pasangan calon dapat menerapkan protokol kesehatan saat melakukan pendaftaran Pilkada 2020 yang akan berlangsung hingga esok.

"Saya harap jangan terlalu banyak membawa simpatisan. Saya harapkan pelaksanaan pendaftaran Pilkada 2020 bukan menjadi sebuah klaster baru penyebaran Covid-19 saat pendaftaran pasangan calon," Kata Azis, di Jakarta, Sabtu (5/9).

Diapun meminta Lembaga Penyelenggara Pemilu bertindak tegas dengan membatasi jumlah pendamping pasangan calon yang masuk saat pendaftaran. Baginya, maksimal satu orang dari partai pengusung yang dibolehkan, dan tidak melakukan iring-iringan dengan jumlah massa yang banyak.

Dengan itu, jika misalnya satu pasangan calon didukung 5 partai, maka cukup diwakili 5 orang saja mewakili unsur partai. Baginya, langkah ini untuk menjaga dan menghindari berkumpulnya massa saat berlangsungnya pendaftaran.

Azis juga menyerukan agar para pasangan calon dan lembaga penyelenggara pemilu menyediakan siaran langsung melalui aplikasi medsos. Sehingga masyarakat, khususnya para pendukung, dapat melihat semua proses itu secara virtual.

"Perkembangan teknologi harusnya menjadi sebuah jawaban," Aziz. [C-6]

Ketua MPR Prihatin Konten *Hoax* soal Covid-19

[SERANG] Konten *hoax* terkait Covid-19 masih marak bermunculan di media sosial. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat ada ribuan konten *hoax* dan disinformasi yang menyesatkan informasi soal Covid-19.

Demikian disampaikan Ketua MPR Bambang Soesatyo saat membuka Press Gathering Koordinatoriat Wartawan Parlemen di kawasan Anyer, Serang, Banten, Sabtu (5/9).

"Konten hoaks dan disinformasi terkait Covid-19 ini sungguh memprihatinkan. Ketika kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat terhimpit dampak pandemi Covid-19, masih ada saja pihak-pihak tak bertangggungjawab yang mencederai psikologis masyarakat dengan menyebarluaskan informasi menyesatkan," kata Bambang.

Bambang berharap pers dapat menyajikan informasi utuh berbasis fakta. Dengan begitu, jika ada masyarakat yang ragu terhadap informasi tertentu di medsos, maka bisa dikonfirmasi melalui pemberitaan media arus utama. "Karenanya, pers tak boleh ikut-ikutan menggunakan cara-cara bombastis umpan *click (*clickbait) hanya demi mengejar jumlah target pembaca," harap Bambang.

Bambang menuturkan, pers sepatutnya tetap mengedepankan etika jurnalistik dalam menyajikan informasi. Sebab hal itu yang menjadi letak kekuatan pers, dibanding *buzzer*.

Menurutnya, para *buzzer* yang hanya bisa menghadirkan informasi bombastis tanpa makna, bahkan cenderung malah menyesatkan serta membuat pembelahan sosial di masyarakat.

"Merawat kepribadian serta jati diri bangsa agar tak tergerus akibat pembelahan sosial karena *hoax* maupun *hate speech*, adalah tugas kolektif kita bersama, termasuk pers. Dengan jangkauan yang luas dan tingkat aksesibilitas yang tinggi, media massa mempunyai peran strategis dalam menyebarluaskan wawasan kebangsaan," ujar Bambang.

Mitra Penting

Bambang mengatakan, pers telah menjadi salah satu mitra penting MPR dalam melaksanakan berbagai tugas konstitusional. Misalnya dalam mewujudkan visi MPR sebagai rumah kebangsaan. Ditambahkan, pers kerap mendukung MPR sebagai wadah sekaligus representasi dari beragam aspirasi, pemikiran serta arus perubahan.

"Kemajemukan adalah fitrah kebangsaan yang harus senantiasa dihormati dan dilindungi. Sebagai rumah kebangsaan, MPR menegaskan setiap warga negara merupakan bagian tak terpisahkan dari satu ikatan kebangsaan, termasuk pers yang menjadi corong penyebar semangat kebangsaan, penyebar semangat gotong royong dan kebersamaan," kata Bambang.

Bambang optimistis di tengah derasnya gempuran digitalisasi dengan hadirnya *buzzer* hingga *influencer* yang terkadang menjadi referensi masyarakat mendapatkan informasi, pers masih memiliki peran signifikan. "Khususnya sebagai kekuatan publik yang merepresentasikan fungsi kontrol dan kritik rakyat terhadap jalannya roda pemerintahan. Dahsyatnya digitalisasi justru harus dijadikan tantangan bagi pers untuk memberikan pelayanan informasi yang mendalam, akurat, obyektif dan berimbang," ucap Bambang.

Bambang pun menyebut, "Sebagai pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif, pers turut memiliki tanggungjawab membangun masyarakat sehat yang melek informasi sekaligus menjadi filter atas maraknya informasi menyesatkan yang begitu mudah tersebar melalui media sosial hingga menjadi viral."

Turut hadir langsung dalam kegiatan itu para Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Syarief Hasan, dan Hidayat Nur Wahid (secara virtual). Hadir pula pimpinan fraksi-fraksi MPR yakni Idris Laena (Fraksi Partai Golkar), Taufik Basari (Fraksi Partai Nasdem), Anton Sukartono (Fraksi Partai Demokrat), Arwani Thomafi (Fraksi PPP) dan Intsiawati Ayus (Kelompok DPD). [C-6]



SP/CARLOS KY PAATH

Ketua MPR Bambang Soesatyo saat membuka Press Gathering Koordinatoriat Wartawan Parlemen di kawasan Anyer, Serang, Banten, Sabtu (5/9).

Satgas Yonif PR 432 WSj Tiba di Jayapura



ANTARA/INDRAYADI TH

Prajurit Yonif Para Raider 432/Waspada Setia Jaya meneriakkan yel-yel usai apel penerimaan Satuan (Satuan Tugas) Pengamanan Daerah Rawan (Pamrahwan) di pelabuhan Kota Jayapura, Papua, Minggu (6/9). Sebanyak 500-an prajurit yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Yonif Para Raider 432/Waspada Setia Jaya tiba di Kota Jayapura menggunakan KRI Teluk Bintuni (520). Yonif PR 432/WSJ ini menggantikan Satgas Yonif Raider 751/Vira Jaya Sakti dalam tugas operasi Pengamanan Daerah Rawan (Pamrahwan) di wilayah Papua.

Revisi UU Jalan

DPR Ingin Pemerintah Pusat Bisa Intervensi Pembangunan Jalan Desa

[JAKARTA] Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDI-P Jimmy Demianus, meminta agar RUU tentang Jalan bisa memasukkan klausul pemerintah bisa mengintervensi pembangunan jalan kabupaten. Hal ini utamanya untuk jalan yang berfungsi sebagai penghubung antar desa.

Selama ini, pembangunan jalan kabupaten hanya boleh dilakukan pemerintah daerah (Pemda) tingkat II. Sementara, menurut Jimmy, tanpa intervensi pemerintah melalui APBN, maka jalan kabupaten dan penghubung antar desa akan terus relatif tidak layak.

"Sejauh ini jalan kabupaten relatif tertinggal. Misalnya di dapil saya di Papua Barat, dimana distribusi barang kebutuhan menjadi terganggu. Membuat inefisiensi ekonomi karena biaya angkut menjadi makin mahal," kata Jimmy, di Jakarta, Sabtu (5/9).

Dijelaskan dia, Komisi V DPR sudah menginisiasi proses legislasi yakni revisi terhadap UU Jalan. Hal itu dilatarbelakangi keprihatinan banyaknya keluhan terkait jalan, khususnya, di wilayah perdesaan.

Beri Kontribusi

Jimmy berharap, pemerintah pusat bisa memberikan kontribusi lebih kepada pembangunan jalan kabupaten.

Menurutnya, jika tidak ada intervensi pemerintah dalam bentuk APBN, maka sulit atau perlu waktu relatif lama bagi jalan-jalan kabupaten dan penghubung desa bisa mengejar ketertinggalan dari jalan utama.

"Kalau diharapkan APBD kabupaten/kota yang kebanyakan hanya bersumber dari DAU, maka tidak akan mampu membangun jalan, jembatan yang layak, terutama di perdesaan," katanya.

"Hanya dengan pembangunan jalan penghubung desa dengan layak, maka kemajuan kita sebagai bangsa ini bisa terwujud," katanya. [MJS/W-12]

Basarah: Pernyataan Puan soal Sumbar Dipolitisasi

[JAKARTA] Nama Ketua DPP PDI Perjuangan (PDI-P) Puan Maharani ramai dibicarakan. Pernyataan Puan saat mengumumkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat (Sumbar) yang diusung PDI-P, disebut telah dipolitisasi sejumlah pihak. "Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung Pancasila. *Bismillahirrahmanirrahim*," demikian Puan kala itu.



SP/CARLOS KY PAATH

Ahmad Basarah

Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah menilai, pernyataan Puan tersebut, dipolitisasi dengan berbagai latar belakang motif. Mulai dari persaingan kontestasi Pilkada Sumbar sampai ideologis dan politis untuk menghancurkan citra Puan dan PDI-P.

Menurut Basarah, semestinya pandangan Puan perlu dilihat secara mendalam.

"Jika diselisik secara jernih dalam konteks alam pikir kebangsaan dan spiritualitas, Puan Maharani sebagai seseorang yang sedang memegang amanat sebagai Ketua DPR perempuan pertama, kita sesungguhnya telah menemukan esensi alam pikir dan spiritualitas seorang Puan Maharani dalam dimensi nasionalisme religius," kata Basarah, di Jakarta, Minggu (6/9).

Basarah, yang juga ketua DPP PDI-P, menambahkan, Puan mengucapkan kata "Pancasila" dan "Bismillah" secara sadar dan khidmat. Hal ini, menurut Basarah, membuktikan bahwa dalam diri Puan terbentuk dan mengalir pikiran kebangsaan dan sikap religius yang sangat kuat.

"Konstruksi pemikiran dan sikap Puan yang nasionalis religius ini menggambarkan Puan bukan hanya sosok cucu biologis Bung Karno, tetapi juga sosok cucu ideologis Bung Karno. Nasionalisme religius Puan Maharani juga lahir dari latar belakang kultural ayahnya, Almarhum Taufiq Kiemas, dan ibunda tercinta, Megawati Soekarnoputri," ungkap Basarah.

Basarah menyebut agak mengherankan jika ada yang tesinggung, hanya karena Puan berharap Sumbar menjadi provinsi yang mendukung Pancasila.

Basarah menilai, mestinya ucapan Puan itu justru dilihat dari kecintaannya yang besar pada rakyat Sumbar. Puan menginginkan masyarakat Sumbar dapat lebih sejahtera dan berkeadilan sosial melalui Pilkada 2020 ini.

Basarah mengungkap dalam darah Puan mengalir garis keturunan Minang yang kuat. "Tak mungkin ia ingin menistakan tanah kelahiran nenek moyangnya sendiri. Nenek Puan dari garis ayahnya, yakni almarhum Taufiq Kiemas, bernama Hamzatun Rusdja adalah tokoh perempuan Minang dari Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Taufiq Kiemas sendiri pernah mendapat gelar Datuk Basa Batuah. Ibunya, Megawati Soekarnoputri, mendapat gelar Puti Reno Nilam," ucap Basarah.

Basarah melihat Puan sebagai sosok yang mewakili keindonesiaan dengan begitu kuat. Sebab dalam diri Puan mengalir darah nenek moyang dari beragam suku dan daerah. Dari trah ibunya, Megawati Soekarnoputri, Eyang Buyut Puterinya berasal dari Bali bernama Ida Ayu Nyoman Rai.

Majemuk

Sementara Eyang Buyut Putera berasal dari Jawa Timur bernama Raden Soekemi Sosrodihardjo. "Dari merekalah lahir seorang tokoh nasionalis-religius berwawasan luas bernama Soekarno. Sedang neneknya, Fatmawati, adalah puteri dari pasangan Hasan Din dari Bengkulu dengan Siti Khadijah dari keturunan Kerajaan Inderapura yang berpusat di Pesisir Selatan, Sumatera Barat," imbuh Basarah.

Dari garis keturunan ayahnya, Almarhum Taufiq Kiemas, kakek Puan berasal dari Sumatera Selatan bernama Tjik Agoes Kiemas dan Nenek bernama Hamzatoen Rosjda dengan ayah berasal dari Pulau Pisang Krui, Lampung, bernama Joesaki, dan ibu dari Batipuh Tanah Datar, Sumatera Barat, bernama Taksiah.

"Dengan silsilah keluarga yang majemuk itu, dalam diri Puan mengalir darah Jawa Timur, Bali, Bengkulu, Lampung, Sumatera Selatan dan Sumatera Barat. Sosok Puan Maharani adalah ciri khas Indonesia sejati," kata Basarah.

Basarah menuturkan, jika ditelaah secara geografi politik, daerah-daerah garis keturunan nenek moyang Puan menggambarkan daerah berlatar belakang nasionalis religius. "Jawa Timur dan Bali dapat kita asumsikan mewakili daerah nasionalis (dan religius) dan daerah Bengkulu, Lampung, Sumatera Selatan dan Sumatera Barat mewakili daerah yang diasumsikan sebagai daerah agamis atau religius (dan nasonalis)," jelas Basarah.

Basarah mengatakan, perpaduan gen ideologis dan kultural daerah nenek moyang Puan itulah yang membentuk karakter politik nasionalis religiusnya. Alam pikir dan spiritualitasnya menginstruksikan Puan untuk mengeluarkan kata "Pancasila" dan "Bismillah" dalam satu tarikan nafas. [C-6]

Soal Wamen Rangkap Jabatan, MK Tak Beri Putusan

[JAKARTA] Staf Khusus Presiden bidang Hukum Dini Purwono mengatakan, soal rangkap jabatan wakil menteri (wamen), Mahkamah Konstitusi (MK) tidak memberikan keputusan. Justru permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima oleh MK.

"Soal rangkap jabatan Wamen, MK tidak memberikan keputusan. Permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima oleh MK," kata Dini Purwono, Minggu (6/9).

Dini menjelaskan, MK memang memberikan pendapat yang menyatakan ketentuan rangkap jabatan yang berlaku terhadap menteri, seharusnya diberlakukan *mutatis muntandis* terhadap jabatan wamen.

"Sebagai klarifikasi pendapat MK ini sifatnya tidak mengikat karena bukan bagian dari keputusan MK. Pemerintah akan memperhatikan dan mempelajari lebih lanjut pendapat MK tersebut," ujar Dini Purwono.

Namun, hingga saat ini, Dini masih melihat banyak pendapat di media massa yang salah mempersepsikan pendapat MK tersebut. Bahkan menjadikan pendapat MK sebagai keputusan yang sifatnya final dan mengikat.

"Saya lihat soalnya di media masih banyak pendapat-pendapat *blunder* yang mengatakan bahwa pendapat MK itu adalah keputusan MK dan karenanya final serta mengikat. Padahal tidak," tegas Dini Purwono.

Sebelumnya, MK mengeluarkan pendapat melarang wamen merangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan negara ataupun swasta. Pendapat ini dikeluarkan MK untuk menjawab gugatan soal Undang-Undang (UU) 39/2008 tentang Kementerian Negara. Dalam UU diatur soal jabatan wamen dan larangan untuk rangkap jabatan.

Gugatan diajukan oleh Ketua Forum Kajian Hukum dan Konstitusi Bayu Segara ke MK pada awal Januari 2020. [LEN/W-12]

Mendagri: Tindak Kerumunan Massa



ANTARA/ANIS EFIZUDIN

Suasana pendaftaran bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Nur Aziz dan KH Mansyur Siraj di kantor KPU Kota Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (5/9). KPU Kota Magelang menyiarkan secara langsung proses pendaftaran calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang melalui media sosial untuk mencegah kerumunan masa guna mencegah penularan Covid-19.

[JAKARTA] Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Politik dan PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Bahtiar menyayangkan banyaknya kerumunan pada saat pendaftaran bakal pasangan calon (bapaslon) Pilkada 2020. Dia meminta aparat keamanan dan penyelenggara pilkada agar menindak tegas para pelanggar berdasarkan aturan yang sudah ada.

"Mendagri sudah mengimbau agar pada saat pendaftaran bapaslon cukup perwakilan partai politik dan petugas administrasi pendaftaran saja. Tapi ternyata masih banyak yang membawa massa pendukung dalam jumlah besar," kata Bahtiar, di Jakarta, Minggu (6/9).

Ia menjelaskan, Kemdagri mendukung sepenuhnya sikap tegas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menghentikan segala bentuk kerumunan massa. Dalam PKPU 6/2020 sudah diatur ketentuan pendaftaran bakal pasangan calon harus memperhatikan protokol kesehatan. Dalam Pasal 50 ayat 3 PKPU 6/2020, dinyatakan pendaftaran bapaslon hanya dihadiri oleh ketua dan sekretaris parpol pengusul dan atau bapaslon perseorangan.

"Mohon bantuan aparat keamanan dan aparat penegak hukum sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Peraturannya sudah jelas, jadi bagi yang melanggar protokol kesehatan harus mendapatkan sanksi," tegas Bahtiar.

Dia meminta seluruh bakal pasangan calon (paslon) selalu patuh pada protokol kesehatan. Para paslon harus memberikan pemahaman ke masyarakat bahwa pelaksanaan Polkada bukan menjadi media penyebaran Covid 19.

"Keselamatan warga negara di atas segalanya. Mari kita bersatu dan saling mengingatkan pentingnya kepatuhan menjalankan protokol kesehatan, dalam Pilkada Serentak 2020," tutup Bachtiar.

Materi Kampanye Pilkada

Sementara itu, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyatakan, materi kampanye seluruh pasangan calon (paslon) pemimpin daerah diharapkan merujuk Empat Pilar MPR yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tinggal Ika.

"Dalam pilkada nanti kita harap para kandidat sampaikan program dengan merujuk Empat Pilar MPR. Materi kampanye jangan keluar dari Empat Pilar yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika," tegas Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, di Serang Banten, Sabtu (5/9).

Hidayat hadir melalui telekonferensi. Pada kesempatan itu, Hidayat menekankan pentingnya persatuan nasional.

"Tidak boleh kita terpecah belah. Tidak boleh program kampanye mengarah terorisme, kapitalisme, radikalisme, dan komunisme. Kalau materi kampanye acuannya Empat Pilar MPR, maka pilkada akan berkualitas," ujar Hidayat.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi mengatakan Empat Pilar MPR sepatutnya dijiwai para pemangku kebijakan di Tanah Air. "Empat Pilar MPR harus betul-betul dijiwai para pelaksana kebijakan, baik dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif," kata Arwani yang turut menjadi pembicara. [C-6/F-5/R-14]



Kejagung Punya Waktu Sepekan Teliti Berkas Perkara Djoko Tjandra

Komjak Diingatkan Tak Ganggu Proses Hukum

[JAKARTA] Kejaksaan Agung telah menerima berkas perkara tahap I perkara dugaan gratifikasi penghapusan *red notice* Djoko Tjandra dari penyidik Bareskrim Polri ke penuntut umum. Berkas perkara tersebut dilimpahkan pada Rabu (2/9).



ANTARA/ADAM BARIQ

Terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra berjalan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Bundar Kompleks Gedung Kejakasaan Agung, Jakarta, Senin (31/8). Djoko Tjandra diperiksa sebagai tersangka dalam kasus suap kepada oknum Jaksa Pinangki terkait kepengurusan permohonan peninjauan kembali (PK) dan pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung (MA).

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Hari Setiyono, menjelaskan, pasca penyerahan berkas tahap I, jaksa peneliti mempunyai waktu untuk meneliti berkas perkara Djoko Tjandra dan lainnya dalam waktu 7 hari untuk memberitahukan kepada penyidik, apakah berkas perkara tersebut lengkap atau tidak.

"Kami sudah menerima berkas perkara tahap 1 untuk perkara dugaan gratifikasi atau suap dari Bareskrim Mabes Polri atas nama tersangka JST, PU, NB dan TS. Sekarang sedang diteliti, waktu 7 hari untuk ambil sikap," kata Hari, kepada *SP*, di Jakarta, Minggu (6/9).

Menurut Hari, apabila berkas sudah dinyatakan lengkap (P21), maka penyidik Bareskrim Polri dapat langsung melimpahkan berkas tahap II, yakni tersangka dan barang bukti namun jika dirasa kurang lengkap, berkas akan dikembalikan.

Tunggu

Sementara itu, penyidik Dit Tipidum Bareskrim tinggal menunggu jawaban jaksa terkait berkas penyidikan kasus penggunaan surat jalan asli tapi palsu terkait Djoko Tjandra.

"Sementara ini belum ada laporan polisi baru (hanya menunggu jawaban jaksa dalam kasus surat jalan)," kata Dir Pidum Bareskrim Brigjen Fredy Sambo, saat dihubungi *SP,* Minggu (6/9).

Seperti diberitakan ada tiga berkas yang dikirimkan penyidik Dit Pidum ke jaksa pada Jumat (4/9). Yakni berkas perkara Anita Kolopaking setebal 2.025 lembar, berkas Djoko setebal 1.879 lembar, dan berkas Brigjen Prasetijo Utomo setebal 2.080 lembar.

Jika ada yang kurang lengkap maka berkas akan dikembalikan ke penyidik atau P-19. Jika sudah lengkap maka berkas akan dinyatakan P-21 yang artinya tersangka kasus ini akan disidang.

Dalam konstruksi hukumnya, Brigjen Prasetijo disangka dengan tiga pasal berlapis yakni Pasal 263 Ayat 1 dan Ayat 2 *juncto* Pasal 55 Ayat 1 Kesatuan E KUHP, Pasal 426 Ayat 1 KUHP dan atau Pasal 221 Ayat 1 KUHP.

Sementara Anita disangkakan melanggar Pasal 263 Ayat 2 KUHP berkaitan dengan pembuatan surat palsu. Selain itu, dia juga disangkakan telah melanggar Pasal 223 KUHP, yakni memberi bantuan atau pertolongan terhadap Djoko Tjandra selaku buronan untuk meloloskan diri.

Sedangkan Djoko dijerat Pasal 263 ayat 1 dan 2, Pasal 426, Pasal 221 KUHP. Ancamannya 5 tahun penjara.

Proses Hukum

Sebelumnya, akademisi Universitas Indonesia (UI) Chudry Sitompul mengingatkan Komisi Kejaksaan (Komjak) agar tidak membangun opini terhadap Kejagung dalam menangani kasus Djoko Tjandra yang melibatkan jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Menurut Chudry, tindakan Komjak dapat mengganggu jalannya proses hukum yang dilakukan Kejagung.

"Komjak bukan aparat penegak hukum yang boleh melakukan penyelidikan atau penyidikan," ujar Chudry, saat dihubungi *SP*, Sabtu (5/9).

Komjak berencana meminta keterangan Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait kasus gratifikasi kepengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) yang membelit jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Chudry menuturkan, Komjak sejatinya tidak ikut campur dalam ranah hukum yang ditangani Kejagung. Sebagaimana tugas dan fungsinya, dia menyebut Komjak hanya fokus pada masalah etik di internal Kejaksaan.

"Komjak ini kalau kita lihat tupoksinya itu pelanggaran etik. Itu pun kalau dilaporkan masyarakat atau diminta oleh Kejaksaan," kata Chudry

Kejagung, kata Chudry, juga belum dapat disebut lamban dalam menangani kasus Pinangki. Pasalnya, jika diamati, dia berkata kasus Pinangki baru berjalan satu bulan. Sedangkan Pinangki baru sekitar 20 hari pasca ditetapkan tersangka pada 12 Agustus 2020.

Tak hanya itu, Chudry menyebut, tindakan Komjak ingin memeriksa Pinangki yang telah menjadi tersangka seolah membangun opini bahwa lembaga itu sebagai penegak hukum

"Komjak itu seperti Komisi Yudisial atau Kompolnas. Kalau Komjak ikut memeriksa, tidak sesuai dengan tupoksinya," kata Chudry.

Pandangan serupa disampaikan kademisi dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komaruddin. Dia juga mengimbau agar Komjak tidak membangun opini negatif terhadap Kejagungyang sedang fokus menangani kasus Djoko Tjandra dan mantan jaksa Pinang Sirna Malasari.

Komjak atau elemen masyarakat lain harus mempercayakan penanganan kasus tersebut kepada Kejaksaan.

"Kita tidak boleh bangun opini, tidak boleh menyerang. Kita harus objektif kalau bangsa ini ingin maju," tutur Ujang.

Ujang menuturkan, semua pihak harus memberi apresiasi kepada Kejagung yang telah menindak cepat kasus Djoko Tjandra meski semula diragukan. Dia mengatakan, Kejagung telah bertindak profesional dalam mewujudkan kredibilitas negara dalam konteks penegakan hukum.

"Seharusnya memang institusi permanen seperti kejaksaan yang harus didorong maju terdepan dalam pemberantasan korupsi. Dalam kasus Djoko Tjandra kita apresiasi, begitu cepat bergerak," jelas dia.

Di sisi lain, Ujang berharap masyarakat ikut mengawal kinerja Kejagung ke depan. Namun, dia mengingatkan masyarakat untuk objektif menilai kinerja Kejagung.

"Semua ingin bangsa ini berubah, kalau kritiknya ada maunya, tidak konstruktif, lebih baik diam. Semua berhak mengkritik tapi harus objektif dan konstruktif," katanya. [FAR/YUS/Y-7]

Adik Jaksa Pinangki Sulit Dijerat Pasal TPPU

[JAKARTA] Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung), hingga kini terus menelusuri aliran dana dugaan kasus pemufakatan jahat yang dilakukan tersangka Joko Sugiarto Tjandra atau Djoko Tjandra dengan oknum jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Terakhir, penyidik Kejagung juga periksa adik Jaksa Pinangki, atas nama Pungki Primarini. Yang bersangkutan diperiksa penyidik terkait dengan dugaan pencucian uang atau TPPU.

Praktisi hukum Ricky Vinando, menilai, upaya penyidik yang memeriksa adik Jaksa Pinangki karena dicurigai ada transaksi rekening antara Jaksa Pinangki dan adiknya.

"Saya kira (pemeriksaan) itu terlalu jauh. Harusnya setop di Pinangki saja tak bisa sampai adik Pinangki. Pertanyaan hukumnya yang harus dijawab semua yang ikut menuduh adik Pinangki terlibat adalah, apa semua orang yang pernah dapat uang dari Pinangki juga mau di pidana oleh Kejagung," kata Ricky Vinando, di Jakarta, Minggu (6/9).

Menurutnya, saat ini penyidik Kejagung seharusnya fokus terhadap kasus jaksa Pinangki. Jika tidak, maka kasus tersebut justru akan semakin lambat penanganannya.

"Apa semua dokter-dokter yang pernah didatangi Pinangki juga mau dipidanakan? Apakah semua pemilik atau restoran mewah di Jakarta yang pernah jadi tempat *lunch* atau *dinner* Pinangki juga mau diperiksa mau dipidanakan juga? Kejagung harusnya fokus ke Pinangki saja, jangan melebar ke mana-mana," ujarnya.

Dirinya mencontohkan, ada fakta kasus yang tak terbantahkan ketika dulu dalam kasus gratifikasi Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, istri Akil Mochtar Ratu Rita sebagai pemilik CV Ratu Samagat pernah diperiksa KPK terkait TPPU Akil Mochtar. Posisinya mirip dengan posisi adik Pinangki saat ini.

Saat itu Ratu Rita diperiksa menyangkut rekening bank CV miliknya, CV Ratu Samagat yang menerima penempatan dana dari Akil Mochtar. Tapi Ratu Rita sebagai pemilik CV yang menerima penempatan dana dari Akil Mochtar tidak dijadikan tersangka oleh KPK bahkan sampai putusan berkekuatan hukum tetap kasasi pun disebutkan ada penempatan dana ke dalam rekening CV Ratu Samagat milik Ratu Rita, tapi tetap tidak bisa dipidanakan.

"Tidak ada logika hukumnya itu. Nah begitupun dengan Adik Pinangki, karena ya itu tadi apa semua orang yang dapat uang dari Pinangki akan dipidanakan? Itu pertanyaan hukumnya," ungkapnya. [Y-7]

2 Minggu Berlalu, Penyebab Kebakaran Gedung Kejagung Masih Gelap

[JAKARTA] Kepolisian hingga kini belum dapat menyimpulkan apa yang menjadi penyebab terbakarnya gedung utama Kejaksaan Agung (Kejagung) di Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Padahal, kebakaran itu sendiri berlangsung pada Sabtu (22/8), atau sudah sekitar dua minggu lalu.

Guru besar Universitas Pelita Harapan (UPH) dan Ketua Program Studi S2 Teknik Sipil UPH, Manlian Ronald Simanjuntak menjelaskan, untuk mengetahui penyebab kebakaran, selain melibatkan kepolisian, juga harus dilakukan juga tim ahli bangunan gedung Pemda DKI Jakarta, tim ahli *fire safety,* dan tim pengelola bangunan Gedung Kejaksaan Agung.

"Kebakaran bangunan gedung utama di Kawasan Kejaksaan Agung di Jakarta selain dilakukan tim kepolisian, harus dilakukan juga tim ahli bangunan gedung Pemda DKI Jakarta, tim ahli fire safety, dan tim pengelola bangunan gedung Kejaksaan Agung," kata Manlian, di Jakarta, Sabtu (5/9).

Dirinya mengingatkan, pascakebakaran, bangunan gedung utama di kawasan Kejagung, Indonesia harus berubah lebih baik. Kedepannya, pemerintah juga harus memikirkan dan memutuskan dimana ruang kerja Jaksa Agung mendatang.

"Hal ini saya sudah renungkan mendalam, karena mungkin kita atau bahkan pejabat tinggi negara sekalipun belum atau tidak menyadari hal ini," ujarnya.

Pascakebakaran, dirinya menyarankan, program ke depan yang harus dilaksanakan terkait dengan revitalisasi bangunan gedung utama yang terbakar. Namun yang menjadi pertanyaan kemudian, apakah gedung utama yang terbakar dibongkar? Apakah gedung utama yang terbakar diretrofit? Atau apakah gedung utama yang terbakar dialihfungsikan.

Program kedua yaitu terkait segera putuskan dimana ruang kerja Jaksa Agung. Apakah di kawasan eksisting atau disiapkan di lokasi yang baru.

"Siapa yang selama ini memutuskan ruang kerja Jaksa Agung di lantai 2 Bangunan Gedung Utama yang terbakar? Apakah ruang kerja Jaksa Agung mendatang masih di kawasan eksisting?" ucapnya.

Program ketiga yaitu dirinya menyarankan agar dilakukan pengecekan total seluruh keandalan bangunan gedung di kawasan Kejagung. Mengingat, ada dampak penting dan positif dari kebakaran yang terjadi, yakni di waktu mendatang akan mengoptimalkan seluruh massa bangunan gedung di kawasan Kejagung.

Selanjutnya, yakni ada baiknya dilakukan pengecekan total seluruh keandalan bangunan gedung milik pemerintah di DKI Jakarta. Dampak berharga dari kebakaran yang terjadi akan mengoptimalkan seluruh keandalan bangunan gedung pemerintah di seluruh Indonesia.

Dirinya mengingatkan, urusan kebakaran bukanlah masalah atau hal yang kecil. Urusan kebakaran adalah urusan wajib pemerintah bersama masyarakat. Terlebih dampak Kebakaran mampu mengubah seluruh sistem kehidupan manusia, termasuk aspek sosial, aspek administrasi, aspek teknis. [Y-7]

SIM Gratis Sinergisitas TNI-Polri



ANTARA/RAHMAD

Prajurit TNI Detasemen Arhanud-001/CSBY mengikuti pemotretan pembuatan Surat Ijin Mengemudi (SIM) di ruang foto Satlantas Polres Lhokseumawe, Aceh, Sabtu (5/9). Satlantas Polres Lhokseumawe memberikan kado menjelang HUT ke-75 TNI berupa pembuatan SIM A dan SIM C gratis bagi prajurit TNI.

Kuasa Hukum Terdakwa Klaim Laba Jiwasraya Periode 2008-2018 Nyata

[JAKARTA] Kresna Hutauruk, kuasa hukum Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat mengklaim keuntungan PT Asuransi Jiwasraya pada periode 2008 hingga awal 2018 nyata. Untuk itu, Kresna membantah dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya yang menyebutkan keuntungan Jiwasraya pada periode 2008-2018 dalam laporan keuangannya semu.

Menurut Kresna, pada periode 2008-2018, pencatatan keuangan perusahaan asuransi jiwa pelat merah atau BUMN itu mendapat untung dan hal tersebut tidak semu. Asuransi Jiwasraya pada periode itu tidak pernah gagal bayar klaim dan mampu membayarkan tantiem atau bonus prestasi kepada karyawan dan bahkan sempat membagikan dividen kepada negara.

"Keuntungan Jiwasraya zaman direksi 2008-2018 tidak semu, karena setiap tahun tidak pernah gagal bayar klaim, direksi selalu dapat tantiem, pegawai dapat biaya jasa produksi, dan negara pernah mendapat dividen," kata Kresna, di Jakarta, Minggu (6/9).

Kresna mengatakan, laporan keuangan Jiwasraya yang mendapat keuntungan itu diakui oleh mantan Direktur Keuangan PT Jiwasraya, Hary Prasetyo saat bersaksi dalam sidang lanjutan perkara Jiwasraya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (4/9).

Dalam persidangan itu, Kresna menanyakan kepada Hary mengenai biaya asuransi yang meliputi beban gaji, tantiem, dan biaya produksi perseroan pada periode tersebut. Seluruh biaya itu, jelasnya, dibayarkan secara tunai, termasuk gaji kepada sekitar 1.100 pegawai PT Asuransi Jiwasraya. Seluruh bonus prestasi itu pun diberikan kepada karyawan lantaran mendapatkan keuntungan pada periode tersebut.

"Selama ini kan selalu dibilang Jiwasraya untungnya semu. konon katanya untungnya selalu semu, makanya saya tanya biaya asuransi itu apa? Apakah itu dibayarkan *cash*? Tantiem dibayarkan *cash*?," tanya Kresna.

Menjawab hal tersebut, Hary Prasetyo membenarkan bonus kinerja dibayarkan secara tunai. Dikatakan, bonus atas kinerja itu diberikan kepada karyawan didasarkan pada kondisi perusahaan yang meraup untung. Syarat lainnya adalah pemberian tantiem mendapatkan persetujuan dari pemegang saham, yakni Kementerian BUMN.

"(Dasar pemberian bonus itu) tentunya perusahaan untung dan ditetapkan dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), oleh Kementerian BUMN sebagai pemegang saham," kata Hary. [F-5]

Memompa...

sambungan dari hal 1

"Saya mau tanya, tadi ada pedagang Bakpia? Oh ada. Coba ibu, omsetnya berapa?," tanya Jokowi.

Seorang ibu penjual bakpia mengaku, omset penjualannya sebelum pandemi Covid-19 bisa mencapai Rp 400.000 sampai Rp 500.0000. Namun sekarang, hanya sekitar Rp 50.000 bahkan kadang bisa tidak membuka usahanya. Omset anjlok karena tidak ada wisatawan yang datang.

Keluh kesah pelaku usaha kecil seperti itu muncul dalam berbagai kesempatan Jokowi bertemu langsung dan memberikan bantuan produktif.

Pedagang soto, Supoyo mengaku pada Jokowi sempat berhenti berdagang karena sepi. Daripada merugi, modal tidak balik, ia memilih istirahat dulu. "Adanya pandemi ini, sepinya *ndak karuan*. Akhirnya kita memilih istirahat daripada enggak kembali modal," katanya.

Supyo bersyukur karena dia dihubugi pihak BRI yang menyalurkan bantuan. "Saya bangkit lagi," cerita pria yang biasa dipanggil Pak Poyo ini. Poyo pun mengucapkan terima kepada Jokowi karena telah diberikan dana untuk tambahan modal usaha.

Di Aceh, Selasa (25/8), Jokowi memompa semangat para pelaku usaha. Jokowi menyampaikan rasa optimistisnya perekonomian di Indonesia akan kembali pada posisi normal setelah vaksin Covid-19 ditemukan dan seluruh penduduk divaksinasi. "InsyaAllah nanti akan kembali pada posisi normal setelah penduduk semuanya divaksinasi. Kita baru memproduksi vaksin ini kira-kira bulan Desember 2020-Januari 2021. Sehingga nanti mulai divaksinnya ya bulan itu, bulan Januari," ujar Jokowi.

Jokowi memberikan kepada 200 pelaku usaha di Provinsi Aceh. "Nanti insyaallah akhir September sudah 12 juta," ucap Jokowi. [LEN/A-15]

5 Juta Pendaftar...

sambungan dari hal 1

Kabid Pengawasan dan Bina Usaha DKUM Kota Depok, Jabar, Andi Kuswandi menuturkan, syarat untuk mengajukan permohonan bantuan adalah membuat surat pernyataan memiliki usaha kecil serta fotokopi KTP. Tak mengherankan ada banyak warga yang mencari surat pernyataan. Surat tersebut, kata Andi, cukup ditandatangani Ketua RT dan Ketua RW setempat.

Terkait hal ini, Rully menjelaskan, pihak yang bertanggung jawab bila terjadi penyimpangan atau salah sasaran adalah si penerima bantuan dan pengusul.

"Oleh karena itu, pengusul harus benar-benar tahu bahwa yang akan menerima bantuan itu adalah memang pelaku usaha mikro. Bila menyimpang maka itu adalah tindak pidana murni, urusannya dengan polisi," kata dia.

Ditambahkan, si penerima harus membuat surat pernyataan bahwa ia benar-benar pelaku usaha mikro yang terdampak Covid-19. Bila menipu maka yang bersangkutan berurusan dengan polisi.

Rully mengatakan, tahun 2020 ini ditargetkan sebanyak 12 juta pelaku usaha mikro yang dapat Banpres Produktif. Namun, kata dia, sepertinya akan ditambah tiga juta pekerja sehingga tahun 2020 ini sebanyak 15 juta pelaku usaha mikro dapat bantuan dana tersebut.

Menurut Rully, pihaknya bersama kementerian terkait sudah mengusulkan ke DPR dan DPR setuju bahwa tahun 2021 sebanyak 20 juta pelaku usaha mikro juga akan mendapat bantuan yang sama.

Menurut ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, dalam kondisi normal Indonesia masih menggunakan data proyeksi yang sudah kadaluwarsa. Karena itu, menurutnya, koordinasi dengan beragam pihak diperlukan seperti BUMN yang memiliki UMKM binaan.

"Melibatkan *e-commerce* dan *fintech lending* juga bisa dijadikan alternatif, UMKM terdaftar. Mereka punya data ini sebagai bahan pertimbangan penyaluran. Terakhir yang tidak kalah penting, pengawasan dan proses verifikasi dari dinas UMKM di daerah," imbuhnya.

Agar penyaluran tepat guna, Rendy menekankan pada perlu adanya pelaporan dari para penerima bantuan ini yang nanti di verifikasi oleh pihak terkait, dalam hal ini dinas UMKM di daerah.

Kepala Center of Macroeconomics and Finance Indef, M Rizal Taufikurahman menyampaikan, agar BPUM tepat sasaran, peran perbankan yang ditunjuk sebagai pengusul calon penerima manfaat program harus lebih dioptimalkan.

Apalagi bank memiliki data jumlah saldo tabungan nasabahnya dan juga profesi nasabah tersebut. Dari data yang dimiliki tersebut, petugas bank di lapangan harus melakukan pengecekan secara langsung di lapangan untuk memastikan apakah nasabah tersebut betul pelaku usaha mikro atau bukan.

Dinas terkait di daerah menurutnya juga bisa memfasilitasi pendataran pelaku usaha mikro yang memang membutuhkan bantuan modal usaha. Apalagi tidak semua pelaku usaha mikro mengakses layanan perbankan, sehingga datanya tidak tidak ada di perbankan. Fungsi pengawasan dan pembinaan menurutnya harus diperkuat. Ini untuk memastikan agar bantuan yang diterima benar-benar digunakan untuk usaha, bukan untuk kebutuhan konsumtif.

Kepala Bidang UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKMDKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo mengatakan, pihaknya telah mengusulkan sebanyak 106.113 pelaku usaha mikro untuk menerima Bantuan Produktif.

"Dalam UU UMKM disebutkan usaha mikro adalah pelaku usaha yang memiliki aset paling banyak Rp 50 juta belum termasuk tanah dan bangunan dan omzet setahun paling banyak Rp 300 juta," tutur dia.

Selain itu, kata Ratu, Kemenkop UKM juga memberikan syarat bahwa saldo tabungan calon penerima bantuan tidak lebih dari Rp 2 juta. Namun, dari hasil koordinasi pihaknya dengan Kemenkop UKM ternyata sulit untuk memastikan tabungan seseorang.

Ratu mengungkapkan, tidak semua pelaku usaha yang mendaftar untuk menerima bantuan diterima. Beberapa di antaranya ditolak karena memiliki NIK yang salah, NIK dobel, sedang dalam KUR atau pembiayaan lainnya.

Sementara itu dari daerah, sebanyak 30.000 lebih usaha mikro kecil di Provinsi Bengkulu, diusulkan ke Kementerian Koperasi untuk mendapatkan bantuan. Menurut Kepala Dinas Koperasi dan UKM Bengkulu, Erdiwan, data jumlah UMKM yang akan mendapatkan bantuan ini akan terus bertambah.

Namun, tidak semua masyarakat atau pelaku UMKM yang mengajukan usulan mendapatkan BLT sebesar Rp 2,4 juta tidak semuanya disetujui. "Bantuan ini benar-benar diberikan kepada masyarakat yang memiliki usaha masih aktif dan tidak memiliki pinjaman di bank dan rekening di bank tidak lebih dari Rp 2 juta," ujarnya.
[HER/O-2/YUS/160/143/E-8]

RSD Wisma Atlet...

sambungan dari hal 1

Apalagi menurut Kepala Kordinator Operasional RSD Wisma Atlet, dr Stefanus Doni, dari dua menara yang rencananya akan digunakan untuk isolasi mandiri, baru satu yang akan dimanfaatkan dalam waktu dekat. "Baru satu tower yang akan digunakan, yakni tower 5," ujar Stefanus Doni, Minggu (6/9).

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia mengatakan, pasien gejala sedang dan berat akan dirawat di RS. Sementara pasien yang tidak bergejala dan bergejala ringan, artinya tidak membutuhkan perawatan RS, akan diisolasi di tempat isolasi yang ditetapkan pemerintah. "Salah satunya yang sedang disiapkan secara cepat itu adalah di Wisma Atlet," tutur Dwi Oktavia di Jakarta, Minggu (6/9) malam.

Hal ini senada dengan pernyataan Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo bahwa pihaknya segera memfungsikan Tower 4 dan 5 RSD Wisma Atlet . Kedua menara itu akan difungsikan untuk isolasi mandiri warga yang terinfeksi Covid-19.

Selama ini ada empat menara yang dimanfaatkan untuk RS yakni Tower 1 untuk dokter dan tenaga medis, Tower 3 untuk posko Satgas Penanganan Covid-19, Tower 6 dan 7 untuk ruang rawat inap pasien termasuk IGD dan ICU.

Sementara itu Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Kogabwilhan I), Kolonel Marinir Aris Mudian, menyatakan kesiapannya jika kedua tower tersebut akan difungsikan untuk penanganan pasien Covid-19.

"Kalau secara umum Tower 4 dan 5 siap. Kan dulu *tower* itu disiapkan untuk penginapan. Hanya yang jadi masalah, harus disiapkan sesuai protokol Covid. Ada beberapa bagian yang masih harus disesuaikan," kata Aris Mudian, Minggu (6/9).

Kesiapan sesuai protokol yang dimaksud antara lain ketersediaan peralatan pasien, ruang IGD, hingga ruang ventilator. Semua harus merujuk pada standar penanganan pasien Covid-19 di Indonesia. "Kalau cuma (soal) air, listrik, saya rasa tidak begitu lama. Seluruh ruangan sudah siap," ujarnya. Dijelaskan Aris, Tower 4 dan 5 berdasarkan data awal bisa menampung sebanyak 3.600 tiap menara dalam kondisi normal. Namun, mempertimbangkan pasien Covid-19 butuh penanganan khusus, tentunya tidak bisa diisi kapasitas maksimal. Sedangkan bila melihat menara sebelumnya maka kemungkinan akan dapat menampung separuh dari kapasitas normal.

Dikatakan Aris, RSD Wisma Atlet memang digunakan untuk mengantisipasi adanya kenaikan jumlah penderita Covid-19.

Terkait Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengoperasikan juga perlu persiapan. Untuk satu menara jumlah SDM yang diperlukan sangat beragam tergantung apakah di dalam tower tersebut juga akan menampung pasien-pasien dengan penyakit bawaan atau pasien-pasien rujukan RS lain.

"Pelaksana bermacam-macam, mulai dari tim kesehatan, dokter, pengamanan, dapur, masak. Tergantung dan lebih kurang 600 orang. Semakin banyak yang positif, pelayanan semakin mandiri, dilayani betul-betul. Kalau hanya positif isolasi mandiri saja tidak terlalu repot. Tapi Kalau punya penyakit bawaan, rujukan, harus ditangani secara perorangan," ungkapnya.

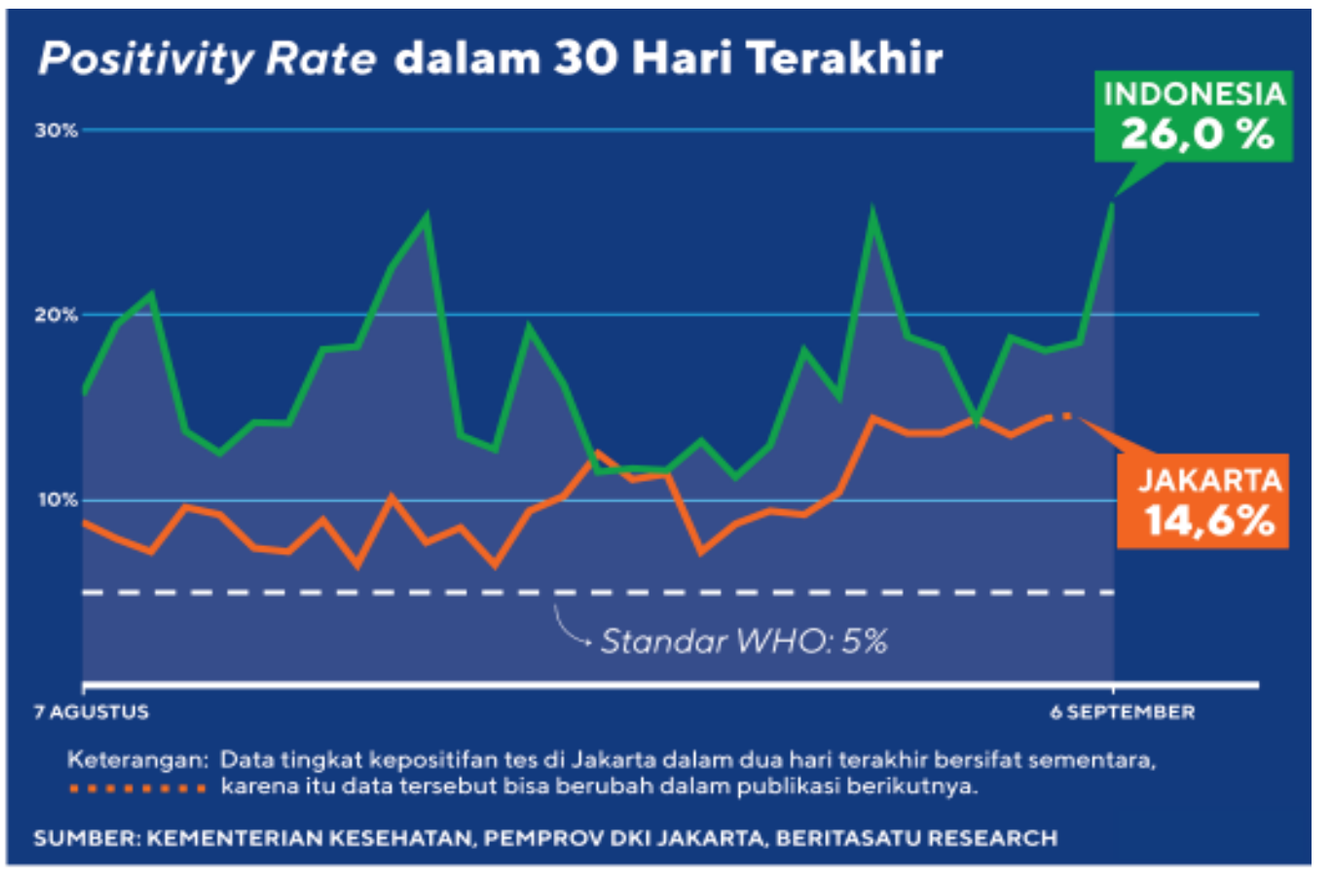
Selama ini di RSD Wisma Atlet sendiri telah mengoperasikan empat tower. Yakni tower 1, 3, 6 dan 7. Tercatat sedikitnya 247 petugas di RS Darurat Wisma Atlet, baik dokter, paramedis dan juga non paramedis. Wisma Atlet Kemayoran telah beroperasi sejak 23 Maret 2020 ini untuk menangani pasien positif Covid-19 dalam kondisi sakit ringan. Hal ini dilakukan agar rumah sakit rujukan Covid-19 bisa fokus untuk menangani pasien Covid-19 yang kondisinya sakit berat.

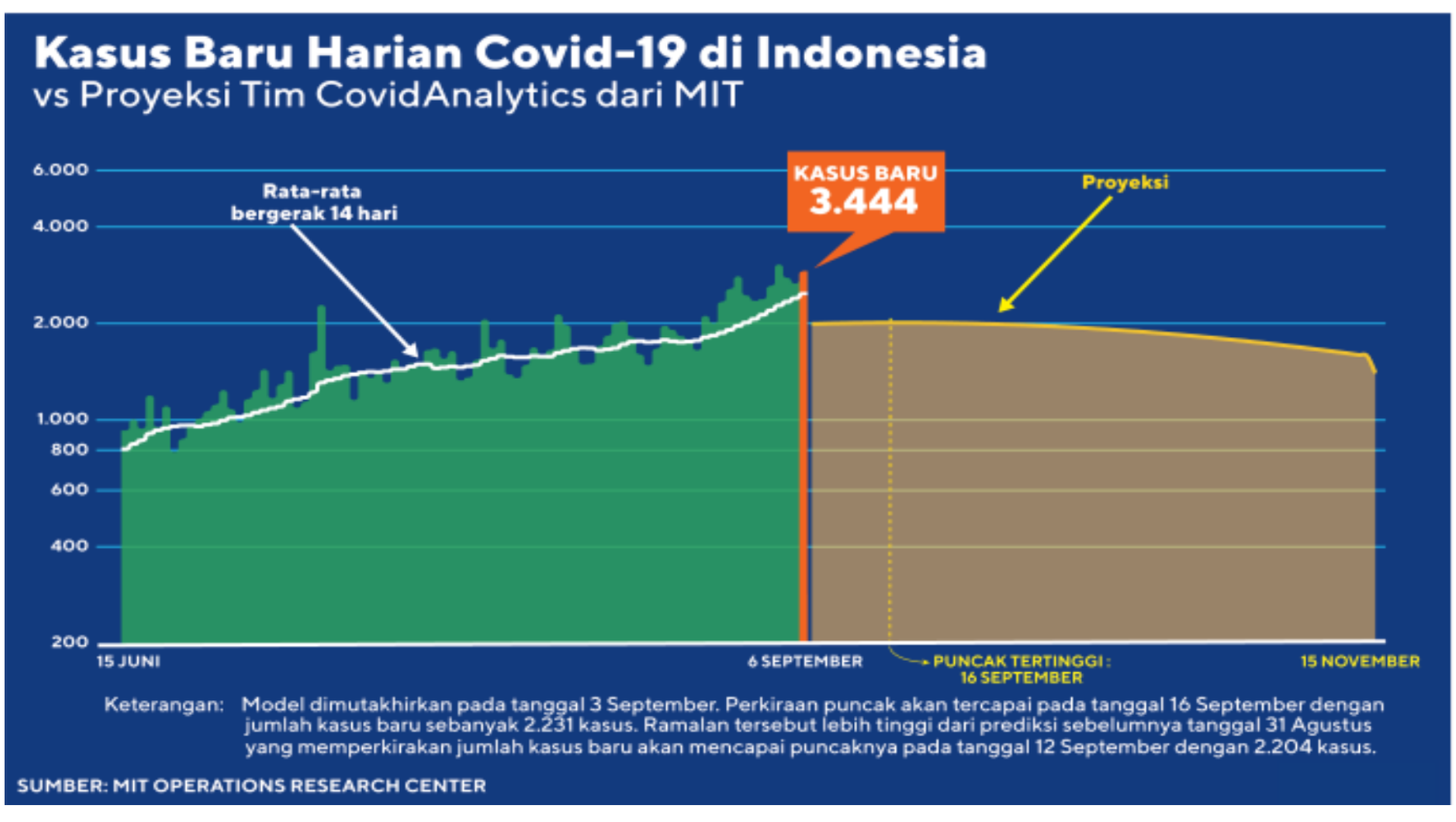
Data hingga Minggu (6/9), RS Darurat Wisma Atlet merawat rawat inap 1.623 pasien termasuk 4 orang suspect. Sejak 23 Maret terdapat total 13.660 pasien yang terdaftar masuk dan 11.807 di antaranya keluar karena sembuh (11.541), dirujuk ke RS lain (261), meninggal (4), kabur (1).

Stefanus Doni menyebutkan nantinya di Tower 5 akan ada sebanyak 400 petugas gabungan untuk melayani pasien yang menjalani masa isolasi mandiri. "Jadi total ke depannya sudah ada 4 menara yang digunakan yakni Tower 4, 5, 6, dan 7. Tower 4 dan 5 kapasitasnya masing-masing 2.400 bed, sedangkan untuk Tower 6 dan 7 meski memiliki kapasitas sama dengan 4 dan 5 tapi jumlah pasien yang ditampungnya lebih sedikit karena tergantung tingkat atau jenis penyakit yang diderita pasien," katanya.
[Y-7/H-14/C-7]

Covid-19 dalam Grafik









SP

Memihak Kebenaran

Pemimpin Umum: Sinyo H Sarundajang (Nonaktif)

Wakil Pemimpin Umum: Randolph Latumahina

Direktur Pemberitaan: Primus Dorimulu

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: ME Aditya Laksmana Yudha

Editor at Large: John Riady

Tajuk Rencana

Berebut Banpres Produktif

Bantuan yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada pelaku usaha mikro disambut dengan gembira oleh masyarakat. Warga berebut untuk bisa mendapatkan bantuan presiden (banpres) sebesar Rp 2,4 juta tersebut. Tanpa sosialisasi dan syarat yang jelas, program ini berpotensi menimbulkan konflik di tengah masyarakat yang membutuhkan bantuan sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

Potensi konflik itu mulai tampak dari jumlah warga yang mendaftarkan untuk bisa mendapatkan bantuan ini terus bertambah dan melebihi jumlah yang telah ditargetkan pemerintah. Berbagai isu pun beredar di masyarakat terkait program ini, terutama terkait dengan proses pengajuan usaha mikro yang memang harus didaftarkan oleh dinas koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (KUMKM) di daerah.

Program bantuan dengan nama Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro ini mulai berjalan 17 Agustus lalu hingga 31 Desember mendatang. Program ini disebut sebagai salah satu strategi pemerintah untuk membantu usaha mikro agar dapat bertahan di tengah pandemi Covid-19. Ditargetkan 12 juta pelaku usaha mikro diikutkan dalam program ini dan masing-masing mendapatkan dana sebesar Rp 2,4 juta, sehingga total dana yang diperlukan mencapai Rp 28,8 triliun.

Namun, pemerintah berencana menambah jumlah peserta menjadi 15 juta pelaku usaha mikro. Penambahan itu dilakukan karena peminat program ini terus meningkat, bahkan data terakhir menyebutkan sudah ada sekitar 20 juta pelaku usaha yang didaftarkan untuk mengikuti program ini.

> **Konflik biasanya terjadi karena program bantuan tidak tepat sasaran. Banyak warga yang seharusnya menjadi peserta program malah tidak mendapatkan bantuan.**

Sejumlah persyaratan umum harus terpenuhi untuk bisa mendapatkan Banpres Produktif ini. Syarat itu adalah WNI; mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK); memiliki usaha mikro; bukan ASN, TNI/Polri serta pegawai BUMN/BUMD; tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR; dan bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP dan domisili usaha yang berbeda dapat melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU).

Kemudian, untuk mendapatkan Banpres ini, calon penerima bantuan harus diusulkan oleh lembaga pengusul, yakni dinas yang membidangi koperasi dan UMKM; koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum; kementerian atau lembaga; perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki mengatakan, program ini digunakan untuk meningkatkan usaha produktif agar bisa lebih berkembang dan dapat meningkatkan perekonomian. Dana yang diterima tersebut bisa menambah modal awal untuk ditingkatkan mengajukan kredit usaha rakyat (KUR) super mikro di bawah Rp 10 juta dengan bunga 0%.

Kita mengapresiasi langkah pemerintah memberikan bantuan kepada warga terdampak pandemi Covid-19 ini. Banpres Produktif ini akan menambah jumlah program-program bantuan yang dikucurkan pemerintah sejak pandemi berlangsung. Tentu kita berharap masyarakat benar-benar memanfaatkan program ini untuk bisa keluar dari kesulitan ekonomi selama ini.

Di sisi lain, kita berharap pemerintah segera mengantisipasi potensi konflik di tengah masyarakat. Potensi konflik itu sebenarnya sama dengan ketika pemerintah menyalurkan program bantuan sembako dan bantuan langsung tunai (BLT) pada awal pandemi.

Konflik biasanya terjadi karena program bantuan tidak tepat sasaran. Banyak warga yang seharusnya menjadi peserta program malah tidak mendapatkan bantuan. Sebaliknya, warga yang tidak memenuhi syarat malah diikutkan dalam program ini. Apalagi, program bantuan tunai seperti ini pasti disambut antusias warga dan peminatnya membeludak.

Untuk itu, kita berharap agar pemerintah terus menambah jumlah penerima bantuan program Banpres Produktif ini. Semakin banyak warga yang terjangkau bantuan tentu semakin baik. Peran pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan UMKM sangat penting.

Pemda bisa melibatkan kelurahan, bahkan pengurus RT dan RW untuk mendata pelaku usaha mikro di daerah masing-masing untuk meminimalisasi terjadinya salah sasaran.

Masyarakat juga diharapkan tidak melakukan kecurangan data sekadar untuk mendapatkan dana bantuan ini. Sementara, pelaku usaha mikro yang mendapatkan bantuan benar-benar memanfaatkan program ini sebagai modal untuk meningkatkan usaha dan pendapatan.

Tulisan opini panjang 900 kata disertai riwayat hidup singkat, foto kopi NPWP, foto diri penulis dikirim ke opini@suarapembaruan.com. Bila setelah dua minggu tidak ada pemberitahuan dari redaksi, penulis berhak mengirim ke media lain.



Evaluasi Presidensi Indonesia di Dewan Keamanan PBB



Fitriani

Indonesia baru saja menyelesaikan tugasnya sebagai Presiden Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk bulan Agustus, dan akan terus duduk di organ ini hingga akhir tahun. Menduduki kursi sebagai anggota DK PBB adalah bukan hal yang asing bagi Indonesia. Sebelum periode dua tahun belakangan ini, Indonesia telah beberapa kali terpilih sebagai anggota non-permanen DK PBB, yakni pada tahun 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008.

Terdapat konsistensi periodik sebelas tahunan bagi Indonesia untuk duduk di organ yang sangat berpengaruh di PBB. Tulisan ini mengkaji makna posisi Indonesia di DK PBB, pencapaiannya di periode ini, dan isu apa yang dapat diangkat jika ingin kembali ikut dalam pemilihan menjadi anggota tidak tetap di masa mendatang.

Makna Keanggotaan

Indonesia memiliki komitmen kuat untuk terlibat di PBB sebagai pengejawantahan dari amanat UUD 1945 yang menginginkan peranan aktif dalam penciptaan perdamaian dunia. Doktrin politik luar negeri bebas aktif yang dimiliki Indonesia juga masih sangat relevan dalam menghadapi kontestasi kekuatan Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok yang meruncing. Doktrin tersebut menjadi modal bagi Indonesia untuk berperan sebagai jembatan yang menengahi pertentangan negara adidaya, sehingga bisa menjadi contoh bagi negara lain di PBB dalam bermanuver mencapai konsensus.

Secara spesifik, menjadi bagian dari DK PBB adalah capaian yang signifikan bagi Indonesia. Sebab, organ ini bertugas memastikan terjaganya perdamaian dunia dengan kemampuannya mengeluarkan resolusi yang mengikat dan melakukan intervensi, antara lain melalui pengiriman misi perdamaian ataupun pemberian sanksi dan embargo.

Saat ini, pandemi Covid-19 memperburuk kondisi dunia terutama di wilayah konflik karena banyaknya negara yang mengurangi interaksi dan bantuan luar negeri. Oleh karena itu, Indonesia dapat mendorong DK PBB berperan lebih besar dalam memberi bantuan keamanan untuk tata kelola kesehatan dan penanganan krisis. Hadirnya Indonesia di DK PBB memastikan bahwa penanganan pandemi dilakukan dengan memperhatikan nasib negara-negara kecil dan berkembang yang memiliki sumber daya terbatas.

Capaian Indonesia

Saat duduk di Presidensi DK PBB sebelumnya pada Mei 2019, Indonesia mampu menyelenggarakan dua debat terbuka mengenai kapasitas misi penjaga perdamaian PBB dan perlindungan warga sipil di ranah konflik. Indonesia juga mengadakan pembahasan informal (*Arria Formula*) mengenai isu Palestina, yang meskipun mendapatkan kritik keras dari Amerika Serikat, negara tersebut tetap ikut serta. Tidak hanya itu, promosi kebudayaan dan kerja-kerja perdamaian Indonesia juga mampu ditampilkan di DK PBB melalui diplomasi batik, pameran foto Kontingen Garuda, serta pertunjukan budaya.

Pada tahun ini, Presidensi Indonesia di DK PBB melaksanakan 50 kegiatan, baik secara virtual maupun pertemuan tatap muka, serta melakukan diplomasi tenun. Dua pertemuan tingkat tinggi dipimpin Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, yakni debat terbuka mengenai pembangunan perdamaian dalam masa pandemi dan kaitan antara terorisme dengan kejahatan terorganisir. Selain itu, Indonesia memimpin forum *Arria Formula* mengenai serangan siber terhadap infrastruktur utama negara yang berpotensi memantik konflik hingga peperangan.

Mengenai jumlah resolusi yang dihasilkan, presidensi Indonesia tahun lalu dan kini sama-sama melahirkan empat resolusi. Perbedaannya adalah keempat resolusi pada presidensi sebelumnya merupakan perpanjangan mandat dan sanksi yang sudah ada, yakni nisi PBB di Somalia, Irak dan Abyei, serta panel ahli di Sudan Selatan. Sementara tahun ini Indonesia berhasil mengeluarkan tiga resolusi yang bersifat perpanjangan mandat (Lebanon, Somalia dan rezim sanksi Mali) dan mendorong diterimanya resolusi inisiatif Indonesia yakni tentang personel penjaga perdamaian perempuan, yakni Resolusi 2538.

Resolusi 2538 merupakan pencapaian dalam sejarah diplomasi Indonesia karena disponsori oleh seluruh negara anggota DK PBB dan 82 negara lainnya. Tercapainya resolusi tersebut juga merupakan penghargaan atas konsistensi Indonesia mempromosikan pengiriman pasukan perdamaian, terutama pasukan perdamaian perempuan, ke misi PBB.

Tantangan dan Kesempatan

Meskipun sudah banyak capaian di DK PBB, perlu disadari bahwa posisi tawar Indonesia sebagai negara non-permanen masih terbatas. Itu tercermin dari tidak lolosnya satu resolusi inisiatif Indonesia mengenai penuntutan, rehabilitasi, dan reintegrasi teroris yang meski sudah mendapat dukungan dari 14 negara anggota DK lainnya, tidak diterima AS. Draf resolusi tersebut sudah disirkulasi ke seluruh anggota DK PBB dan sudah mengikutsertakan masukan AS dan Rusia dalam revisinya, namun AS tetap menggunakan hak veto.

Ada beberapa ahli yang melihat bahwa veto AS ini adalah upaya balas dendam bagi Indonesia yang pada pertengahan Agustus 2020 tidak mendukung inisiatif resolusinya untuk memperpanjang embargo terhadap Iran. Sebelumnya, pada tahun 2008, Indonesia juga memilih abstain dalam voting resolusi DK PBB atas Iran.

Namun lebih jauh dari itu, terdapat dua pembelajaran yang bisa diambil dari veto AS. *Pertama*, periodisasi singkat dua tahun bagi anggota non-permanen di DK PBB tidak membuat negara adidaya memikirkan negosiasi jangka panjang dalam upaya diplomasinya. *Kedua*, terdapat ketidakadilan inheren dalam sistem DK PBB yang membuat pemain diuntungkan, yakni lima anggota permanen, menggunakan hak vetonya untuk menghambat kemajuan nyata dalam penciptaan perdamaian. Menyadari kondisi tersebut, penting bagi Indonesia untuk menuntut perubahan mendasar dalam mekanisme DK PBB.

Ada kesempatan mendorong reformasi DK PBB untuk memberi peran lebih besar bagi negara non-permanen. Isu reformasi DK PBB merupakan perjuangan yang bisa dipindahtangankan pada negara non-permanen lainnya yang akan duduk di DK PBB untuk memperbaiki cara kerja organ ini.

Selain itu, masih ada kesempatan empat bulan bagi Indonesia untuk merampungkan keanggotannya di DK PBB secara mumpuni. Meski AS mengeluarkan vetonya, Indonesia harus terus berperan mendorong konsensus di tengah pertarungan pengaruh negara besar melalui diplomasi senyap (*quite diplomacy*). Pada saatnya nanti, negara-negara lain akan menilai baik bila Indonesia tetap berpegang pada prinsip perdamaian dan bukan kalkulasi untung rugi jangka pendek.

Penulis adalah
Peneliti Departemen Hubungan Internasional, CSIS,
dosen Hubungan Internasional UI

> **Penting bagi Indonesia untuk menuntut perubahan mendasar dalam mekanisme DK PBB.**

Harian Umum
SUARA PEMBARUAN
Mulai terbit 4 Februari 1987 sebagai kelanjutan dari harian umum sore SINAR HARAPAN yang terbit pertama 27 April 1961.

Penerbit: PT Media Interaksi Utama
SK Menpen RI Nomor 224/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1987
Presiden Direktur: Theo L Sambuaga, **Direktur:** Randolph Latumahina, Drs Lukman Djaja MBA
Alamat Redaksi: BeritaSatu Plaza, lantai 11
Jl Jend Gatot Subroto Kav 35-36 Jakarta-12950, Telepon (021) 2995 7500, Fax (021) 5277 981
BERITA SATU MEDIA HOLDINGS: Chief Executive Officer: Nicky Hogan, **Chief Operating Officer:** Anthony Wonsono,
News Director: Primus Dorimulu, **Finance Director:** Lukman Djaja, **Editor at Large:** John Riady.

Dewan Redaksi: Theo L Sambuaga (Ketua), Markus Parmadi, Sinyo H Sarundajang, Baktinendra Prawiro MSc, Ir Jonathan L Parapak MSc, Didik J Rachbini, Samuel Tahir, **Penasihat Senior:** Samuel Tahir, **Redaktur Pelaksana:** Dwi Argo Santosa, **Asisten Redaktur Pelaksana:** Anselmus Bata, Asni Ovier Dengen Paluin, **Redaktur:** Alexander Madji, Bernadus Wijayaka, Irawati Diah Astuti, Siprianus Edi Hardum, Surya Lesmana, Unggul Wirawan, Willy Masaharu Indracahya, **Asisten Redaktur:** Elvira Anna Siahaan, Carlos KY Paath, Heri S Soba, Jeis Montesori, Jeany A Aipassa, Yuliantino Situmorang, **Staf Redaksi:** Advento Chistian Saudale, Ari Supriyanti Rikin, Bayu Marhaenjati, Carlos KY Paath, Carlos Roy Fajarta, Chairul Fikri, Dina Fitri Anisa, Dina Manafe, Erwin C Sihombing, Fana FS Putra, Farouk Arnaz, Gardi Gazarin, Hendro D Situmorang, Herman, Hotman Siregar, Joanito De Saojoao, Lenny Tristia Tambun, Lona Olavia, Maria Fatima Bona, Markus Junianto Sihaloho, Natasia Christy Wahyuni, Robertus Wardi, Ruht Semiono, Yeremia Sukoyo, Yustinus Paat, Adi Marsiela (Bandung), Fuska Sani Evani (Yogyakarta), I Nyoman Mardika (Denpasar), Laurensius Dami (Serang), Arnold H Sianturi (Medan), John Dafril Lory (Palu), Mikael Niman (Bekasi), Radesman Saragih (Jambi), Robert Isidorus Vanwi (Papua), Stefy Thenu (Semarang), Usmin (Bengkulu), **Kepala Sekretariat Redaksi:** Rully Satriadi, **Koordinator Tata Letak:** Rommy Likumahwa, **Koordinator Grafis:** Antonius Budi Nurcahyo.

Advertising: General Manager: Djemmy Piether, **Senior Manager:** Benediktus Utoro, Arlan Darmawan,
Marcomm & Event Management: General Manager: Sari Oetomo, **Manager:** Herry Wardiyanto, **Event Officer:** Budiman Mulyadi,
Circulation: Amson Nainggolan, **Finance:** Anna Gertruida, **Alamat Iklan:** BeritaSatu Plaza, lantai 9, Jl Jend Gatot Subroto Kav 35-36 Jakarta-12950,
Rekening: Bank Mandiri Cabang Jakarta Kota, Rek Giro: A/C.115.008600.2559, BCA Cabang Plaza Sentral Rek. Giro No. 441.30.40.755 (iklan), BCA Cabang Plaza Sentral Rek. Giro No. 441.30.40.747 (Sirkulasi),
Harga Langganan: Rp 75.000/ bulan, Terbit 6 kali seminggu. Luar Kota Per Pos minimum langganan 3 bulan bayar di muka ditambah ongkos kirim.
Alamat Sirkulasi: Hotel Aryaduta Semanggi, Tower A First Floor, Jl Garnisun Dalam No. 8 Karet Semanggi, Jakarta 12930, Telp: 29957555 - 29957500 ext 3206 **Percetakan:** PT Gramedia

http://www.suarapembaruan.com e-mail: koransp@suarapembaruan.com

Wartawan Suara Pembaruan dilengkapi dengan identitas diri.
Wartawan Suara Pembaruan tidak diperkenankan menerima pemberian dalam bentuk apa pun dalam hubungan pemberitaan.

Penyerapan Baru 7%

Anggaran Subsidi Bunga UMKM Lebih Baik Dialihkan ke Banpres Produktif

[JAKARTA] Subsidi bunga untuk kredit atau pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan penyerapan anggaran yang rendah.

Dianggarkan Rp 35 triliun, yang terserap hingga 4 September 2020 baru sekitar Rp 3 triliun atau 7,20%. Pemerintah juga sudah mengakui telah salah membuat perhitungan, di mana anggaran yang dialokasikan terlalu besar untuk program tersebut. Karenanya, anggaran subsidi bunga yang diproyeksikan tidak akan terserap 100% akan dialokasikan untuk program-program lain.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, menyampaikan, anggaran subsidi bunga yang tidak terserap harus segera dialokasikan untuk program lain, namun tetap dalam ruang lingkup membantu UMKM. Misalnya saja perluasan program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro.

Menurut Bhima, penyaluran subsidi bunga kredit UMKM menjadi tidak optimal karena beberapa sebab, antara lain lantaran bank penyalur banyak yang menahan diri untuk memberikan keringanan bunga.

"Perbankan khawatir adanya *moral hazard*. Jadi ketika program ini selesai, lalu UMKM harus membayar bunga kredit secara rutin lagi, dikhawatirkan tingkat kepatuhan membayar dari para debitur atau UMKM ini justru menurun. Sebelum ada pandemi Covid-19 pun UMKM dipandang risikonya paling tinggi, sehingga bank sangat membatasi diri untuk masuk ke segmen kredit UMKM. Apalagi di masa pandemi ini yang membuat bank semakin ekstra hati-hati," kata Bhima Yudhistira kepada *SP*, Minggu (6/9).

Di sisi lain, bank juga harus sangat selektif dalam memberikan subsidi bunga kredit agar tidak sampai salah sasaran. "Proses verifikasi ini membutuhkan waktu yang lama," kata Bhima.

Karenanya, menurut Bhima lebih baik anggaran subsidi bunga tersebut segera dialihkan untuk memperluas penerima Banpres Produktif Usaha Mikro. Dengan alokasi anggaran Rp 22 triliun, program Banpres produktif pada tahap awal ini baru menyasar 9,1 juta pelaku usaha mikro, di mana masing-masing mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 2,4 juta.

"Kalau anggaran subsidi bunga mau dialihkan ke program lainnya yang masih dalam konteks UMKM, paling tepat ya untuk memperluas penerima Bantuan Produktif. Sebab selama mekanismenya masih melalui perbankan dalam bentuk pemberian subsidi bunga apapun, bank pasti akan berpikir dua kali atau sangat hati-hati. Jadi kalau bisa memang langsung diberikan kepada penerima akhirnya," ujar Bhima.

Bhima juga berharap agar pengawasan program Banpres Produktif bisa diperketat, sehingga uang yang diberikan benar-benar digunakan oleh pelaku usaha mikro untuk usaha, bukan yang sifatnya konsumtif.

Subsidi Upah

Program lainnya yang menurut Bhima masih perlu diperluas adalah subsidi gaji/upah bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta.

Bantuan tersebut saat ini hanya diberikan untuk pekerja peserta program BPJS Ketenagakerjaan. Padahal banyak bekerja non formal yang juga terdampak Covid-19 dan layak mendapatkan bantuan, namun bukan merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan.

"Untuk perluasan program subsidi upah, ini jangan mengutak-atik anggaran dari program yang membantu UMKM. Tetapi bisa memakai anggaran yang tidak terpakai dari program lain seperti pembiayaan korporasi," ujar Bhima.

Untuk menentukan penerima bantuan upah dari segmen pekerja non formal ini, menurut Bhima pemerintah juga bisa menggunakan data karyawan dari pelaku usaha penerima program relaksasi kredit maupun Banpres Produktif.

"Solusinya dengan menggabungkan antara data bantuan untuk UMKM, misalnya relaksasi kredit UMKM maupun bantuan produktif. Di situ kan tertera berapa UMKM-nya dan berapa karyawannya. Sebelumnya kan pelaku usaha atau UMKM-nya sudah dapat (bantuan), nah karyawan mereka yang merupakan pekerja non-formal ini juga harus dapat bantuan subsidi upah," kata Bhima.

Sebelumnya, Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional sekaligus Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin mengakui pemerintah kurang tepat menghitung anggaran untuk subsidi bunga UMKM. Alhasil, anggaran yang dialokasikan Rp 35 triliun baru terserap sebesar Rp 3 triliun.

Padahal menurut Budi, nilai Rp 3 triliun tersebut sudah dilakukan oleh perbankan untuk menyalurkan kredit yang cukup besar kepada lebih dari 7,8 juta UMKM dengan total pinjaman Rp 322 triliun.

"Memang kita lihat kurang tepat kita menghitungnya di awal. Pagunya itu terlampau besar. Jadi realisasi penyerapannya kecil sekali. Hitung-hitungan kami mungkin sampai akhir tahun (yang terserap) hanya Rp 8 triliun sampai Rp 10 triliun," kata Budi Gunadi, akhir pekan ini. [HER/E-8]

Digitalisasi Tingkatkan Keuntungan Perusahaan 5%

[JAKARTA] Perusahaan harus mengikuti tren teknologi yang saat ini sedang berkembang seperti big data *analytics, cloud logistics, internet of things*, serta *robotics and automation*. Selain itu, perusahaan juga harus memperhatikan perkembangan sosial dan bisnis seperti *omni channel logistics, digital work,* dan *logistics marketplaces*.

Serta, penerapan teknologi blockchain yang dilakukan dengan pencatatan transaksi, pelacakan aset, serta pembentukan sistem yang transparan dan efisien dalam mengelola semua dokumen yang terlibat dalam proses logistik untuk memecahkan silo proses yang terfragmentasi.

Pasalnya, otomatisasi proses secara umum diklaim Chairman Supply Chain Indonesia Setijadi, dapat meningkatkan efisiensi biaya yang relevan hingga 20%. Sementara, dalam pengelolaan aset perusahaan, digitalisasi dapat berdampak terhadap peningkatan margin atau keuntungan sekitar 5%.

Apresiasi

Pihaknya pun mengapresiasi kolaborasi antara PT Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) dan PT Unilever Indonesia Tbk dalam pemanfaatan teknologi informasi dengan menerapkan *Application Programming Interface* (API) Connection. Kerja sama perusahaan manufaktur dan pelayaran itu menghubungkan sistem dari kedua perusahaan itu untuk mempercepat pengiriman barang.

"Kerja sama itu merupakan salah salah bentuk penerapan digitalisasi yang sudah harus diterapkan untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas operasionalnya. Penerapan teknologi informasi itu meningkatkan kinerja penyedia jasa logistik. Selain itu, hal ini akan berdampak terhadap kinerja pengguna jasa logistik yang akan mempengaruhi daya saingnya," ujarnya, dalam siaran pers, Minggu (6/9).

Sistem informasi seperti yang dibangun SPIL dan Unilever secara nasional, dikatakannya akan mempengaruhi kinerja pelacakan yang merupakan salah satu dari enam dimensi dalam Logistics Performance Index (LPI) yang menunjukkan kinerja international gateways dan konektivitas dalam negeri.

LPI terakhir (2018) menunjukkan untuk dimensi itu, Indonesia berada pada peringkat 39 dari 167 negara dengan skor 3,30. Di antara negara-negara Asean, posisi Indonesia di bawah Singapore (skor 4,08), Thailand (3,47), Vietnam (3,45), dan Malaysia (3,15). Posisi Indonesia di atas Philippines (3,06), Laos (2,91), Cambodia (2,52), dan Myanmar (2,20). [O-2]

Mentan Pastikan Stok Pupuk Subsidi Aman

[JAKARTA] Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin memastikan ketersediaan pupuk subsidi di kawasan pertanian Pantura, Jawa Barat, dalam keadaan aman. Kepastian itu didapatkan usai melakukan inspeksi dadakan (Sidak) di gudang pupuk PT Petrokimia dan PT Pupuk Kujang Lini III di kawasan Pantura, akhir pekan ini.

"Saya memastikan ketersedian stok aman. Pendistribusian pupuk harus benar-benar untuk petani yang memiliki lahan di bawah 2 hektar, jangan sampai salah sasaran," ujar Syahrul keterangan tertulisnya, Minggu (6/9).

Syahrul menegaskan, ketersediaan dan kesiapan pupuk cukup baik. Sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo, pengecekan harus terus dilakukan, sehingga ketersediaan pupuk, kesiapan pupuk dan ketepatan distribusi serta penerima subsidi pupuk dapat terjaga.

Ia menambahkan, pemberian subsidi pupuk harus sebanding dengan peningkatan hasil produksi.

Dalam tiga bulan terakhir, distribusi pupuk diawasi dengan ketat sehingga produktivitas yang dibutuhkan dapat tercapai.

"Musim tanam kesatu dengan 7,4 juta ton hektar, pupuknya sudah aman dan hasilnya produktivitas aman. Kita berharap musim tanam kedua atau musim tanam kering ini seluas 5,8 juta ton hektar dapat mendapatkan pemupukan yang baik, sehingga produktivitasnya juga dapat meningkat," tuturnya.

Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian, Sarwo Edhy, mengatakan, guna mensukseskan upaya peningkatan produksi dan kesejahteraan petani, penambahan alokasi subsidi pupuk akan direncanakan mencapai volume 1 juta ton, dan menelan anggaran sekitar Rp 3,14 triliun. Dengan penambahan itu, diharapkan bisa memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi yang kurang di sejumlah wilayah Indonesia. [HER/E-8]



DOK KEMTAN

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di gudang pupuk PT Petrokimia dan PT Pupuk Kujang Lini III yang berada di kawasan pertanian Pantura Jawa Barat, Indramayu, Sabtu (5/9).

Dongkrak Pertumbuhan KPR



SP/RUHT SEMIONO

Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan perumahan di Tangerang, Minggu (6/9). Sejumlah perbankan gencar menawarkan bunga promo khusus kredit rumah selama pandemi ini. Tujuannya, untuk mendongkrak pertumbuhan KPR. Salahsatunya mendapatkan bunga rendah fixed selama tiga tahun, serta insentif akan dicairkan apabila referensi berhasil dibukukan.

Menhub Dorong Perguruan Tinggi Kembangkan Kendaraan Otonom

[JAKARTA] Kendaraan otonom (*Autonomous Vehicle*) atau kendaraan tanpa pengemudi dalam beberapa tahun ke depan diprediksi akan menggungguli kendaraan konvensional saat ini. Karenanya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendorong perguruan tinggi untuk terus melakukan penelitian dan pengembangan kendaraan otonom. Apalagi Pemerintah telah memiliki rencana untuk memindahkan Ibu kota Baru Indonesia di Kalimantan Timur yang akan dirancang dengan konsep *smart, green,* dan *sustainable city*.

"Kami melihat bahwa pengembangan kendaraan otonom sangat erat kaitannya dengan konsep ibu kota baru, dan ke depannya kami jadikan ini sebagai dasar membangun sistem transportasinya. Ini merupakan wajah baru transportasi Indonesia," kata Budi Karya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (6/9).

Menurut Budi, kendaraan otonom memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan kendaraan konvensional. Mengutip penelitian dari McKinsey Global Institute dan TU Delf research in electric and automated transport 2019, Menhub mengatakan bahwa kendaraan otonom dapat mengurangi emisi karbon dan kemacetan, mengurangi konsumsi bahan bakar hingga 15% dan juga menurunkan tingkat kecelakaan di jalan raya hingga 40% karena pengurangan *human error*, serta memiliki kepastian dan ketepatan waktu.

Menhub menuturkan, sejak tahun 2017, Indonesia sudah menerapkan konsep transportasi publik menggunakan kendaraan otonom, yaitu Kalayang Sky Train di Bandara Soekarno Hatta. Kereta ini dapat digunakan oleh pengguna jasa bandara untuk melakukan perpindahan antar ketiga terminal penumpang di Bandara. "Kendaraan Otonom seperti Automatic Rail Transport dapat menjadi moda transportasi pilihan bagi ibu kota baru karena aman, andal, dan sangat tepat waktu," ungkap Budi. [HER/E-8]

Disabilitas Bukan Halangan Jadi Wirausaha

[JAKARTA] Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menegaskan, penyandang disabilitas bukanlah halangan bagi seseorang untuk maju dan berkembang menjadi wirausaha.

"Kita semua adalah sama. Saya malah bangga jika penyandang disabilitas bisa mandiri dan menjadi seorang wirausaha. Kami di Kementrian Koperasi dan UKM siap membantu antara lain melalui dukungan pelatihan ketrampilan, model bisnis, pembiayaan, digitalisasi pasar maupun lainnya," ujar Menkop dan UKM usai penutupan Program Wirausaha Berbasis Kuliner Sahabat Tuli yang diselenggarakan Perempuan Tangguh Indonesia (PTI), di Jakarta, Sabtu (5/9).

"Saya terharu dan memberikan dukungan pada teman-teman Sahabat Tuli untuk menjadi entrepreneur dan akan saya siapkan modal untuk itu. Kita semua adalah sama, disabilitas bukanlah halangan bagi seseorang untuk bisa maju dan berusaha, apalagi dijaman sekarang kita bisa memanfaatkan IT dan sarana pendukung lainnya," janji Teten.

Seorang peserta pelatihan, Ali (23) penyandang disabilitas tuna rungu mengaku senang mendapatkan pelatihan membuat *bakery,* rencananya ia akan berwirausaha setelah mendapatkan ketrampilan membuat kue. "Saya seorang barista (peracik kopi) dan pintar membuat sambel. Kursus membuat *bakery* ini sangat bagus untuk melengkapi cita-cita saya mendirikan cafe yang dilengkapi kue atau *bakery* sebagai pelengkap, namun saya terkendala modal untuk membuka usaha," ujar Ali.

Teten memberikan apresiasi kepada Perempuan Tangguh Indonesia (PTI) sebagai yayasan yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan, pendidikan, pembangunan, dan penguatan ekonomi kerakyatan melalui UMKM. "Pemerintah sadar, tak bisa sendirian dalam mengembangkan UMKM, karena itu peran swasta maupun komunitas seperti PTI ini sangatlah membantu dalam membantu UMKM," kata Teten.

Ketua Umum PTI, Myra Winarko, menyebutkan bahwa Perempuan Tangguh Indonesia merupakan gerakan masif perempuan dalam membantu pemerintah mengatasi dampak Covid-19.

"Kami telah melakukan berbagai fase, dari mulai membagikan sembako, membangun dapur-dapur umum, mensupport APD bagi tenaga medis di ratusan rumah sakit dan puskesmas, hingga membangun kerjasama dengan UKM-UKM. Sekarang, kita ada pada fase pemulihan ekonomi, dan kami memiliki program untuk pemulihan ekonomi pada kelompok masyarakat paling rentan seperti penyandang cacat, nelayan, dan petani. Dana yang digalang tidak diberikan untuk keperluan konsumtif, tetapi diupayakan untuk memulai kembali usaha-usaha yang bisa *sustainable*," tambahnya. [E-8]

Exceptional High End Properties for Sale

- Charming Manor Estate (Tarn, France): www.domainedebelfortes.com
- Colonial Style Beach-Front Villa Complex (Bali): www.bonianbali.com
- Island Property (South Sumatra, Indonesia): www.pulaupuhawang.com

For full details please visit our above websites or e-mail: jos.spartz@gmail.com

Langkah Tepat, Pemerintah Belum Bahas Perppu Reformasi Keuangan

[JAKARTA] Langkah pemerintah yang belum membahas inisiatif DPR terkait Rancangan Undang-undang (RUU) Perubahan UU Bank Indonesia (BI) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Reformasi Keuangan dinilai sebagai hal yang tepat. Apalagi, dalam kondisi ekonomi yang dihantam keras pandemi Covid-19.

"Bukan hanya belum membahas. Sebaiknya pemerintah menolak pembahasan revisi UU BI disaat pandemi. Kalau independensi BI dikebiri tentu tidak tepat, bahkan pembahasan setelah pandemi bisa menimbulkan persepsi negatif ke pasar," ujar ekonom Indef Bhima Yudhistira kepada *SP*, Minggu (6/9).

Dia menuturkan, sudah ada lembaga seperti Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang diterbitkan setelah krisis 2008 dan terdiri dari BI, OJK, LPS dan Kementerian Keuangan, sehingga untuk apa dibuat Perppu.

Menurutnya, yang lebih penting saat ini dilakukan pemerintah adalah, *pertama*, meningkatkan koordinasi sehingga stimulus bisa lebih efektif. "Kalau sibuk urus kelembagaan bisa 6-8 tahun baru selesai seperti kasus di negara lain," katanya.

Kedua, lanjut dia, terkait pembentukan satu komando antara BI dan OJK, kalau tidak hati-hati akan mendegradasi independensi BI. Hal ini tentu saja akan berpengaruh pada kepercayaan investor dan dikhawatirkan reformasi kelembagaan bank sentral akan mundur.

"Ini bisa berpengaruh juga pada trust dari investor di pasar keuangan karena ada pelanggaran dari UU BI bahwa lembaga kebijakan moneter adalah independen. Nanti bertentangan dengan pasal 4 ayat 2 UU BI 23/1999," jelasnya.

Founder dan Ekonom Senior Core Indonesia (Center of Reform on Economics) Hendri Saparini menilai, tanpa adanya Perppu ini pun pengawasan sistem keuangan sudah dijalankan oleh KSSK berdasarkan Undang-undang Nomor 9 tahun 2016 yang mengatur tata cara penyelamatan sistem keuangan.

Wewenang Pengawasan

Sementara pemindahan wewenang pengawasan perbankan kembali ke BI juga belum didasari pada alasan yang kuat, jika memang alasan adalah mendorong proses pemulihan ekonomi, maka alasan ini tidak tepat mengingat OJK telah menjalankan perannya dalam membantu proses pemulihan ekonomi. Melalui Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2002 OJK memberikan stimulus bagi perbankan di tengah pandemi seperti sekarang.

"Dengan belum jelasnya latar belakang pembentukan Perppu Reformasi Keuangan, pemerintah, DPR, dan pihak terkait perlu menahan diri untuk tidak terburu-buru meloloskan Perppu ini," katanya.

Di sisi lain, alih-alih menyalahkan otoritas tertentu evaluasi komprehensif perlu dilakukan pemerintah dalam mendorong proses pemulihan ekonomi nasional. Perlu diingat selain sektor keuangan, tanggung jawab pemulihan ekonomi juga berada pada pundak pemerintah dalam bentuk anggaran belanja pemerintah dan juga anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"Terakhir yang tidak kalah penting, pemerintah harus tetap fokus untuk mengurangi penyebaran Covid-19. Sebab, perkembangan kasus baru akan mempengaruhi kepercayaan konsumen, khususnya kelas menengah atas yang menjadi penyumbang terbesar konsumsi rumah tangga. Peningkatan dan penyebaran kasus baru juga akan menghentikan tren optimisme pelaku usaha yang mulai muncul. Langkah lain, program bansos yang cukup besar perlu dipercepat realisasinya untuk menjaga kebutuhan kelompok bawah," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku, pemerintah hingga saat ini belum membahas dua inisiatif DPR tersebut.

"Sampai hari ini pemerintah belum membahas RUU inisiatif DPR tersebut. Penjelasan bapak presiden dalam hal ini posisi pemerintah sangat jelas bahwa kebijakan moneter harus tetap kredibel, efektif, dan independen," ucapnya dalam konferensi pers Reformasi Sektor Keuangan secara virtual, Jumat (4/9). [O-2]

Pemerintah Harus Tetapkan Harga Tertinggi Vaksin Covid-19

[JAKARTA] Dalam penyaluran vaksin Covid-19, pemerintah Indonesia berencana menjalankan dua skema, yaitu diberikan secara gratis dari pemerintah dan secara mandiri atau dilepas ke pasar untuk dibeli masyarakat dengan mekanisme pasar.

Untuk skema kedua tersebut, Ketua Komisi Pengkajian dan Pengembangan Badan Perlindungan Konsumen Indonesia (BPKN) Arief Safari mengatakan pemerintah harus menetapkan patokan harga tertinggi vaksin Covid-19. Hal ini menurutnya sangat penting agar tidak terjadi *price gouging* (upaya dengan sengaja menaikkan harga setinggi-tingginya).

"Apabila pemerintah terpaksa harus melepas vaksin ke pasar untuk dibeli masyarakat dengan mekanisme pasar, bisa berbahaya karena akan menciptakan price gouging yaitu kenaikan harga yang gila-gilaan sebagaimana kejadian pada masker dan *hand sanitizer* di awal-awal pandemi. Tentunya hal ini harus dihindari dengan kebijakan pemerintah melalui penetapan patokan harga tertinggi vaksin tersebut agar tidak terjadi price gouging," kata Arief Safari dalam keterangan tertulisnya, Minggu (6/9).

Mengenai skema pertama di mana pemerintah akan memberikan secara gratis vaksin covid-19 kepada warga yang tidak mampu, Ketua BPKN Rizal E Halim mengatakan rencana tersebut patut diapresiasi, karena telah sesuai dengan amanat undang-undang dan sebagai bukti kehadiran negara. Namun, pemerintah juga harus memastikan efektivitas pemberian vaksin tersebut agar tepat sasaran.

"Pemerintah harus memastikan bahwa vaksin covid-19 yang akan diberikan kepada masyarakat miskin tersebut penyalurannya bisa efektif agar jangan terjadi seperti kasus bantuan sosial sebelumnya, di mana ada beberapa masyarakat yang mampu akhirnya menerima bansos. Data pusat harus diverifikasi terlebih dahulu oleh RT/RW yang memahami kondisi ekonomi warganya," kata Rizal.

Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN Johan juga berharap agar uji coba vaksin covid 19 tetap dalam pengawasan pemerintah dan juga dapat dievaluasi kembali secara berkala dalam kaitan keamanan dan keselamatan konsumen.

"Pemerintah sebelum menjalankan program vaksinasi tersebut, tentu harus memastikan bahwa secara klinis vaksin tersebut efektif dan halal. Selain itu, perlu dibuat kebijakan yang efektif agar penyaluran vaksin gratis bisa menjangkau masyarakat tidak mampu. Kalaupun sebagian dilepas ke pasar agar dibuat patokan harga wajarnya agar tidak membebani masyarakat di tengah kesulitan ekonomi saat ini," pungkas Rizal.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Erick Thohir menjelaskan bahwa akan ada dua skema penyaluran vaksin, yakni gratis dari pemerintah dan yang mandiri

Erick menjelaskan, pemerintah nantinya hanya akan menanggung biaya vaksin gratis bagi sebanyak 93 juta orang masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Jumlah tersebut diperoleh dari data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. [HER/E-8]

Ketersediaan Pupuk Petani



SP/RUHT SEMIONO

Petani menyemprotkan pupuk cair pada tanaman padi di Tangerang, Minggu (6/9). Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjamin ketersediaan pupuk untuk petani. Sektor pertanian saat ini memang menjadi penopang perekonomian selama pandemi karena sektor pertanian yang mampu tumbuh positif, berdasarkan data BPS pada kuartal II PDB Sektor pertanian mencapai 16% dan mampu bertahan ditambah sektor ini banyak menyerap tenaga kerja.

WFH Kemkominfo Diperpanjang Hingga 11 September

[JAKARTA] Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengumumkan perpanjangan kebijakan bekerja dari rumah (*work from home*/WFH) Kantor Pusat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) hingga Jumat (11/9) dan akan beraktivitas kembali pada Senin (14/9).

Kebijakan ini diambil untuk mencegah penyebaran Covid-19. "Sahabatku sekalian, saya sekaligus ingin mengumumkan bahwa penutupan Kantor Pusat Kemkominfo diperpanjang sampai 11 September 2020 dan akan mulai bekerja lagi pada 14 September 2020. Selanjutnya akan kita terus evaluasi keadaannya," ujar Johnny, dalam pesan suaranya kepada jajaran pejabat dan pegawai Kemkominfo, Minggu (6/9).

Sementara waktu, lanjut dia, Menkominfo setiap hari akan tetap berkantor di Rumah Dinas Widya Chandra, Jakarta Selatan, dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat.

Operasionalnya dibantu oleh para staf yang juga sangat disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan Covid-19. Menurut dia, bangsa dan negara memanggil kita semua untuk fokus memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Di satu, kita punya kewajiban agar tetap produktif dan menggerakkan ekonomi digital yang dinamis. Di sisi yang lain, sambil tetap produktif dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, Kemkominfo berusaha agar tetap bisa akseleratif dan produktif dalam melayani masyarakat.

Kebijakan Menkominfo tersebut merupakan perpanjangan dari WFH Kemkominfo yang telah berlangsung selama sepekan. Sebelumnya, pada Jumat (28/8), Menkominfo mengumumkan Kantor Pusat Kemkominfo melaksanakan WFH untuk mencegah penularan Covid-19 dan aktivitas berkantor baru akan kembali dilaksanakan mulai Senin (7/9) besok.

Kala itu, Johnny menyatakan, kebijakan itu diambil menyusul adanya laporan pegawai Kemkominfo yang positif Covid-19. Hingga Jumat (28/8) sore, pukul 16:00 WIB, di lingkungan Kemkominfo, tercatat 30 pegawai positif Covid-19.

Dari jumlah itu, 17 orang telah sembuh dan 13 orang dalam proses penyembuhan. Protokol Kesehatan Dalam pesan suaranya, Menkominfo juga menyampaikan kepada jajaran pejabat hingga staf di lingkungan Kemkomkinfo bahwa kebijakan WFH Kantor Pusat Kemkominfo merupakan upaya mencegah penyebaran Covid-19.

Terapkan Protokol Kesehatan

Karena itu, bagi yang sehat diharapkan untuk menerapkan protokol kesehatan Covid-19 lebih disiplin. Penyebaran Covid-19 tidak boleh dianggap enteng dan hanya bisa diatasi dengan tuntas jika semua pihak mau bergotong-royong untuk mematuhi protokol kesehatan dengan disiplin, yakni 3M, yang bagi sebagian orang mungkin sudah bosan mendengarnya.

Pertama, memakai masker dengan benar setiap keluar rumah yang menutupi area hidung dan mulut. Selain itu, jangan menyentuh bagian luar masker dan menurunkan masker ketika memakainya.

Kedua, mencuci tangan dengan sabun secara teratur sebelum memegang area mata, hidung, dan mulut secara langsung. Hal ini harus dilakukan termasuk ketika hendak mengganti dan memasang masker kembali.

Ketiga, menjaga jarak antara 1,5 meter hingga dua meter dan hindari pula sentuhan ketika berinteraksi dengan orang lain. Yang tak kalah penting, jauhi kerumunan dan tempat ramai yang berpotensi menularkan Covid-19. [ID/E-8]

Kempupera Percepat Program Digitalisasi Rumah Subsidi

[JAKARTA] Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), terus mendorong percepatan program digitalisasi rumah subsidi di Indonesia.

Ketua Umum Dewan Pipinan Pusat Realestate Indonesia (DPP REI), Totok Lusida, menyampaikan apresiasinya terhadap kemajuan teknologi yang diterapkan oleh PPDPP terhadap program rumah subsidi.

"Data digital tidak bisa bohong. Kami sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan PPDPP dan kami akan terus mendorong anggota untuk memasukkan data perumahannya ke dalam aplikasi SiKumbang ini," kata Totok Lusida, seperti dikutip keterangan pers, Minggu (6/9).

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum DPP Himpera, Endang Kawijaya. Selain mengapresiasi PPDPP, Endang juga menyampaikan masukkan agar disiapkan perangkat hukum jika terjadi double booking untuk penjualan perumahan.

"Tentunya, diharapkan agar PPDPP harus lebih memperkuat sistemnya agar terhindar dari gangguan teknis dalam pelaksanaannya," kata Endang Kawijaya.

Sementara itu, GMD Pemasaran Ritel Perumnas, Ari Indrianto menyampaikan, apa yang sudah dilakukan oleh PPDPP merupakan terobosan yang bagus sebagai parameter untuk mengambil keputusan.

"Saya takjub dengan data yang disampaikan PPDPP dan kami menginginkan data ini bisa kami peroleh untuk menjadi bahan pertimbangan ke depan," ungkapnya.

Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin, mengatakan, PPDPP meminta kepada asosiasi pengembang untuk melakukan monitoring anggotanya agar selalu menjaga kualitas rumah dan berlomba dalam mengikuti perkembangan digital, untuk peningkatan pengembangan pembiayaan perumahan ke depan.

"Era digital tidak bisa ditinggalkan. Semua asosiasi harus hijrah agar ramah dengan teknologi dan mampu mengikuti perkembangan aplikasi dan menginput semua datanya ke SiKumbang, karena gerbongnya adalah pengembang," ujar Arief Sabaruddin. [B1/E-8]

Harga Kubis Anjlok



ANTARA FOTO/UMARUL FARUQ

Petani memanen sayur kubis di Desa Ngadisari, Probolinggo, Jawa Timur, Sabtu (5/9). Menurut petani setempat, harga sayur kubis di tingkat petani mengalami penurunan dari Rp 4.000 menjadi hanya Rp 300 per kilogram menyusul panen raya di sejumlah wilayah penghasil sayur tersebut.

49% Serangan *Ransomware* di Indonesia Menyasar Sektor Dunia Usaha

[JAKARTA] Serangan program jahat atau *malware* jenis *ransomware* masih menjadi ancaman besar dunia maya di Asia Tenggara, meskipun sudah terjadi tren penurunan. Dari data perusahaan *cyber security* Kaspersky, selama semester I-2020, sebanyak 831.105 percobaan *ransomware* telah diblokir di wilayah Asia Tenggara, di mana 298.892 di antaranya merupakan upaya terhadap pengguna di Indonesia.

Serangan *ransomware* di Indonesia ini memang lebih rendah 69% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu yang mencapai 967.372. Namun hampir setengah (49%) dari upaya yang terdeteksi dari Januari hingga Juni 2020 ditargetkan pada sektor *enterprise* di Indonesia, kemudian diikuti oleh konsumen (39,94%) dan UKM (2,13%). Lima besar *ransomware* yang terdeteksi di Indonesia selama paruh pertama tahun 2020 meliputi Trojan-Ransom.Win32.Wanna; Trojan-Ransom.Win32.Stop; Trojan-Ransom.Win32.Cryak1; Trojan-Ransom.Win32.GandCrypt; dan Trojan-Ransom.Win32.Gen.

"Serangan *ransomware Wannacry* pertama dihadapi Indonesia pada beberapa tahun lalu. Hal itu menunjukkan bahwa bisnis dalam segala bentuk dan ukuran harus mempertimbangkan untuk meningkatkan protokol dan infrastruktur keamanan siber mereka agar tidak menjadi korban ancaman ini," kata Territory Channel Manager untuk Indonesia di Kaspersky, Dony Koesmandarin dalam keterangan tertulisnya, Minggu (6/9).

Menurut Dony, *ransomware* telah menjadi tantangan besar bagi banyak organisasi di dunia termasuk Indonesia, walaupun taktik yang digunakan masih sangat kuno seperti *email phishing, website* yang terinfeksi program berbahaya, atau *software* yang tidak diperbarui.

Agar tidak menjadi korban serangan ransomware, Kaspersky menyarankan selalu membuat cadangan informasi penting secara teratur. Sebaiknya simpanlah banyak salinan di tempat yang berbeda, misalnya di drive fisik yang terisolasi, dan salinan lainnya di cloud. Selain itu, perbarui sistem operasi di seluruh komputer pada jaringan Anda ke versi terbaru secara teratur. Ini akan dengan cepat memperbaiki kerentanan terbaru.

Hal yang tidak kalah penting, karyawan juga harus diedukasi untuk mengikuti aturan keamanan siber sederhana, serta meningkatkan solusi keamanan pihak ketiga. Kaspersky juga mengingatkan untuk jangan pernah membayar uang tebusan, karena tidak menjamin data yang hilang akan kembali. Apabila menjadi korban, segera laporkan ke lembaga penegak hukum setempat. [HER/E-8]

Bandara Soetta Siapkan Fasilitas Khusus bagi Pekerja Migran Indonesia

[JAKARTA] PT Angkasa Pura II (Persero) atau AP II dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyiapkan fasilitas khusus di bandara bagi seluruh pekerja migran Indonesia (PMI).

Pada tahap awal, fasilitas tersebut tersedia Bandara Soekarno-Hatta (Bandara Soetta) yang merupakan titik terbesar untuk keberangkatan dan kepulangan PMI.

Presiden Direktur PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin mengatakan, layanan kepada pekerja migran Indonesia akan semakin baik dengan adanya berbagai fasilitas khusus di Bandara Soetta. "Terdapat lima fasilitas khusus bagi pekerja migran Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta dan kemudian menyusul di bandara-bandara lainnya. Kami berharap dengan fasilitas ini maka pelayanan di bandara bagi pekerja imigran yang merupakan pahlawan devisa bagi Indonesia akan jauh lebih baik," jelasnya dalam siaran pers, Minggu (6/9).

Berikut lima fasilitas khusus yang bagi pekerja migran Indonesia di Bandara Soetta. *Pertama*, jalur khusus. Bandara Soetta segera memiliki jalur khusus bagi pekerja migran Indonesia pada akhir September 2020. Jalur khusus ini antara lain terdapat di konter imigrasi untuk memproses keberangkatan dan kepulangan.

"Umumnya jalur khusus hanya diperuntukkan bagi penumpang *first class/business class*, lalu kru pesawat, kemudian pemegang KITAS, dan pemegang paspor diplomatik. Dalam waktu dekat, Soekarno-Hatta akan menyediakan jalur khusus bagi pekerja migran Indonesia, dan ini menjadi yang pertama di Indonesia bahkan mungkin dunia. Ini sebagai bentuk apresiasi kami kepada para pahlawan devisa," kata Awaluddin.

Kedua, konter *help desk* bagi pekerja migran Indonesia saat ini sudah tersedia di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soetta, tepatnya di area baggage claim. Konter ini khusus untuk membantu seluruh pekerja migran Indonesia ketika kembali pulang ke tanah air. Jika pekerja migran Indonesia merasa kebingungan atau kesulitan ketika tengah berada di bandara, maka personel help desk senantiasa membantu. "Personel help desk khusus pekerja migran Indonesia nantinya bisa saling bersinergi dengan customer service PT Angkasa Pura II sehingga bantuan yang diberikan kepada pekerja migran Indonesia dapat optimal dan maksimal," ujarnya.

Ketiga, lounge khusus bagi pekerja migran Indonesia ditargetkan dapat dibuka di Bandara Soetta pada akhir Oktober 2020. Lounge ini nantinya dapat dipergunakan bagi pekerja migran Indonesia untuk menunggu waktu sebelum memproses keberangkatan, atau menunggu tibanya keluarga untuk menjemput saat pekerja migran kembali ke Tanah Air.

"Salah satu konsep dari lounge ini adalah tempat bertemunya keluarga dengan pekerja migran Indonesia saat kepulangan," jelasnya.

Keempat, media digital untuk sosialisasi. AP II menyediakan lebih dari 300 media digital di seluruh bandara, termasuk di Soekarno-Hatta untuk dipergunakan sebagai media promosi dan sosialisasi berbagai program pelayanan dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia, sehingga program tersebut dapat tepat sasaran dan dimanfaatkan dengan baik.

Kelima, tempat pemasaran produk UMKM dari pekerja migran. Cukup banyak pekerja migran Indonesia yang sudah kembali ke Tanah Air dan kemudian berwiraswasta, antara lain menghasilkan sejumlah produk untuk pasar ekspor dan juga di dalam negeri. [O-2]



ANTARA

Muhammad Awaluddin

Pertumbuhan DPK Perbankan



Nasabah melakukan transaksi melalui mesin ATM sebuah pusat perbelanjaan, Tangerang Selatan, kemarin. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan tumbuh positif sebesar 8,53% pada bulan Juli 2020. Meningkat dibandingkan pada Juni 2020 sebesar 7,95%. Pertumbuhan DPK ini bermakna sektor perbankan memiliki likuiditas yang cukup.

INVESTOR DAILY/DAVID GITA ROZA

Dapat Suntikan Dana Asing, Saham SBAT Melonjak

[JAKARTA] PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk (SBAT) bakal mendapatkan suntikan dana Rp 200 miliar dari investor asing dalam waktu dekat. Hal ini membuat saham pemain tekstil dan produk tekstil (TPT) ini melonjak.

Direktur Utama SBAT Jefri Junaedi menerangkan, dana itu akan digunakan untuk membeli mesin baru, yakni mop yarn machine untuk memenuhi kebutuhan produk kain pel dan open end machine untuk memenuhi kebutuhan produk sarung tangan serta perluasan pabrik yang berada di Bandung.

"Sebetulnya, sudah ada mitra strategis yang sejak awal memang ingin masuk. Namun, karena pertimbangan strategi dan bisnis, mereka ingin masuknya setelah kami IPO lewat skema private placement. Kami berterima kasih, investor internasional memberikan peluang untuk dapat mengakses pembiayaan yang lebih baik. Rencananya, dana investasi itu untuk pengembangan usaha selama tiga tahun ke depan," jelas Jefri, Minggu (6/9).

Saat ini, tambah Jefri, permintaan benang untuk produksi kain pel dari pabrikan di Pakistan, Bangladesh, India dan sarung tangan dari Rusia, Ukraina, serta Korea Selatan terus meningkat. Kebutuhan benang dari kain pel dan sarung tangan yang harus dipenuhi itu sekitar 10 ribu ton per bulan atau sekitar 50 kontainer.

Ada pun perseroan, sambung Jefri, saat ini baru bisa menyanggupi permintaan sebesar 1.600 ton per bulan atau sekitar delapan kontainer, seiring dengan kapasitas produksi tahunan yang mencapai 20.000 ton.

Rencananya, dengan tambahan mesin-mesin baru yang dibeli selama tahun ini, kapasitas tahunan SBAT bisa digandakan menjadi 40-50 ribu ton per tahun. Di sisi lain, Di harga saham SBAT melonjak 9,29% pada perdagangan Jumat (4/9) ke level Rp 306 dari Rp 242, dengan volume perdagangan 824.000 lot senulai Rp 27 miliar.

Kenaikan harga saham dan peningkatan volume transaksi yang mencapai 10 kali lipat dari biasanya ini dipicu kabar akan masuknya dana asing ke emiten ini.

"Rencana kucuran dana dari investor ini tentu ikut memengaruhi sentimen pasar. Kami yakinkan publik, bisnis kami terus bertumbuh dan punya prospek yang cerah dimasa mendatang. Misi kami membawa benang berkualitas baik di pasar domestik maupun internasional," kata Jefri.

Dia berharap, tambahan modal investor bisa ikut mengerek pendapatan bersih akhir tahun hingga Rp 400 miliar atau naik dari tahun lalu yang berada di angka Rp 318 miliar. [ID/E-8]

Incar Peluang Saat Pandemi, Kemperin Genjot Kinerja Industri Alat Olahraga

[JAKARTA] Kementerian Perindustrian (Kemperin) berupaya meningkatkan kinerja industri alat olahraga agar semakin memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Apalagi, di tengah kondisi pandemi Covid-19 ini banyak masyarakat yang mulai giat berolahraga untuk menjaga kesehatannya.

"Kondisi pandemi saat ini menjadi peluang bagi industri alat olahraga untuk memacu produktivitasnya dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kemenperin dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga tentang Pengembangan Sektor Industri dalam Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan di Jakarta, Jumat (4/9).

Di samping itu, diteken pula Nota Kesepahaman antara Kempora dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kegiatan dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional Tahun 2020 ini sebagai wujud nyata perhatian dari pemerintah dalam pengembangan dunia industri, olahraga, serta pariwisata dan ekonomi kreatif.

Agus menyampaikan, dalam upaya menggenjot daya saing industri alat olah raga di dalam negeri, pihaknya kini fokus terhadap penguatan struktur manufakturnya.

"Oleh karena itu, kita perlu gigih mendorong penumbuhan sektor pendukungnya. Selain itu, memperkuat brand lokal dan memfasilitasi kemitraan antara produsen alat olahraga dengan induk cabang olahraga," tuturnya.

Agus menambahkan, pihaknya menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada Kemenpora atas peran sertanya dalam membina dan mengembangkan industri alat olahraga di Indonesia. Inisiasi ini diharapkan juga dapat memajukan prestasi olahraga nasional di kancah global.

"Industri alat olahraga merupakan salah satu bagian penting yang menjadi fokus dalam pembinaan dan pengembangan olahraga nasional. Dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035, industri alat olahraga yang masuk dalam kategori industri aneka merupakan salah satu sektor dari 10 industri prioritas nasional yang pengembangannya mendapat akselerasi," paparnya.

Pada kesempatan tersebut, Agus mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan terkait dan seluruh masyarakat untuk dapat terus mengoptimalkan penggunaan produk hasil industri dalam negeri, termasuk alat olahraga. Upaya strategis ini dinilai mampu mengerek pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tekanan dampak pandemi Covid-19.

"Kami juga meminta kepada para pimpinan induk organisasi cabang olahraga agar bisa bersinergi dalam mendorong penggunaan dan pemanfaatan alat olahraga buatan Indonesia, baik itu dalam latihan keseharian maupun pada saat mengikuti atau mengadakan berbagai kompetisi dan ajang olahraga tingkat nasional atau internasional," tandasnya. [E-8]

PGN Tingkatkan Kinerja dan Layanan Gas Bumi

[JAKARTA] Sebagai *Subholding* gas yang berperan untuk menyalurkan manfaat gas bumi, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) saat ini telah berhasil menyalurkan gas bumi ke lebih dari 400.000 pelanggan di 59 kota/kabupaten.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, pertumbuhan pelanggan PGN cukup signifikan yaitu mencapai lebih dari 300.000 pelanggan. Ke depan, PGN optimis untuk mengembangkan infrastruktur dan meningkatkan layanan gas bumi, agar pemanfaatan gas bumi dapat dirasakan secara lebih luas dan berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional.

"Seiring dengan petumbuhan pelanggan dan upaya mendorong daya saing ekonomi nasional, PGN telah menerapkan harga gas menjadi US$ 6 per MMBTU kepada 7 sektor pelanggan industri tertentu. Per Juli 2020, implementasi penyesuaian harga gas ini telah diterapkan ke 173 pelanggan," ujar Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama, (4/9).

"Dalam rangka merayakan Hari Pelanggan Nasional dan bentuk apresiasi terhadap pelanggan, PGN juga memberikan kemudahan bagi pelanggan Rumah Tangga berupa promo *cashback* sebesar 10% untuk pembayaran tagihan gas PGN melalui platform Tokopedia," imbuh Rachmat.

Rachmat melanjutkan, untuk mendapatkan promo ini, pelanggan cukup memasukkan kode TOPEDPGN. Promo ini berlaku mulai tanggal 6 sampai dengan 20 September 2020.

"Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelanggan, atas kepercayaannya menggunakan gas bumi. PGN berupaya untuk meningkatkan pelayanan dan kenyamanan pelanggan, agar nilai lebih dari penggunaan gas bumi dapat semakin dirasakan," ujar Rachmat.

Selain Tokopedia, PGN telah menupayakan kemudahan untuk melakukan pembayaran tagihan gas berbagai *channel* pembayaran *online* seperti Gopay, PPOB, Dan+Dan, dan Klik Indomaret. Pelanggan bisa membayarkan tagihan gas melalui *smartphone* masing-masing melalui *channel* pembayaran digital tersebut, sehingga pembayaran lebih praktis dan tidak perlu keluar rumah mengingat masih dalam kondisi Covid-19. [ID/E-8]

Hari Pelanggan Nasional



BERITASATU/EMRAL

Marketing Operation Region IV wilayah Jawa Bagian Tengah menggelar kegiatan Hari Pelanggan Nasional di SPBU 44.502.01 Jl. Jenderal S Parman, Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah, Minggu (6/9). PT Pertamina (Persero) kembali mengedukasi pelanggan setianya untuk tetap taat aturan saat melakukan pengisian BBM di SPBU serta protokol Covid-19.

Banpres Produktif Usaha Mikro

Pastikan Dana Tepat Sasaran, Kemkop UKM Koordinasi dengan Bank Penyalur

[JAKARTA] Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki menyerahkan secara simbolis Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro kepada empat pelaku usaha mikro di Karangasem, Bali. Mereka yang menerima bantuan adalah, Ni Made Rusni (pengrajin tamas), Ni Kadek Anis (pengrajin tenun) disalurkan oleh Bank BNI dan I Wayan Marta (nelayan dan jasa wisata), I Ketut Lilit (kerajinan atta) yang disalurkan oleh Bank BRI.

Teten berharap Banpres senilai Rp 2,4 juta tersebut dapat digunakan untuk meningkat usaha produktif, agar bisa lebih berkembang dan dapat meningkatkan perekonomian.

"Banpres ini adalah hibah. Gunakan sebaik-baiknya untuk usaha produktif. Uang yang didapatkan bisa diputar agar usahanya tetap bertahan," tegas Menkop dan UKM Teten Masduki didampingi Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri di Cagar Budaya Taman Sukasada Ujung, Kabupaten Karangasem, Bali, Sabtu (5/9) sebagaimana dalam siaran persnya.

Hadir Deputi Produksi dan Pemasaran KemkopUKM Victoria Simanungkalit, Dirut Lembaga Penyalur Dana Bergulir (LPDB) Supomo, Dirut Smesco Indonesia Leonard Theosabrata, dan Staf Khusus Menteri Vicky Satari.

Teten mengatakan, dana Banpres tersebut dapat digunakan sebagai modal awal untuk meningkatkan produksi dan jika telah *bankable*, maka bisa ditingkatkan untuk mengajukan kredit usaha rakyat (KUR) super mikro dibawah Rp 10 juta dengan bunga 0%.

"Kita pahami ekonomi lesu, Rp 100.000 sampai 200.000 sebulan digunakan untuk kebutuhan konsumsi tidak apa-apa. Apalagi dari modal awal Rp 2,4 juta mereka *bankable* bisa ditingkatkan untuk dapat KUR usaha super mikro dibawah Rp10 juta dapat 0%," katanya.

Kunjungan Kerja

Teten menjelaskan, kunjungan kerja ke Bali tersebut, juga dalam rangka memastikan Banpres produktif usaha mikro telah diterima oleh masyarakat. Pihaknya berjanji akan melakukan koordinasi dengan penyalur yaitu BRI dan BNI, jika ditemukan adanya pelaku usaha mikro yang belum mendapatkannya.

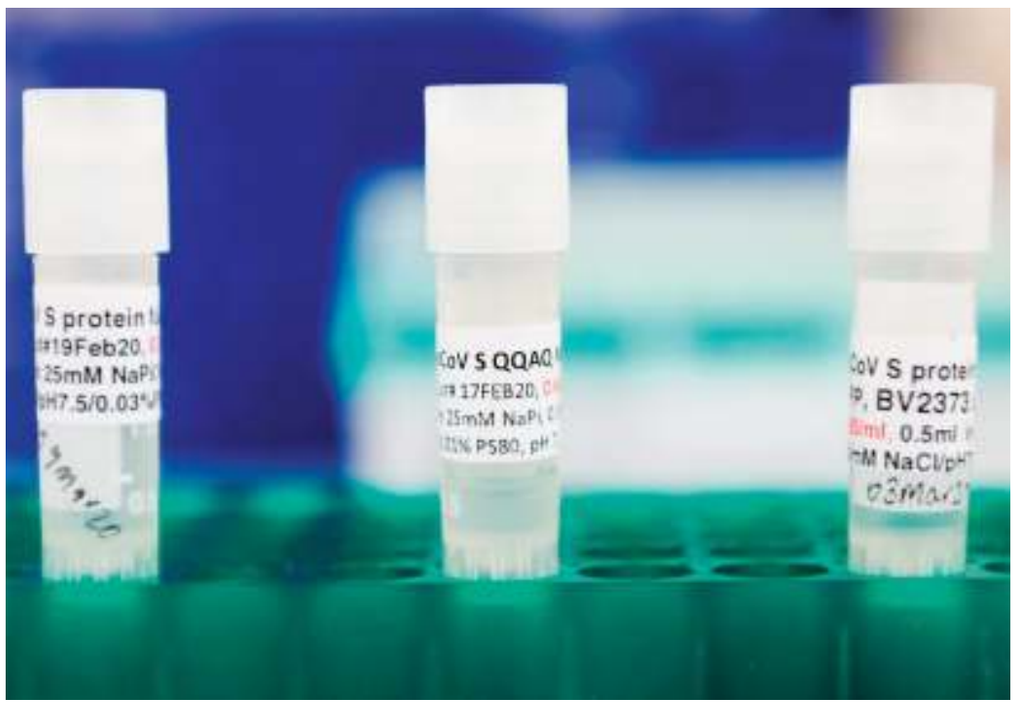
"Mengecek juga apakah Banpres sudah diterima. Tadi ibu bupati sampaikan masih ada beberapa usulan belum turun. Ini catatan kami untuk kordinasikan dengan penyalurnya BRI dan BNI," tambahnya.

Sementara itu, Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri mengatakan, jumlah pelaku UMKM di Kabupaten Karangasem mencapai 31.513, Dari jumlah tersebut, pihaknya mengusulkan 10 ribu pelaku usaha mikro untuk bisa mendapatkan Banpres.

"Bahwa masyarakat bisa dapatkan hak-haknya sebanyak 10.000 lebih pelaku usaha. Sudah diusulkan melalui BRI 720 pelaku usaha. Namun baru disalurkan 601 usaha mikro. Mohon Pak Menteri untuk menyalurkan hak mereka," katanya. [E-8]

WHO: Distribusi Vaksin Covid-19 Baru Bisa Juni 2021

[JENEWA] Distribusi skala global untuk vaksin Covid-19 diperkirakan baru dimulai pertengahan 2021, sebut kepala ilmuwan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Dr Soumya Swaminathan dalam paparan pers di Jenewa, Swiss, Jumat (4/8).



AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Tiga bakal vaksin Covid-19 disimpan dalam nampan di laboratorium Novavax di Gaithersburg, Maryland pada 20 Maret 2020, salah satu laboratorium yang mengembangkan vaksin untuk virus corona, Covid-19.

"Jadi secara realistis, mungkin paruh kedua, pertengahan 2021, mungkin kuartal kedua, kuartal ketiga 2021, adalah saat kita dapat mulai melihat dosis benar-benar mengalir ke dalam negara-negara sehingga mereka mulai dapat mengimunisasi populasinya," kata Swaminathan.

Menurut Swaminathan, garis waktu yang disebutkannya berdasarkan fakta bahwa uji coba Fase III dari banyak bakal vaksin tidak diperkirakan selesai sampai akhir tahun ini.

"Kami mengharapkan hasil dari beberapa kandidat (vaksin), yang sudah dalam uji coba Fase 3, akan selesai sampai akhir tahun atau awal tahun depan, setelah itu mereka harus meningkatkan pembuatan untuk memproduksi ratusan juta dosis yang akan dibutuhkan," ujarnya.

Swaminathan mengatakan faktanya dunia membutuhkan miliaran dosis sehingga perlu waktu untuk pembuatannya. "Jadi kita harus optimistis dan realistis pada saat bersamaan," kata Swaminathan.

Tiongkok meningkatkan upayanya dalam perlombaan vaksin gobal. CNBG telah mendapat persetujuan dua negara mitra lagi untuk berpartisipasi dalam uji klinis Fase 3 yaitu Serbia dan Pakistan, sedangkan Sinovac telah mendapatkan persetujuan dari Turki dan Bangladesh. Kedua perusahaan tersebut mencari lebih banyak data dari luar negeri karena kasus-kasus baru di Tiongkok semakin berkurang.

Di pihak lain, Kelompok Biotek Nasional Tiongkok (China National Biotec Group/CNBG) dan Sinovac Biotech Ltd menyatakan masing-masing telah menemukan dua negara lagi untuk menjalankan uji klinis tahap akhir untuk bakal vaksin Covid-19.

Serbia akan menguji dua vaksin yang dikembangkan oleh unit CNBG di Wuhan dan Beijing, dan Pakistan akan menguji bakal vaksin CNBG di Beijing. Wakil Presiden CNBG, Zhang Yuntao, mengatakan uji coba Fase 3 CNBG diperkirakan melibatkan 50.000 orang di sekitar 10 negara, yang telah dimulai di Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Peru, Maroko, Argentina, dan Yordania.

CNBG juga secepatnya akan menyediakan vaksinnya kepada para staf Tiongkok yang bekerja di kedutaan besar dan konsul jenderal di luar negeri.

Menurut Zhang, negara-negara asing telah menyampaikan minatnya untuk memesan gabungan 500 juta dosis dari vaksin perusahaan itu. CNBG diperkirakan mampu memproduksi 300 juta dosis vaksin per tahun setelah meningkatkan teknik produksinya, serta sedang menjalankan rencana untuk meningkatkan kapasitasnya menjadi satu miliar dosis per tahun.

Karyawan Divaksin

CEO Sinovac Yin Weidong mengatakan bakal vaksin Sinovac, CoronaVac, yang sedang diuji coba di Brasil dan Indonesia, juga telah mendapatkan persetujuan dari Turki dan Bangladesh untuk uji klinis Fase 3.

Saat uji coba tahap akhir masih dijalankan untuk membuktikan keamanan dan efektivitas vaksin, Tiongkok telah mengizinkan penggunaan darurat bakal vaksin dari Sinovac dan CNBG bagi kelompok risiko tinggi seperti pekerja kesehatan.

Pada Minggu (6/9), Yin mengatakan sekitar 90% karyawan Sinovac beserta keluarganya telah mengambil vaksin percobaan di bawah program penggunaan darurat.

Tiongkok telah meluncurkan program tersebut sejak Juli yang ditujukan kepada para staf kesehatan dan pekerja di pasar makanan, sektor transportasi, dan jasa.

Yin memperkirakan sekitar 2.000-3.000 karyawan beserta keluarganya telah disuntik vaksin CoronaVac secara sukarela.

"Sebagai pengembang dan produsen vaksin, wabah baru bisa secara langsung berdampak kepada produksi vaksin kami," kata Yin, Minggu (6/9).

Yin yang juga ikut disuntik bersama istri dan orang tuanya, mengatakan dokter menanyakan kondisi kesehatannya sebelum divaksin, serta tingkat kejadian di antara mereka yang diberi vaksin sangat rendah.

Efek samping dari CoronaVac antara lain kelelahan, demam, nyeri, dan sebagian besar gejala ringan berdasarkan hasil uji coba tahap menengah yang disponsori Sinovac, melibatkan 600 peserta dan dipublikasikan bulan Agustus sebelum tinjauan sejawat. [Hindustan Times/Reuters/Times of India/C-5]

Menlu: Indonesia Terus Upayakan Akses

[JAKARTA] Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan Indonesia lewat perwakilan di luar negeri terus mengupayakan pendekatan kepada pihak-pihak terkait untuk mendapatkan akses vaksin Covid-19. Kerja sama difokuskan kepada tiga institusi utama yang beperan memastikan akses yang adil untuk vaksin Covid-19.

"Dapat saya jelaskan bahwa aliansi vaksin GAVI, Coalition for Epidemic Preparedness (CEPI), dan WHO adalah tiga institusi utama pelopor Covax Facility yang dibentuk untuk memastikan akses adil dan merata atas vaksin Covid-19," kata Retno dalam paparan pers secara virtual, Jumat (4/9).

GAVI dan WHO berbasis di Jenewa, Swiss, sedangkan CEPI berbasis di Oslo, Norwegia.

"Covax akan mendistribusikan vaksin sebanyak dua miliar dosis sampai akhir 2021 ke seluruh negara dunia. Detail pembahasan mengenai mekanisme pendistribusian, biaya, besaran vaksin dan lain-lain masih terus dibahas oleh GAVI akhir September 2020," kata Retno.

Retno menambahkan Indonesia juga terus mematangkan peluang kerja sama antara CEPI dan perusahaan nasional, Bio Farma, untuk manufaktur (produksi) vaksin.

Menurut Retno, Bio Farma sudah masuk dalam shortlist (kandidat potensial) yang artinya memiliki peluang besar untuk bekerja sama dengan CEPI dalam proses pembuatan vaksin.

"CEPI akan melakukan due dilligence (uji kelayakan) mulai 14 September sampai akhir September untuk memastikan langkah berikutnya. Kita akan mempersiapkan *due dilligence* ini sebaik mungkin sehingga hasilnya akan baik," tambah Retno. [C-5]

1.000 Dokter Inggris Ingin Tinggalkan NHS



AFP/ HEATHCLIFF O'MALLEY

Anggota keluarga Kerajaan Inggris, Sophie, yang bergelar Countess of Wessex berbincang dengan paramedis saat kunjungannya ke Thames Valley Air Ambulance, di dekat Maidenhead, barat London, Inggris, Kamis (3/9) menjelang Pekan Ambulans Udara Nasional.

[LONDON] Lebih dari 1.000 dokter di Inggris berencana untuk keluar dari Layanan Kesehatan Nasional (National Health Service/NHS) karena mereka kecewa dengan penanganan pemerintah terhadap pandemi Covid-19 dan kecilnya gaji yang diterima.

Demikian survei yang dilakukan Asosiasi Dokter Inggris (The Doctors' Association UK/DAUK) secara daring terhadap anggotanya dengan jumlah responden 1.758 dokter di seluruh Inggris yang dilansir *Guardian*, Sabtu (5/9).

Dalam survei itu disebutkan, dua pertiga responden berencana meninggalkan NHS dalam tiga tahun ke depan akibat kelelahan menangani Covid-19 dan frustrasi atas besaran gaji.

Para dokter berniat pindah ke luar negeri, mengambil cuti karier, beralih ke rumah sakit swasta, atau mengundurkan diri. Hal itu sebagai pelarian atas kekhawatiran yang berkembang tentang kondisi kesehatan mental mereka dan tingkat stres menjalankan profesinya belakangan ini.

"Para dokter NHS telah keluar dari pandemi ini dengan luka, memar, dan terbakar," kata Presiden DAUK Samantha Batt-Rawden yang melakukan penelitian.

Menurut dia, banyaknya tenaga medis yang berniat meninggalkan NHS dalam tiga tahun ke depan merupakan "kenyataan mengejutkan atas kegagalan pemerintah menghargai para dokter di negara kita," tambahnya.

Ia menambahkan, "Mereka profesional berdedikasi yang terus menerus mempertaruhkan nyawanya untuk menjaga pasien di NHS tetap sehat, dan kita bisa kehilangan mereka."

Secara keseluruhan, 1.758 dokter di seluruh Inggris menanggapi ketika DAUK melakukan survei daring di antara para anggotanya.

Dalam survei itu ditanyakan, "Apakah pelayanan pemerintah terhadap dokter garis depan selama pandemi memengaruhi keputusan Anda untuk bertahan atau meninggalkan NHS?"

Hampir tujuh dari sepuluh atau sebanyak 1.214 (69%) mengatakan bahwa hal itu membuat mereka cenderung meninggalkan layanan kesehatan pemerintah, sementara 26% mengatakan tidak.

Ketika ditanya, "Di mana Anda melihat diri Anda bekerja dalam satu sampai tiga tahun ke depan?" Hampir dua pertiga dokter atau 1.143 (65%) mengatakan mereka akan keluar dari NHS. Temuan itu telah memicu kekhawatiran baru tentang kekurangan staf NHS. Sebab, menurut angka resmi terbaru, layanan kesehatan publik di Inggris sudah membuka lowongan untuk 8.278 dokter. [Guardian/Y-4]

Sanders: Trump Tak Akan Akui Kekalahan

[WASHINGTON] Senator Amerika Serikat (AS) Bernie Sanders memperingatkan bahwa Presiden Donald Trump, selaku calon presiden AS dari Republik, mungkin tidak akan mengakui jika nantinya kalah dalam pemilu November. Sanders merujuk sejumlah komentar Trump selama Konvensi Nasional Republik bulan Agustus.

"Ini bukan hanya spekulasi kosong. Trump mengatakan satu-satunya cara mereka bisa mengambil alih pemilihan ini dari kita adalah jika ini pemilihan curang. Sekarang dia membuat pernyataan itu hampir setiap saat ketika tertinggal dalam setiap jajak pendapat nasional," ujar Sanders yang mundur dari nominasi capres AS dari Demokrat dan mengalihkan dukungan kepada Joe Biden, kepada *Politico*, Jumat (4/9).

Dalam wawancara bulan Juli dengan presenter *Fox News,* Chris Wallace, Trump mengatakan dirinya "harus melihat" apakah akan menerima hasil pada November.

"Saya harus melihat. Lihat, Anda, saya harus melihat. Tidak, saya tidak hanya akan mengatakan 'ya'. Saya tidak akan mengatakan 'tidak', dan saya tidak melakukannya terakhir kali," ujar Trump.

Trump juga menyarankan penundaan pemilu presiden, serta menuding tanpa bukti bahwa pemungutan suara lewat surat memicu penipuan. Sanders selanjutnya menguraikan poin-poin tersebut lewat serangkaian pesan di Twitter.

"Kita juga harus mempertimbangkan apa yang terjadi jika Trump kalah tapi menolak mematuhi hasilnya dan melakukan segala cara yang dia bisa untuk mempertahankan kekuasaan," tambah Sanders.



REUTERS / MARK KAUZLARICH

Kandidat presiden dari Partai Demokrat AS Bernie Sanders melambai ke kerumunan setelah berbicara di balai kota di Independence, Iowa, AS, pada 24 Januari 2016.

Sanders menambahkan telah merencanakan serangkaian tindakan untuk meningkatkan kesadaran akan kemungkinan Trump tidak mau meninggalkan kekuasaannya.

"Apa yang harus kami lakukan dalam dua bulan ke depan adalah memperingatkan warga Amerika tentang seperti apa skenario mimpi buruk itu untuk mempersiapkan mereka menghadapi kemungkinan tersebut dan berbicara tentang apa yang kita lakukan jika terjadi," kata Sanders.

Sementara itu, capres AS dari Demokrat, Joe Biden, membantah pernyataan Jaksa Agung William Barr bahwa Tiongkok, bukan Rusia, yang paling agresif dalam upaya menabur perselisihan dalam politik AS.

Biden mengaku tidak setuju bahwa Tiongkok adalah ancaman terbesar atas pemilihan presiden dan menyebut penilaian semacam itu tidak sesuai dengan arahan intelijennya.

"Ada banyak negara di seluruh dunia, saya pikir, yang akan senang melihat pemilu kita tidak stabil. Tapi, salah satu yang bekerja paling keras, paling konsisten, dan tidak pernah menyerah adalah Rusia," kata Biden. [The Hill/USA Today/Al Jazeera/C-5]

Pandemi Covid-19

7.000 Petugas Kesehatan Meninggal, Tertinggi di Meksiko

[LONDON] Lebih dari 7.000 petugas kesehatan di seluruh dunia telah meninggal karena terinfeksi virus *corona,* di antaranya Meksiko yang tercatat menyumbang paling banyak yaitu 1.320 orang.

Laporan yang dikeluarkan oleh lembaga hak asasi manusia berbasis di London, Inggris, Amnesti Internasional, menyebut negara lainnya dengan tingkat kematian tinggi adalah Amerika Serikat (1.077 orang), Brasil (634 orang), dan India (573 orang).

"Berbulan-bulan setelah pandemi, para pekerja kesehatan yang meninggal masih dalam angka mengerikan di negara-negara seperti Meksiko, Brasil, dan AS," kata Kepala Keadilan Sosial dan Ekonomi Amnesti Internasional, Steve Cockburn, Sabtu (5/9).



AFP/ CARLOS EDUARDO RAMIREZ

Anggota Perlindungan Sipil yang mengenakan alat pelindung diri mengubur peti mati korban virus corona Covid-19 di Pemakaman Kota di San Cristobal, Venezuela, Selasa (1/9).

Cockburn mengatakan setiap pekerja kesehatan memiliki hak atas rasa aman di tempat kerja. Data kematian terbaru adalah skandal karena pekerja kesehatan harus membayar harga tertinggi.

"Harus ada kerja sama global untuk memastikan semua petugas kesehatan diberikan alat pelindung yang memadai sehingga mereka dapat melanjutkan pekerjaan penting mereka tanpa mempertaruhkan nyawa sendiri," kata Cockburn.

AS, Brasil, dan India tercatat sebagai tiga negara dengan angka kematian dan kasus terkonfirmasi Covid-19 tertinggi di dunia. Jika digabungkan, berdasarkan data *Reuters,* ketiga negara itu mencatat lebih dari 14 juta kasus virus corona dan hampir 387.000 kematian.

Analisis Reuters atas data pemerintah Meksiko bulan Agustus menemukan bahwa risiko pekerja kesehatan yang meninggal di Meksiko adalah empat kali lebih tinggi dibandingkan di AS, dan delapan kali lebih tinggi dibandingkan di Brasil.

Meksiko mencatat lebih dari 610.000 kasus dan hampir 66.000 kematian. Awal minggu lalu, pemerintah Meksiko menyatakan 102.494 petugas kesehatan telah terinfeksi Covid-19 dan angka kematian naik menjadi 1.378.

Amnesti menyerukan lebih banyak bantuan untuk para petugas kesehatan, contohnya di Brasil, para profesional kesehatan mengeluhkan kurangnya peralatan perlindungan.

"Selama pandemi, pemerintah telah memuji para petugas kesehatan sebagai pahlawan, tapi seperti tidak tulus karena begitu banyak petugas yang meninggal karena kurangnya perlindungan dasar," tambah Cockburn.

Sementara itu, kota Los Angeles di negara bagian California AS melaporkan kematian ke-6.000 akibat Covid-19. Berdasarkan data terakhir dari Departemen Kesehatan Publik, sebanyak 1.196 kasus baru Covid-19 dan 24 lebih kematian terkonfirmasi pada Sabtu, sehingga jumlah kasus di negara bagian itu menjadi 247.542 dan setidaknya 6.000 kematian. [Reuters/NBC News/Xinhua/C-5]

Pandemi Covid-19

Meksiko Kehabisan Sertifikat Kematian

[MEXICO CITY] Pandemi Covid-19 memukul Meksiko begitu berat. Bahkan, pemerintah negara itu sampai kehabisan sertifikat kematian. Para pejabat mengatakan, formulir bahkan sudah habis sekitar 15 hingga 20 hari lalu di setidaknya tiga negara bagian yakni Baja California, Negara Bagian Meksiko, dan Mexico City.



AFP/ALFREDO ESTRELLA

Sekelompok pekerja pemakaman berdemonstrasi menuntut pemerintah lebih memperbanyak sertifikat kematian medis untuk mempercepat prosedur pemakaman Covid-19, di luar Sekretaris Kesehatan Kota Cuautitlan de Romero Rubio, di Negara Bagian Meksiko, Senin (31/8).

Pihak berwenang mengatakan, satu juta formulir baru telah dicetak dan sedang didistribusikan. Sertifikat dicetak dengan karakteristik khusus, sebab beberapa waktu sebelumnya sudah ada aksi pemalsuan.

Meksiko merupakan negara dengan tingkat kematian Covid-19 tertinggi keempat di dunia. Pada Jumat (4/9), jumlah kasus yang dikonfirmasi naik 6.196 menjadi 623.090 kasus, sementara kematian naik 522 menjadi 66.851 kasus kematian. Kasus di Meksiko sekarang tampaknya tidak berubah dan tidak lagi menurun.

Sementara itu, Pemerintah Australia pada Minggu (6/9) memperpanjang penguncian yang ketat di kota terbesar kedua di negara itu selama dua pekan. Hal itu dilakukan karena angka penurunan kasus belum cukup kuat sebagai acuan tidak adanya lonjakan lagi.

Warga Melbourne akhir pekan depan dijadwalkan akan bebas dari penguncian ketat selama enam pekan. Namun, mereka tetap akan menghadapi pembatasan terus-menerus selama beberapa bulan ke depan. Soalnya, gubernur negara bagian Victoria Daniel Andrews mengatakan, penguncian saat ini akan tetap berlaku hingga 28 September.

"Jika kami terlalu cepat membukanya, maka kami memiliki kemungkinan yang sangat tinggi bahwa kami tidak benar-benar terbuka sama sekali, malah memulai gelombang ketiga," katanya dalam konferensi pers.

Sebanyak 63 kasus baru dan lima kematian tercatat di Victoria pada Minggu (6/9), setelah melewati angka tertinggi di atas 700 pada puncak wabah. Namun, meskipun menurun, tetapi pejabat kesehatan mengambil pendekatan hati-hati.

Menteri Pembangunan Jerman Gerd Müller pada Minggu (9/9) mengatakan, Jerman secara signifikan memperluas program bantuannya ke India di mana kasus virus corona melonjak dengan cepat di negara itu.

Jerman akan memberi negara Asia Selatan itu sebanyak 330.000 alat uji virus *corona* dan 600.000 peralatan pelindung pribadi dengan nilai sebesar 15 juta Euro atau sekitar Rp 262,64 miliar. Demikian disampaikan Müller kepada surat kabar Funke Mediengruppe.

Müller menekankan, langkah-langkah bantuan diharapkan bisa "memperlambat penyebaran" pandemi di negara itu.

Kementerian Pembangunan Jerman juga memberikan pinjaman jangka pendek ke India sebesar 460 juta Euro.

"Dengan cara ini, kami bekerja sama untuk memastikan bahwa makanan dapat didistribusikan kepada 800 juta orang dan bantuan dapat diberikan kepada 320 juta orang yang telah kehilangan pekerjaan mereka selama krisis virus *corona*," kata Müller.

Menurut dia, program bantuan merupakan salah satu tindakan dukungan terhadap penanganan virus *corona* terbesar di dunia.

India telah menjadi negara ketiga di dunia yang melampaui 4 juta infeksi virus corona. India berada di belakang AS dan Brasil dengan masing-masing lebih dari 6,3 juta dan 4,1 juta kasus infeksi.

Pada Sabtu, India mencatat rekor peningkatan kasus setiap hari dengan 86.432 infeksi baru yang terkonfirmasi. Negara tersebut sejauh ini mencatat 69.561 kematian akibat virus *corona*. [WSJ/ABCnews/Guardian/DW/Y-4]

Demonstran Penyangkal Pandemi Tidak Pakai Masker

[ROMA] Ribuan aktivis penyangkal pandemi berunjuk rasa di ibu kota Italia, Roma, Sabtu (5/9). Mereka memenuhi kawasan dekat situs bersejarah Circus Maximus.

Para demonstran yang berasal dari partai sayap kanan Forza Nuova (FN), gerakan anti-vax, dan kelompok sipil yang menolak virus, memprotes semua tindakan pencegahan untuk memerangi penyebaran Covid-19 di negara itu. Tak satu pun pengunjuk rasa terlihat mengenakan masker.

Pihak berwenang mengecam unjuk rasa tersebut. "Hari ini kami melihat orang-orang berkumpul di Roma, yang mengira pandemi tidak ada," kata Perdana Menteri Giuseppe Conte dalam acara tahunan di Roma yang disiarkan langsung secara daring.

"Kami menjawab mereka dengan angka: lebih dari 274.000 orang terinfeksi dan lebih dari 35.000 orang meninggal. Titik."

Menteri Luar Negeri Luigi Di Maio dan Wali Kota Roma Virginia Raggi termasuk di antara para pemimpin politik lainnya yang mengutuk aksi demonstran tersebut.

Demonstrasi itu terjadi di tengah kekhawatiran akan peningkatan terbatas namun stabil pada infeksi virus corona yang tercatat dalam lima pekan terakhir, seperti yang ditunjukkan data resmi dan laporan pemantauan terbaru oleh Institut Kesehatan Nasional (ISS) Italia.

Data statistik harian pada Sabtu malam, Kementerian Kesehatan mengonfirmasi total 276.338 kasus virus corona di negara itu dengan peningkatan 1.695 kasus baru selama 24 jam terakhir, dan 35.534 kasus kematian.

Sementara itu di Australia, belasan demonstran yang memprotes kebijakan penguncian ditangkap setelah aksi unjuk rasa mereka berakhir ricuh di Melbourne. Sebanyak ratusan orang berkumpul untuk menuntut diakhirinya tindakan penanganan Covid-19. Mereka menghalau polisi dan sebagian bentrok dengan petugas. [Xinhua/RT/Y-4]

Rokok di Australia Paling Mahal di Dunia



AFP

Pemerintah Australia menaikkan pajak rokok untuk mendorong gaya hidup sehat.

[CANBERRA] Australia menaikkan pajak rokok untuk kedua kalinya tahun 2020. Kini kebijakan itu menjadikan Australia sebagai tempat paling mahal di dunia untuk merokok.

Seperti dilaporkan *RT*, Selasa (1/9), harga sebatang rokok menjadi AU$ 1,75 (US$ 1,29 atau Rp18.988) di Australia. Negara itu memang menerapkan kenaikan pajak kedua untuk tembakau dalam upaya mencegah tindakan tidak sehat, menjadikan rokok yang paling mahal di mana pun di dunia.

Setelah Australia, Selandia Baru adalah tempat paling mahal berikutnya untuk merokok, dengan pajak yang menambah biaya per bungkus di atas AU$ 23,50 (Rp252.258). Irlandia, Norwegia, dan Inggris adalah yang berikutnya, meskipun beberapa bagian AS, khususnya New York dan New Jersey yang menyaingi negara-negara tersebut.

Perokok Australia dipukul dengan kenaikan pajak 12,5% pada Selasa (1/9), kenaikan pajak cukai tembakau kedua yang dilakukan Canberra terhadap konsumen tahun 2020. Sebungkus 20 batang rokok sekarang berharga AU$ 35 (US$ 25 atau Rp368.000) dan rokok bermerek bahkan lebih mahal, dengan harga lebih dari AU$ 40 atau Rp 429.376 per bungkus.

Pajak rokok adalah keuntungan besar bagi pemerintah Australia, yang menghasilkan sekitar AU$ 17 miliar (Rp 182 triliun)per tahun dari retribusi tersebut. Namun, seiring dengan kenaikan pajak, perdagangan tembakau di pasar gelap juga meningkat. Menurut pasukan perbatasan Australia, bisnis ilegal bernilai lebih dari AU$ 546 juta (Rp5,86 triliun).

Pejabat pemerintah mengatakan mereka ingin mencegah perilaku berbahaya tersebut, dan kenaikan pajak telah berhasil menurunkan persentase warga Australia yang merokok dari 20% pada tahun 2001 menjadi hanya di bawah 14 % pada tahun 2018.

Namun, konsumsi rokok belum tentu cenderung menurun, selama ini. Konsumsi rokok naik pada kuartal terakhir tahun 2017, bertentangan dengan penurunan yang berkepanjangan.

Beberapa pejabat ingin Canberra berbuat lebih banyak untuk mendorong vaping atau rokok elektrik, yang menurut banyak pakar kesehatan tidak terlalu berbahaya. Tetapi secara teknis, vaping tetap ilegal di Australia. Sementara vape dan rokok elektrik dapat dijual tanpa nikotin, kepemilikan dan penggunaan nikotin untuk vaping dilarang di bawah peraturan racun nasional.

Namun, menurut Daily Mail, seorang perokok dapat memperoleh resep nikotin cair, izin untuk mengimpornya untuk konsumsi pribadi - atau hanya membelinya di pasar gelap, yang merupakan metode paling populer.

Dengan harga baru, rata-rata perokok per hari menghabiskan AU$ 12.500 (Rp128 juta) per tahun untuk kebiasaan mereka, jumlah yang lumayan terutama mengingat depresi ekonomi dunia yang menyusul setelah pandemi virus *corona*.[RT/U-5]

Kim Jong-un Kunjungi Daerah yang Dilanda Topan Maysak

[SEOUL] Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, Sabtu (5/8), mengunjungi daerah yang dilanda topan di pantai timur negara itu. Kim memerintahkan 12.000 anggota inti Partai Pekerja untuk ikut dalam upaya pemulihan bencana, serta memecat seorang ketua partai tingkat provinsi.

Stasiun televisi pemerintah Korut, KRT, Minggu (6/8), memperlihatkan video Kim sedang mengadakan pertemuan dengan pejabat Korut dan berjalan di wilayah yang terpukul topan Maysak tersebut.

Surat kabar Partai Pekerja menyalahkan otoritas di kota pesisir Wonsan karena gagal menyiapkan diri untuk kedatangan topan tersebut, serta menuding mereka memiliki "sikap tidak bertanggung jawab".

Kantor Berita Korea Pusat (*KCNA*), menyatakan lebih dari 1.000 rumah telah hancur di wilayah pesisir provinsi Hamgyong Selatan dan Utara, serta melaporkan tanah pertanian dan beberapa bangunan publik telah terendam.

Kim memimpin pertemuan komite kebijakan eksektuif yang diperluas tentang upaya pemulihan di daerah terpukul topan. Dia memfokuskan langkah-langkah detail seperti organisasi kru bangunan yang akan dikirimkan ke daerah tersebut, desain, dan transportasi material.

Dalam pertemuan itu, dia juga memecat ketua komite partai di provinsi Hamgyong Selatan dan menunjuk pejabat baru.

Partai penguasa Korut itu menyerukan hukuman bagi para pejabat yang gagal mengikuti instruksi sehingga menyebabkan puluhan korban dari topan.

"Keputusan telah dibuat untuk menjatuhkan hukuman tajam, administratif, dan sah kepada mereka yang bertanggung jawab atas korban," sebut surat kabar dari Partai Pekerja, Sabtu.

Secara terpisah, Kim mengirimkan surat terbuka kepada anggota partai di ibu kota menyatakan bahwa tahun ini telah menyaksikan kesulitan yang tidak biasa karena krisis kesehatan masyarakat yang berkepanjangan di dunia dan bencana alam.



KCNA VIA KNS /AFP

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un (tengah) mengunjungi daerah yang rusak akibat Topan Maysak di Provinsi Hamgyong Selatan, Sabtu (5/9).

Ditambahkan, Komite Pusat Partai memutuskan untuk mengerahkan 12.000 anggota partai dari Pyongyang ke wilayah yang terpukul topan untuk membantu pemulihan masyarakat.

Korut telah berusaha melakukan langkah-langkah praktis untuk meminimalkan kerusakan dari topan ke-10 dari musim ini dengan memberi informasi kepada orang-orang tentang lokasi perlindungan, jalur topan, serta bagaimana cara menanggapi bencana tersebut.

Negara terisolasi itu bergulat dengan musim hujan, banjir, dan topan. Topan Maysak memukul Semenanjung Korea pada Kamis (3/9), termasuk di Korea Selatan yang menyebabkan kematian dua orang dan ribuan orang tidak mendapatkan akses listrik. Topan Haishen diperkirakan akan menghantam ujung selatan Korsel pada Senin (7/9), berdasarkan Badan Meteorologi Korsel. [Reuters/BBC/C-5]

Dalam 5 Bulan, Sudan Selatan Catat 1.500 Kasus Pernikahan Anak

[JUBA] Lebih dari 1.500 gadis remaja di Sudan Selatan telah dinikahkan atau dihamili sejak April 2020. Hal itu terungkap dalam satu laporan baru kelompok masyarakat sipil lokal yang diluncurkan di Juba pada Jumat (4/9).

Laporan yang dirilis oleh *Support Peace Development Initiative Organization* (SPIDO) menemukan angka yang mengkhawatirkan dari pernikahan dini, kehamilan dan prostitusi di tiga negara bagian Equatoria, Timur, Tengah dan Barat.

Seperti dikutip *Xinhua*, laporan tersebut mengungkap insiden pelanggaran terkait seksual yang tersebar luas, kebanyakan pemerkosaan, percobaan pemerkosaan, pelecehan seksual, dan pembunuhan anak-anak.

Organisasi itu menyatakan telah mendokumentasikan setidaknya 1.535 kasus pernikahan anak dan kehamilan remaja di wilayah Equatoria sejak Sudan Selatan menutup sekolah pada pertengahan Maret sebagai tindakan pencegahan terhadap pandemi Covid-19.

Western Equatoria memimpin kasus perkawinan dan kehamilan remaja, dengan 1.182 kasus diikuti oleh Eastern Equatoria dengan 318 kasus, dan Central Equatoria dengan 35 kasus masing-masing.

"Dalam waktu singkat ini, lebih dari 1.500 gadis telah dinikahkan di tiga wilayah. Ini menunjukkan bahwa situasinya bisa lebih buruk di wilayah lain di mana perkawinan anak merajalela bahkan sebelum penutupan Covid-19," kata Direktur Eksekutif SPIDO, Wodcan Savior Lazarus di Juba.

Usia minimal pernikahan resmi Sudan Selatan adalah 18 tahun, tetapi negara itu telah lama bergulat dengan tingginya angka pernikahan dini dan pernikahan paksa.



AFP

Para pemuda Lebanon memegang spanduk saat berpartisipasi dalam kampaye menentang pernikahan sebelum usia 18 tahun, di ibu kota Beirut, Lebanon pada 2 Maret 2019.

Menurut badan anak-anak PBB (UNICEF), Sudan Selatan memiliki tingkat prevalensi pernikahan anak tertinggi ketujuh di dunia. Sekitar 52% anak perempuan di negara itu menikah sebelum ulang tahun ke-18 dan sembilan persen menikah sebelum usia 15 tahun.

Kelompok masyarakat sipil memperingatkan bahwa penutupan sekolah yang terus-menerus dan krisis ekonomi yang parah yang diperburuk oleh krisis Covid-19 dapat menyebabkan lebih banyak pernikahan anak.

"Kemiskinan membuat beberapa orang tua memaksa anak perempuannya untuk menikah dengan harapan mendapat mas kawin karena di banyak budaya Sudan Selatan, anak perempuan dipandang sebagai sumber kekayaan," kata Lazarus.

Laporan tersebut menyerukan tindakan segera untuk mencegah dan mengurangi kekerasan terhadap anak. Laporan juga menyerukan penyediaan perawatan medis untuk korban pelecehan anak dan peningkatan advokasi untuk hak asasi manusia.

Laporan tersebut lebih lanjut merekomendasikan pembentukan skema bantuan hukum peradilan anak di negara Afrika timur. [Xinhua/U-5]

Bantu Guru di Daerah 3T, Kemdikbud Kirim 2.000 Mahasiswa

Pengamat: Pilih Kampus yang Kredibel

[JAKARTA] Untuk membantu para guru di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T) selama masa pandemi Covid-19, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) akan menerjunkan mahasiswa dari Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Mereka akan menjadi asisten para guru di daerah 3T lewat program Kampus Mengajar Perintis yang akan diluncurkan pada 21 September mendatang.



ANTARA/INDRAYADI TH

Anak-anak menelepon guru saat belajar di Kampung Gudang Garam, Skanto, Keerom, Papua, Kamis (27/8). Menurut Mumaya Kogoya selaku Bamuskam Gudang Garam, sebanyak 50-an anak tingkat Sekolah Dasar (SD) di Kampung Gudang Garam tak mengenal belajar daring, melainkan buku panduan yang akan dikonfirmasi via telepon seluler.

Wakil Sekjen Federasi Guru Indonesia (FSGI), Satriwan Salim, mengapresiasi program Kampus Mengajar Perintis yang melibatkan LPTK. Selain LPTK negeri, ia menyarankan pemerintah juga melibatkan LPTK swasta untuk menjangkau sekolah di daerah 3T. Namun, ia meminta agar LPTK swasta yang dilibatkan diberi persyaratan akreditasi minimal B agar mahasiswa tersebut benar-benar memiliki kemampuan pedagogi yang baik.

Selain itu, Satriwan juga menyoroti kriteria mahasiswa. Kemdikbud harus memperhatikan jumlah SKS yang sudah ditempuh mahasiswa yang dilibatkan dalam program ini. Menurut Satriwan, sebaiknya yang berpartisipasi adalah mahasiswa semester 5 atau 7.

"Saya pikir harus ada syarat minimal SKS ditempuh oleh mahasiswa tersebut untuk mengikuti program Kampus Mengajar Perintis," ujarnya kepada *SP*, Minggu (6/9).

Selanjutnya, Satriwan mengatakan, meski pun kegiatan tersebut masuk dalam hitungan SKS mahasiswa, Kemdikbud harus tetap memfasilitasi semua kebutuhan mahasiswa selama mengabdi di daerah 3T. Mulai dari menyiapkan tempat tinggal sementara hingga akomodasi lainnya.

"Jangan membuka program ini kalau mahasiswa menyiapkan biaya sendiri. Walaupun masuk SKS, tapi ini kan program negara. Jangan sampai mahasiswa sudah berkorban mengajar jauh, tetapi mereka tidak diberikan apresiasi, hanya sekadar SKS saja," ucapnya.

Oleh karena itu, Satriwan menambahkan, apabila program Kampus Mengajar Perintis hanya sekadar untuk pemenuhan SKS, maka kegiatan ini tidak berbeda dengan kuliah kerja nyata (KKN) mahasiswa tingkat akhir yang telah ada dan dijalankan mahasiswa selama ini.

Selanjutnya, Satriwan menilai, syarat merekrut mahasiswa dari LPTK terdekat dengan daerah 3T sulit terwujud. Pasalnya, keberadaan LTPK di daerah 3T sangat minim. Selain itu, LPTK saat ini terdiri dari berbagai macam kasta atau akreditasi. Untuk itu, Satriwan mengingatkan agar Kemdikbud jeli dalam memilih LPTK.

"Jangan memberi program ini kepada LPTK yang tidak jelas karena ada juga LPTK yang proses pembelajarannya tidak jelas. Jadi harus LTPK yang kredibel dan memiliki integritas," ucapnya.

Komunitas

Sebelumnya, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Sesditjen Dikti), Paristiyanti Nurwardani mengatakan, pihaknya akan mengirim 2.000 mahasiswa LPTK ke daerah 3T. Semua mahasiswa itu saat ini berada di posisi terdekat dengan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang mempunya akreditasi C atau tidak terakreditasi di daerah 3T.

"Jadi kita menurunkan lebih kurang 60% hingga 70% mahasiswa dari LPTK semester lima ke atas dengan indeks prestasi kumulatif di atas tiga untuk menjadi asisten guru," kata Paris saat berdialog dengan media di Jakarta, Sabtu (5/9).

Paris menuturkan, hal ini akan mendekatkan calon guru dengan komunitasnya. Skema tersebut merupakan bagian dari kebijakan Kampus Merdeka yang diimplementasikan. Bahkan, Kampus Merdeka Perintis ini juga bagian dari kerja sama Kemdikbud dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Kemudian, ia melanjutkan, mahasiswa LPTK ini akan dibekali dengan modul *print out*. Modul tersebut dipersiapkan untuk semester ganjil tahun ajaran 2020/2021 yang akan dibagikan kepada guru dan siswa di daerah 3T.

Karena program tersebut merupakan bagian dari kebijakan Kampus Merdeka, maka selama mahasiswa menjadi asisten guru, mereka diwajibkan untuk membuat laporan. Adapun manfaat dari laporan tersebut adalah akan dihitung dalam sistem kredit semester (SKS). [FAT/D-10]

Menjaga Kebersihan Wisata Bromo



ANTARA/UMARUL FARUQ

Warga membawa kantong plastik saat membersihkan lingkungan lautan pasir Gunung Bromo, Probolinggo, Jawa Timur, Minggu (6/9). Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggelar gerakan Bersih, Indah, Sehat dan Aman (Bisa) yang bertujuan untuk mendorong pemulihan sektor pariwisata dan mengedukasi insan pariwisata agar tetap menggeliat meski di tengah pandemi Covid-19.

400.000 Mahasiswa Diterjunkan untuk Bantu Pemulihan Ekonomi

[JAKARTA] Untuk membantu pemulihan perekonomian bangsa yang sedang terpuruk akibat Covid-19, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Ditjen Dikti Kemdikbud) telah menyiapkan skema Merdeka Belajar: Kampus Merdeka terbaru. Lewat skema ini, Ditjen Dikti akan menerjunkan 400.000 mahasiswa untuk membangun daerahnya masing-masing.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Sesditjen Dikti), Paristiyanti Nurwardani mengatakan, kehadiran mahasiswa ini bertujuan untuk membantu negara melakukan identifikasi masalah dan mencari solusi. Salah satunya mengetahui produk jasa apa yang dapat membantu daerah tersebut bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi. Pasalnya, untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi dari minus delapan ke plus lima tidak mudah.

"Kampus Merdeka akan turun untuk memenangkan melawan Covid-19 dengan mempercepat akselerasi pertumbuhan ekonomi," kata Paris dalam dialog dengan media di Jakarta, Sabtu (5/9).

Paris menuturkan, harus ada kolaborasi dan kerja sama dari berbagai pihak. Untuk itu, selain terjunkan mahasiswa ke daerah, Ditjen Dikti juga akan meluncurkan platform daring untuk *pentahelix* pada 24 September mendatang.

Platform tersebut diberi nama "Kedai Reka" tersebut merupakan tempat untuk mempertemukan akademisi, pengusaha, komunitas, pemerintah, dan media sebagai proses hilirisasi inovasi perguruan tinggi. Tujuannya adalah agar Kampus Merdeka diberikan wadah yang baik sehingga tidak butuh waktu terlalu lama untuk mempertemukan inventor dari sisi perguruan tinggi dan investor dari sisi pengusaha untuk mengimplementasikan Kampus Merdeka.

"Saya sangat yakin ini bisa dilakukan dengan baik, mari kita dorong bersama-sama transformasi perguruan tinggi ini melalui Kampus Merdeka agar pergerakan ekonomi Indonesia segera membaik," ucapnya.

Membantu

Paris menambahkan, adanya *pentahelix* juga membantu mahasiswa yang kesulitan mencari tempat magang. Pasalnya, sejak awal perguruan tinggi telah menjalin komunikasi sehingga mahasiswa bisa magang di dunia industri.

Paris menuturkan, segala bentuk kegiatan mahasiswa di luar kampus atau program studi (prodi) konsentrasi dengan keterangan lengkap dihitung sebagai bagian dari pemenuhan satuan kredit semester (SKS) sesuai dengan konsep Kampus Merdeka yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020.

Melalui Kampus Merdeka, lanjut Paris, kampus harus memberikan kesempatan kepada mahasiswa dan juga memfasilitasi untuk mencapai *learning outcome* yang diinginkan mahasiswa itu.

"Jadi jika mahasiswa itu ingin menjadi seorang Bioteknolog dan juga ingin menjadi pengusaha misalnya, maka selain belajar tentang Bioteknologi, ia juga akan belajar bagaimana menjadi pengusaha yang baik," ujar Paris.

Selanjutnya, ia menuturkan, Kemdikbud saat ini sedang membuat enam modul pembelajaran untuk meningkatkan perekonomian bangsa sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020. Diketahui RPJMN 2020 fokus pada agri dan agro bisnis, pariwisata, kesehatan, *e-commerce*, dan ekspor tenaga kerja berketerampilan yang akan dibentuk menjadi prodi. [FAT/D-10]

Mensos: Stok untuk Bansos Beras Aman

[JAKARTA] Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara memastikan stok beras untuk bantuan sosial beras bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) hingga Oktober mendatang aman.

"Stok beras di Bulog aman untuk memenuhi memenuhi kebutuhan 10 juta KPM PKH yang akan menerima total sebanyak 15 kg per KPM per bulan mulai Agustus, September, dan Oktober," kata Mensos, Minggu (6/9).

Juliari menjelaskan penyaluran dilakukan dua kali, yaitu 30 kg per KPM di bulan September dan 15 kg per KPM di bulan Oktober.

Ia mengatakan, sinergi Kemsos dengan Perum Bulog dalam bansos beras tidak sekadar dipahami dalam skema jaring pengaman sosial saja.

"Bansos beras membantu mendorong distribusi stok beras di gudang-gudang Bulog. Selanjutnya Bulog bisa menyerap beras petani, dan seterusnya. Dengan demikian, kesejahteraan petani juga bisa ikut terangkat," katanya.

Bansos beras adalah salah satu program Jaring Pengaman Sosial (JPS) merupakan bentuk upaya pemerintah yang terus memberikan inovasi dan solusi untuk menghadapi masalah-masalah sosial yang timbul akibat Covid-19.

Sinergi

Program ini merupakan hasil sinergi antara Kemsos dengan Perum Bulog sebagai cara untuk menyerap hasil panen para petani lokal.

Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Edi Suharto juga menjelaskan bahwa Kemsos bertanggung jawab untuk memastikan kualitas berasnya baik dan layak konsumsi.

"Kita memastikan kualitas berasnya, sehingga tidak ada beras yang lama dan rusak. Ini harus diperhatikan betul dimulai dari sini, pengemasan dan pendistribusian. Untuk itu, pengecekan ke gudang-gudang Bulog juga harus kita lakukan," ucap Edi.

Tujuan dari diluncurkannya bantuan sosial beras adalah untuk mengurangi beban pengeluaran KPM PKH khususnya dalam memenuhi kebutuhan pangan berupa beras untuk kebutuhan sehari-hari selama pandemi Covid-19.

Setelah melalui proses pengemasan di Gudang Bulog, bansos beras tersebut akan dikirimkan dengan menggunakan transporter untuk disalurkan langsung ke rumah-rumah sampai ke KPM PKH. Transporter yang ditunjuk untuk program ini adalah PT. Bhanda Ghara Reksa (BGR) dan PT. Dos Ni Roha (DNR). [Ant/D-10]



ANTARA/MUHAMAMD BAGUS KHOIRUNAS

Pekerja mengemas beras di Gudang Bulog Subdivre Lebak-Pandeglang di Lebak, Banten, Kamis (3/9). Bulog Subdivre Kabupaten Lebak-Pandeglang menyatakan sebanyak 129.794 keluarga penerima manfaat program keluarga harapan (KPM-PKH) di dua kabupaten tersebut akan menerima bansos beras Bulog kualitas medium dari Kementerian Sosial hingga Oktober 2020.

Kilas Kesra & Budaya

Bintang Baru di Sekuel *Dealova*

Sudah 15 tahun berlalu, kisah cinta segitiga antara Kara, Ibel dan Dira dalam film *Dealova*, akhirnya dilanjutkan dengan sekuel *Dealova 2*. Demi memberi kesegaran baru, sekuel ini menghadirkan bintang yang lebih muda yaitu Dikta Wicaksono yang lebih dikenal sebagai vokalis Yovie & Nuno.

Tidak sendiri, dua bintang muda lainnya yaitu Harris Vriza dan Givina, tampil sebagai bentuk regenerasi trio Jessica Iskandar, Evan Sanders dan Ben Joshua. Produksi Film dikerjakan oleh rumah produksi Capo dei Capi Films bekerja sama dengan pemilik IP (Intellectual Property) sebenarnya telah disiapkan sejak bulan Desember 2019, dan mulai produksi pada tanggal 6 April 2020. Namun karena pandemi Covid-19, terpaksa mundur hingga akhir Agustus dan selesai pada 23 September 2020.

Pihak Capo dei Capi Films dalam rilis yang diterima *SP*, Minggu (6/9), mengatakan proses produksi dilakukan dengan protokol kesehatan standar yang telah ditentukan oleh pemerintah, asosiasi-asosiasi produser dan WHO. Seluruh kru dan pemain film telah melakukan serangkaian proses pemeriksaan kesehatan sebelum kemudian masuk ke lokasi-lokasi produksi yang telah ditentukan. Nantinya, film *Dealova 2* diperkirakan akan tayang pada akhir tahun 2021 atau awal 2022. Namun sampai saat ini, pihak studio masih belum memikirkan saluran distribusi alternatif yang tepat untuk perilisan film mendatang. [DFA/A-23]

Joe Taslim Berburu Kenyamanan

Tidak ada salahnya berburu kenyamanan di tengah kondisi mencekam pandemi Covid-19. Hal itulah yang dilakukan Joe Taslim demi memanjakan keluarga tercintanya. Joe Taslim tidak segan-segan berburu tempat tinggal yang sempurna bagi istri dan tiga anaknya.

Dikutip dari siaran pers, Minggu (6/9), Joe Taslim mengaku sangat sabar dalam mencari tempat tinggal. Untungnya kesabaran itu sudah berbuah manis. Ia berhasil mendapatkan tempat tinggal yang sempurna bagi keluarga di Elevee Penthouses & Residences, Alam Sutera.

Khusus untuk hunian sempurnanya, Joe Taslim juga memiliki syarat yang ketat, yakni modern, keamanan 24 jam, dan fasilitas untuk tumbuh kembang anak lengkap.

Ditambahkan Joseph Sanusi Tjong selaku President Director Alam Sutera, pilihan Joe Taslim sebenarnya mewakili setiap keluarga modern. Faktanya, di tengah kondisi pandemi Covid-19, semua keluarga ingin tinggal di lokasi yang nyaman, aman, dan terjamin kesehatannya. [PR/A-23]

Dua hari, 400 Tiket Bioskop *Drive-in* Ludes Terjual

[JAKARTA] Bioskop *drive-in* Skylight Cinema sukses menghibur penonton yang rindu mencari hiburan dengan menonton bersama keluarga di luar rumah. Terbukti selama dua hari kemarin, bioskop *drive-in* yang berlokasi di kawasan Senayan Park ludes menjual 408 tiket.



ISTIMEWA

Petugas memeriksa kondisi suhu tubuh penonton sebelum memasuki area Skylight Cinema yang berlokasi di kawasan Senayan Park, Jakarta, Minggu (6/9).

Pada hari pertama, Sabtu (5/9), 204 tiket terjual untuk film Milly & Mamet dan Cek Toko Sebelah. Sementara pada Minggu (6/9), 204 tiket kembali terjual untuk film Susah Sinyal dan Critical Eleven. Keempat film Indonesia yang terpilih ini sebelumnya sudah pernah tayang di bioskop sebelum pandemi Covid-19 melanda Indonesia.

Marketing Communication Manager Senayan Park, M Ardi Rukmawan, saat dihubungi SP, Minggu (6/9), mengatakan sejak awal pengumuman bioskop *drive-in* dibuka, tiket dua hari pertama langsung habis terjual.

"Kita melihat animo masyarakat besar, karena memang mereka merindukan hiburan nonton di layar lebar seperti bioskop. Kemudian, *drive-in cinema* ini juga menawarkan pengalaman baru bagi masyarakat Jakarta. Tidak hanya menawarkan hiburan, tetapi juga memperhatikan protokol kesehatan yang ketat," terang Ardi.

Diakui, 6 bulan sudah masyarakat Indonesia tidak mendapat kesempatan untuk pergi menonton film di bioskop. Demi mengobati rasa rindu tersebut Skylight Cinema memutuskan untuk membua dua studio terbuka di area Pulau Satu dengan kapasitas 38 mobil dan parkir area berkapasitas 67 mobil.

Ardi pun menjelaskan, Skylight Cinema menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku, antara lain pengecekan suhu tubuh dengan batas maksimal adalah 37,3 celsius.

Kemudian, pihak penyelenggara juga mewajibkan penggunaan masker, *hand sanitizer*, penyemprotan desinfektan pada mobil pengunjung hingga pengunjung tidak diperkenankan untuk turun dari mobil selama film berlangsung.

"Tidak lupa, kami juga tidak memperkenankan anak-anak di bawah usia 9 tahun dan orang tua di atas usia 50 tahun untuk memasuki area Skylight Cinema. Kami lebih menargetkan *drive-in cinema* ini untuk kalangan remaja," ungkapnya.

Dengan demikian, segmentasi penonton pada akhirnya memengaruhi jenis-jenis film yang tiap harinya akan ditayangkan oleh Skylight Cinema. Nantinya, Skylight Cinema akan bekerjasama dengan rumah produksi Starvision untuk penayangan film lokal, dan Cinepolis untuk penayangan film internasional.

"Kami tidak ada film anak dan keluarga. Semua film remaja dengan genre drama, komedi, aksi dan *thriller* yang seluruhnya pernah ditayangkan di bioskop. Meski bukan film baru, tetapi tetap tidak mengurangi keseruan selama menonton di Skylight Cinema," terangnya.

Tidak hanya film Indonesia yang sudah tayang di dua hari pertama, mendatang film-film Hollywood juga diputar seperti *Hereditary, The Gentlemen, 24 Hours to Live*, dan *Bad Moms*.

Online

Demi menunjang pengalaman menonton yang seru sekaligus aman dengan menerapkan protokol kesehatan, Skylight Cinema dilengkapi dengan *giant screen* berukuran 18,8 x 8 meter dengan frekuensi suara dari 108Mhz hasil kerja sama dengan MRA Media.

Penonton yang ingin menikmati sensasi menonton di dalam mobil cukup melakukan pembelian tiket melalui aplikasi Go-Tix dan Loket.Com dengan biaya Rp 150.000 per mobil dengan kapasitas maksimal 4 orang pada hari biasa. Sementara pada Sabtu dan Minggu harga tiket per mobil dengan kapasitas maksimal 4 orang adalah Rp 200.000. Khusus untuk jadwal tayang, setiap harinya hanya pada pukul 18.30 WIB dan 21.30 WIB.

Ditambahkan Josef Lumbantobing selaku Mall Director Senayan Park (SPARK), hadirnya Skylight Cinema di area terbuka Senayan Park dapat memenuhi keinginan masyarakat untuk menonton bioskop di area terbuka, dengan menggunakan mobil pribadi sehingga penonton tidak perlu khawatir terpapar Covid-19. [DFA/A-23]

Bangkitkan Pariwisata dengan Menerapkan Protokol Kesehatan



ISTIMEWA

Imbauan gerakan memakai masker dan mematuhi protokol kesehatan dipasang di beberapa lokasi wisata di kawasan Banyuwangi, Jawa Timur.

Membangkitkan sektor pariwisata harus sejalan dengan kampanye protokol kesehatan di era adaptasi kebiasaan baru. Kini, beberapa tempat pariwisata bahkan gencar mempromosikan gerakan pakai masker (GPM) dan gerakan bersih, indah, sehat, dan aman (BISA) demi menarik wisatawan domestik dan mancanegara.

Seperti yang terlhat di tiga destinasi unggulan di Jawa Timur, GPM dan BISA menjadi protokol wajib untuk siapa saja yang datang ke kawasan Pantai Pulau Santen di Banyuwangi, Taman Wisata Air Wendit di Kabupaten Malang, dan Puncak Seruni yang berada di Kabupaten Probolinggo.

Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemparekraf R Kurleni Ukar mengatakan masyarakat sejak awal diajarkan secara daring dan luring tentang GPM dan gerakan BISA. Dua gerakan ini dilaksanakan sebagai upaya implementasi amanat Presiden Joko Widodo untuk mengajak para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif menjaga kebersihan dan kelestarian alam, untuk meningkatkan nilai kebersihan dalam *travel and tourism competitiveness index* (TTCI).

"Kegiatan ini untuk mengajak masyarakat, terutama pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif agar membangkitkan kembali nilai-nilai sapta pesona yaitu aman, tertib, sejuk, indah, ramah tamah, dan kenangan," kata Kurleni dilansir dari siaran pers, Minggu (6/9).

Kurleni Ukar juga berharap gerakan ini dapat menciptakan rasa aman dan membangkitkan kepercayaan wisatawan untuk berkunjung ke destinasi wisata di Tanah Air. "Dengan memakai masker, kita bisa mencegah penyebaran Covid-19 dan virus-virus lainnya yang bisa saja ada di dalam tubuh kita," katanya.

Senada dengan Kurleni, Ketua Komunitas GPM Sigit Pramono menuturkan, masker adalah senjata untuk memerangi penyebaran virus. Masker adalah pelindung semua orang karena Covid-19 belum ada obatnya.

Selain itu, Sigit juga menekankan pentingnya penggunaan masker bagi wisatawan dan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai upaya mengembalikan kepercayaan wisatawan. "Dengan mengenakan masker dan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin kita bisa membangkitkan kepercayaan wisatawan bahwa Indonesia adalah negara yang bersih dan aman dari Covid-19," ujarnya.

Ketat

Tidak hanya di Jawa Timur, penerapan protokol kesehatan *cleanliness, health, safety, and environmental sustainability (CHSE) juga diterapkan ketat di* wisata super prioritas Labuan Bajo. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemparekraf Hari Santosa Sungkari menjelaskan, penerapan CHSE harus dilaksanakan dengan benar dan disiplin sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Khususnya bagi para pelaku usaha maupun konsumen di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

"Kesiapan destinasi dan para pelaku parekraf menjadi hal yang penting bagi destinasi dan pelaku parekraf. Kita harus berpikir bagaimana kita bisa *rebound*. Saat ini pola kunjungan wisatawan sudah berubah tidak hanya melihat keindahan dan lokasi hotel hingga destinasi saja, namun juga memperhatikan keamanan dan kesehatan," ujarnya.

Sementara dalam laporan Direktur Pengembangan Destinasi Regional II Kemparekraf Wawan Gunawan menjelaskan, tujuan dari kegiatan Sosialisasi CHSE Desa Wisata di destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo yaitu meningkatkan kualitas perlindungan kesehatan, keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang pariwisata. [A-23]

Pentas Sendratari *Ramayana* Sukses Digelar Daring

[YOGYAKARTA] Pertama kalinya, sendratari *Ramayana* digelar secara daring di Prambanan, Sabtu (5/9). Pentas perdana ini berlangsung sukses atas kerja sama PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero), Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Mumbai, dan didukung oleh KBRI New Delhi serta Kementerian Luar Negeri.



ISTIMEWA

PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko bekerja sama dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Mumbai, di dukung oleh KBRI New Delhi serta Kementerian Luar Negeri RI kembali melangsungkan pentas perdana daring Sendratari Ramayana Prambanan, Sabtu (5/9).

Pentas ini sekaligus digelar untuk memperingati hubungan bilateral India-Indonesia yang telah berlangsung selama 71 tahun.

General Manager Teater Pentas Ramayana, Chrisnamurti Adiningrum mengatakan, pertunjukan ini disaksikan 35.000 penonton baik dari dalam negeri maupun luar negeri, melalui kanal YouTube @BorobudurPark. Selain itu, pertunjukan daring ini juga disaksikan oleh ratusan warga India melalui aplikasi *zoom*.

Dikatakan, pertunjukan dilakukan dengan komposisi 60 penari dan 20 pemain gamelan. Pertunjukanberlangsung selama kurang lebih 60 menit di Open Teater Ramayana.

"Bisa dibilang ini adalah pertunjukan pertama pascapandemi Covid-19 di sini," kata Chrisnamurti.

Penyesuaian

Ditegaskan Chrisnamurti, pertunjukan yang telah terselenggara sejak 1961 ini, dikemas dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19, seperti penggunaan *face shield* yang dikenakan setiap penari, serta adanya penyesuaian gerakan tari, terutama pada bagian kontak tubuh antar penari.

Pemeran tokoh Shinta, Tutu Wisti Sabila menyatakan, walau tidak ada sentuhan, namun *chemistry* tetap terbangun, lewat tatapan mata atau gestur tubuh.

Diakui Tutu, pentas kali ini memang berbeda, namun tetap mempertahankan pakem tata tari Ramayana. Hanya saja, jumlah penari dibatasi, sesuai dengan protokol kesehatan.

Sementara itu, Direktur Pemasaran dan Pelayanan PT TWC Hetty Herawati menerangkan bahwa pihaknya terus berkomunikasi dengan Gugus Tugas Provinsi DIY dalam hal pembukaan pentas Sendratari Ramayana.

"Intinya kita terus melihat perkembangan. Jika pun masih belum baik, setidaknya momen ini dapat menyalurkan energi para seniman berbakat ini untuk kembali menari. Karena bagi mereka, menari merupakan sumber semangat," ujarnya. [152]

Jawara di *Box Office*, *Tenet* Raih Untung US$ 100 Juta

[JAKARTA] FIlm terbaru Christopher Nolan *Tenet menjadi jawara di kancah box office dengan keuntungan* melampaui US$ 100 juta pada akhir pekan lalu. Dikutip *Variety,* Minggu (6/9), Tiongkok menjadi penyumbang keuntungan terbesar Tenet, yakni US$ 20 juta, hanya pada akhir pekan lalu.



ISTIMEWA

"Tenet" garapan Christopher Nolan merajai "box office" global dengan keuntungan US$ 100 juta.

Bagi, Nolan, angka US$ 100 juta bisa dibilang sangat standar, mengingat hampir semua film garapannya selalu sukses di pasar internasional. Namun, di tengah pandemi Covid-19 ini, angka US$ 100 juta terbilang fantastis.

Diakui Nolan, kehadiran *Tenet* seakan menunjukkan tanda-tanda hidupnya lagi layar lebar setelah menghadapi krisis karena pandemi. Tak lama lagi, *Tenet* juga dirilis di AS pada minggu ini, tetapi tidak akan diputar di pasar utama seperti Los Angeles dan New York City, di mana bioskop tetap ditutup karena virus Covid-19.

Sementara pada posisi kedua, ada film perang sejarah Tiongkok, *The Eight Hundred*. Film lainnya yang juga menarik perhatian pasar di Amerika Serkat adalah *The New Mutants*. *Film ini* meraup untung US$ 800.000 pada Jumat (4/9), sehingga total pendapatan film *superhero* itu menjadi US$ 9,5 juta. [Ant/A-23]

Kilas Nusantara

5 Sungai Meluap, Banjir di Landak

Sebanyak lima sungai meluap setelah hujan dengan intensitas tinggi terjadi dalam beberapa hari terakhir di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Hal ini menyebabkan banjir dan tanah longsor di wilayah tersebut. Kelima sungai yang meluap tersebut meliputi Sungai Behe, Sungai Dait, Sungai Landak, Sungai Menyuke dan Sungai Meranti setelah hujan melanda dari Jumat (4/9) hingga Sabtu (5/9), menurut keterangan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Minggu (6/9).

Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Raditya Jati mengatakan, dalam keterangannya bahwa laporan dari BPBD Kabupaten Landak menyatakan banjir telah merendam 12 desa di enam kecamatan pada Minggu pukul 10.24 WIB. Desa-desa yang terdampak berada di Kecamatan Meranti, Kecamatan Menjalin, Kecamatan Banyuke Hulu, Kecamatan Menyuke, Kecamatan Kuala Behe dan Kecamatan Air Besar.

Banjir dengan ketinggian sekitar 80-110 sentimeter (cm) menggenangi sedikitnya 416 rumah yang dihuni 416 kepala keluarga. Selain itu, satu unit rumah dilaporkan rusak sedang dan tiga rumah lainnya mengalami rusak ringan akibat longsor. BPBD Kabupaten Landak beserta tim gabungan dari berbagai instansi sampai saat ini telah berupaya membuka jalur terdampak banjir dan longsor menggunakan alat berat di Desa Semunti, Kecamatan Air Besar. Pendistribusian logistik dan evakuasi warga dengan perahu juga telah dilakukan BPBD Kabupaten Landak. Aktivasi posko darurat bencana juga telah dilakukan oleh tim setempat. [Ant/L-9]

Kemsos Bantu Siswa Kesulitan Belajar Daring di Garut

[GARUT] Kementerian Sosial (Kemsos) bersama Oase Kabinet Indonesia Maju baru-baru ini memberikan bantuan gawai berupa laptop dan *smartphone*, serta sejumlah peralatan sekolah, untuk seorang siswa tak mampu di Desa Jati, Kecamatan Tarogong Kaler, Garut, Jawa Barat. Bantuan diberikan setelah ramai berita mengenai orang tua siswa yang tertangkap mencuri *smartphone* untuk memenuhi kebutuhan belajar daring sang anak.

Penasihat Dharma Wanita Kemsos, Grace Juliari Batubara didampingi Kasubdit AMPK Direktorat Rehabsos Anak Kemsos, Cupsanto bersama Kepala Balai Anak "Handayani" Jakarta, Neneng Heryani pada Rabu (2/9) lalu datang ke Kabupaten Garut untuk memberikan bantuan gawai tersebut. Sebab, kisah mengenai orang tua siswa yang mencuri *smartphone* demi anaknya agar bisa belajar secara daring disebut sangat memprihatinkan.

"Itu sangat menyentuh sekali. Karenanya, saya ke Garut, saya sempatkan untuk memberikan bantuan dari Kemsos dan Oase Kabinet Indonesia Maju," kata istri Menteri Sosial Juliari P Batubara ini.

Ia menyebutkan, bantuan yang diberikan kepada siswi berinisial S (13) kelas 7 di salah satu Mts di Kabupaten Garut, berupa laptop dari Oase Kabinet Indonesia Maju. Selain itu, siswi itu juga diberikan bantuan berupa *smartphone* dan sejumlah perlengkapan sekolah dari Kemsos.

Selain itu Penasihat Dharma Wanita Kemdikbud Franka Nadiem Makarim menyampaikan, pihaknya akan membantu S untuk memperoleh bantuan kuota internet untuk beberapa bulan ke depan.

Kemsos juga akan terus melakukan monitoring demi mendukung dan membantu keperluan pembelajaran bagi S. Selain itu, Kemsos akan mencoba mencari solusi bagi permasalahan siswa-siswi lainnya yang juga mengalami kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran secara daring.

Sementara itu, A (41) ayah S mengaku, sangat senang menerima bantuan dari Kemsos. Menurut dia, bantuan gawai itu sangat berguna untuk anaknya belajar secara daring. "Kita sangat bahagia ada bantuan," kata dia, Minggu (6/9).

Ia mengaku khilaf mengambil *smartphone* milik kerabatnya. Rencananya, telepon pintar itu akan diberikan ke anaknya untuk belajar. Sebab, ketika itu anaknya selalu meminta agar dibelikan *smartphone* karena sudah tertinggal materi pelajaran dibandingkan teman-temannya. [Ant/L-9]

Jasa Penyewaan Kuda di Bromo



ANTARA FOTO/UMARUL FARUQ

Pemilik kuda mengantarkan pengunjung berkuda di lautan pasir Gunung Bromo, Probolinggo, Jawa Timur, Minggu (6/9). Meskipun aktivitas wisata di Gunung Bromo sudah dibuka sejak (28/8) setelah tutup selama enam bulan sejak Maret 2020, para pemilik kuda mengeluhkan sedikitnya pendapatan karena pembatasan pengunjung.

Pilkada Serentak

Petahana Pecah Kongsi di Pilkada Karawang



ANTARA/ALI KHUMAINI

Wakil Bupati Karawang Ahmad Zamakhsyari (kiri) maju di Pilkada Bupati Karawang bersama pasangannya Yusni Rinzani.

[BANDUNG] Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karawang, Jawa Barat (Jabar), akhirnya resmi menutup pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Karawang, Minggu (6/9). Pilkada di Karawang ini menandai pecah kongsi (putus hubungan kerja sama) antara petahanan Bupati Karawang yang kembali maju lagi di pilkada dengan wakilnya.

Ahmad yang menggandeng Yusni Rinzani menjadi calon terkhir yang mendaftar ke KPU Karawang. Mereka diusung parpol, PKB, Gerindra, dan Hanura. Ketua KPU Kabupaten Karawang Miftah Farid mengatakan, masa pendaftaran sudah dibuka sejak 4 September 2020. Pendaftaran terbuka bagi bakal pasangan calon yang mendapatkan dukungan dari parpol atau koalisi parpol dengan minimal 10 kursi di DPRD.

"Pemeriksaan kesehatan rencananya tanggal 8-9 September di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta," kata Miftah, Minggu.

Pasangan terakhir Ahmad-Yusni memiliki modal 16 kursi, masing-masing PKB (7 kursi), Gerindra (8 kursi), dan Hanura (1 kursi). Dengan kehadiran pasangan ini, berarti tidak ada lagi parpol yang belum menyalurkan dukungannya untuk Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Karawang.

Bupati petahana, Cellica Nurrchadiana menggandeng Aep Syaepuloh sebelumnya telah mendaftar ke KPU setempat pada Jumat (4/9). Pasangan ini mengantongi modal dukungan paling besar yaitu 24 dari 50 kursi di DPRD Karawang. Masing-masing dukungan dari Demokrat (9 kursi), Golkar (7 kursi), PKS (6 kursi), serta Nasdem (2 kursi).

Sementara pasangan lainnya adalah Yesi Karya Lianti dan bintang sinetron Ahmad Adly Fayruz, yang mendapatkan dukungan dengan jumlah minimal gabungan suara parpol atau 10 kursi. Empat partai pengusung pesinetron Cinta Fitri itu adalah PDI-P (6 kursi), PBB (2 kursi), PPP, dan PAN masing-masing 1 kursi di DPRD Kabupaten Karawang.

Miftah mengungkapkan, pihaknya sudah meneliti dan mengecek satu per satu berkas persyaratan pencalonan dan berkas pencalonan masing-masing kandidat. Semuanya dinyatakan lengkap termasuk syarat pemeriksaan Covid-19 menggunakan *metode polymerase chain reaction* (PCR) yang semuanya negatif.

"Perlu disampaikan, dalam proses pencalonan akan dilaksanakan pemeriksaan kesehatan. Untuk masuk ke tahap tersebut, harus negatif Covid-19. Apabila positif harus diisolasi terlebih dahulu," ujar Miftah.

Selanjutnya KPU akan mengumumkan pasangan calon itu lolos atau tidak pada 23 September. Sehari setelahnya digelar pengundian nomor urut pasangan calon. Tanggal 26 September memasuki tahapan kampanye.

Pasangan Terakhir

Sementara pasangan Nasrul Ulum-Eki Baihaki yang diusung Partai Demokrat dan Gerindra menjadi pendaftar terakhir di KPU Kabupaten Serang, Banten. Pasangan ini sebagai penantang pasangan petahana Ratu Tatu Chasanah-Pandji Tirtayasa (Tatu-Pandji) yang didukung 10 parpol.

Sama seperti pasangan Tatu-Pandji, pasangan Nasrul-Eki melakukan doa bersama dan menggelar deklarasi dengan parpol pendukung sebelum mendaftarkan diri di KPU Serang.

Dalam orasi yang dilakukan pada saat deklarasi di Lapangan Margagiri, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Minggu, Nasrul Ulum mengaku akan menaikkan honorarium bagi guru ngaji dan ketua RW maupun RT.

"Honor guru ngaji dinaikkan dua kali lipat. Karena katanya, kalau honor RT/RW dihapus itu bohong. Kalau kita jadi bupati, itu akan di naikkan dua kali lipat," kata calon Bupati Serang, Nasrul Ulum.

Dia juga berjanji akan memberikan bantuan subsidi bagi supir angkot, ojek online (ojol) hingga ojek pangkalan (opang). Kemudian bagi ibu hamil, akan diberikan bantuan gizi selama sembilan bulan.

"Sebagai pemimpin program itu tidak boleh tebang pilih, harus merata. Ibu hamil dan kandungannya akan kita jamin gizinya selama sembilan bulan, subsidi sopir angkot dan opang sebesar Rp 200.000 per bulan, voucher pajak roda dua bagi ojol," jelasnya.

Ketua DPD Demokrat Banten, Iti Octavia Jayabaya, mengimbau agar masyarakat tidak termakan kabar hoaks seperti akan menghapuskan bantuan sosial, bantuan langsung tunai hingga perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH).

Sementara di Surabaya, pasangan Machfud Arifin-Mujiaman Sukirno, mendaftarkan diri sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya ke KPU Surabaya, Minggu sore. Pasangan ini diusung 8 dari 10 parpol di DPRD Surabaya yakni, PKB, Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, Nasdem, PAN dan PPP dengan total 31 kursi di DPRD Surabaya.

Hanya ada dua pasangan bakal calon yang bertarung di Pilkada Surabaya. Satu pasangan lainnya Eri Cahyadi-Armuji diusung PDI-P dan PSI, sudah mendaftar Jumat. [TG/ARS/153/149]

Besan Jokowi Mundur dari Pencalonan Pilkada Tapsel

[MEDAN] Besan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni Doli Sinomba Siregar yang sebelumnya berpasangan dengan M Yusuf Siregar di Pilkada Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, menyatakan mundur diri pencalonan bupati Tapsel pada 9 Desember mendatang.

Padahal, berdasarkan data yang diperoleh *SP*, Minggu (6/4), Doli yang merupakan saudara kandung Ade Hanifah Siregar, ibu kandung Bobby Afif Nasution (menantu Jokowi yang juga maju di pemilihan wali kota Medan), sudah memenuhi persyaratan untuk maju dalam pilkada.

Pasangan Doli Sinomba-Yusuf Siregar didukung oleh Partai Nasdem dan Hanura dengan total 8 kursi di DPRD Tapsel. Jumlah ini sudah memenuhi persyaratan pencalonan minimal dari 7 kursi parpol.

Pengunduran diri Doli yang dinilai mendadak membuat heboh masyarakat dan viral di media sosial. Namun paman Bobby Nasution ini mengaku melakukan ini karena permintaan dari keluarganya yang menetap di Jakarta.

Doli mundur dari bursa pilkada atas kesadaran diri sendiri dan tanpa adanya tekanan maupun intervensi dari pihak manapun.

"Kepada seluruh masyarakat Tapsel, pendukung, simpatisan, handai taulan dan tokoh-tokoh yang ada di Tapsel, terutama kepada partai-partai pengusung. Perlu saya



ANTARA FOTO/SEPTIANDA PERDANA

Menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Afif Nasution (kanan) bersama pamannnya Doli Sinomba Siregar (tengah) saat mengembalikan berkas formulir pendaftaran pencalonan sebagai bakal calon Wali Kota Medan, di DPD Partai Golkar Medan, 13 Desember 2019 lalu. Doli Sinomba Siregar menyatakan mundur dari pencalonan di Pilkada Tapanuli Selatan.

sampaikan, sehubungan dengan keikutsertaan dalam Pilkada Tapsel tahun 2020 ini saya hentikan/batalkan atas permintaan keluarga yang ada di Jakarta," tulis Doli di laman akun *Facebook*-nya, Minggu.

Dalam kesempatan itu, Doli Sinomba juga menyampaikan kepada seluruh pihak yang sudah berkerja siang malam untuk maksud tersebut.

"Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih yang tidak terhingga. Semoga Pilkada Tapsel 2020 berjalan dengan sukses dan menghasilkan pemimpin terbaik bagi masyarakat Tapsel secara keseluruhan. Amin ya Robbal Alamin," tulisnya.

Doli mengakui kebenaran dari pengunduran dirinya itu dari bursa pemilihan kepala daerah di Tapanuli Selatan.

"Memang benar, saya mengundurkan diri. Saya juga sudah menyampaikan kemunduran diri ini kepada Partai Nasdem dan Hanura. Mereka bisa memahami alasan saya untuk mundur," sebutnya.

Calon Gubernur

Sementara itu, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jambi periode 2021-2024 yang mendaftar ke KPU Provinsi Jambi hingga hari terakhir tahapan pendaftaran, Minggu, hanya ada tiga pasangan yakni Al Haris-Abdullah Sani, Cek Endra-Ratu Munawaroh, dan Fachrori Umar-Syafril Nursal.

Sedangkan satu paslon lainnya, Syarif Fasha-Asafri Jaya Bakri yang unggul dalam survei pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi batal mendaftar karena kurangnya dukungan parpol.

"Berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan syarat dukungan parpol, ketiga paslon gubernur dan wakil gubernur Jambi dinyatakan lolos pencalonan. Selanjutnya kami masih menunggu hasil pemriksaan kesehatan dan tes narkoba ketiga paslon tersebut," kata Komisioner KPU Provinsi Jambi M Sanusi, Minggu.

Dijelaskan, tahapan pilkada serentak di Provinsi Jambi seusai masa pendaftaran calon, yakni pemeriksaan kesehatan calon, Sabtu (5/9) hingga Jumat (11/9). Kemudian verifikasi syarat administratif berlangsung hingga Selasa (22/9).

"Penetapan pasangan calon peserta pilkada serentak dilaksanakan, Rabu (23/9) dan pelaksanaan undian nomor urut peserta dilaksanakan, Kamis (24/9). Kampanye Pilkada Serentak 2020 digelar mulai Sabtu (26/9) hingga Sabtu (5/12)," ujarnya.

Tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bengkulu yang telah mendaftar di KPU Provinsi Bengkulu, semunya dinyatakan persyaratan telah lengkap. Ketiganya pasangan Agusrin Maryono- Imron Rosyadi, Helmi Hasan-Muslihan DS, dan petahana Rohidin Mersyah-Rosjonsyah.

Ketua KPU Provinsi Bengkulu, Irwan Saputra mengatakan, sampai saat ini hanya 3 palson yang mendaftar sebagai cagub-cawagub di KPU Provinsi Bengkulu. Tiga paslon cagub-cawagub Bengkulu ini, semuanya diusung partai politik.

"Berkas administrasi, termasuk surat dukungan partai pengusung yang disampaikan para paslon cagub-cawagub Bengkulu, saat mendaftar di KPU pada Sabtu dan Minggu dalam keadaan lengkap sesuai persyaratan ditetapkan dalam PKPU," ujarnya. [141/143/155/159]

Harga Cabai Terjun Bebas, Petani Jatim Menjerit

[KEDIRI] Harga jual cabai di eks Keresidenan Kediri yang meliputi Kabupaten Nganjuk, Kediri, Blitar, Trenggalek, dan Tulungagung, Jawa Timur (Jatim), terus mengalami penurunan sejak sepekan terakhir. Demikian pula dengan kondisi harga cabai di Kabupaten Sampang, Pamekasan, Madura anjlok. Anjloknya harga cabai diduga karena melimpahnya stok di tingkat petani sementara pembelian sepi karena dampak pandemi Covid-19.



ANTARA FOTO/DEDHEZ ANGGARA

Petani memanen Cabai merah di kebun miliknya di desa Pabean udik, Indramayu, Jawa Barat. Menurut petani harga cabai merah terus mengalami penurunan akibat berkurangnya permintaan pasar.

Salah satu petani di Desa Paron, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Burhanudin (50) misalnya, mengaku harga cabai yang awalnya Rp 10.000-12.000/kg awal Januari 2020, saat ini hanya tinggal Rp 6.000/kg.

Ia menyebutkan, jika kondisi harga ini tidak membaik, maka puluhan ribu petani cabai di eks Keresidenan Kediri dan di sentra-sentra cabai lainnya bakal mengalami kerugian besar.

"Jika harga cabai terus turun, maka petani akan semakin rugi. Karena biaya tanam dan harga jual yang tidak sebanding. Kita hanya bisa menunda panen hingga kondisi harga stabil. Namun jika terlalu lama di pohon, cabai itu akan rusak dan mengering," ujar Burhanudin, Minggu (6/9).

Petani yang memiliki lahan tanaman cabai dua ha ini mengaku belum mengetahui cara lain kecuali menunda panen sampai harga cabai mendekati normal, meski risikonya cabai bakal mengering dan bobotnyapun menyusut.

"Bahkan jika tidak segera dipanen, maka cabai itu akan busuk," katanya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri Anang Wdodo membenarkan anjloknya harga cabai petani di wilayahnya.

"Iinfo dari daerah sentra cabai di Jatim lainnya juga relatif sama. Kita terima info dari Madura dan Probolinggo maupun Jember juga sama. Harga (cabai) sedang terjun bebas karena hasil panenan melimpah," katanya, Minggu.

Ketua Asosiasi Petani Cabai Indonesia Kabupaten Kediri Suyono membenarkan semua jenis cabai petani harganya anjlok. Penyebabnya karena stok melimpah terjadi sejak minggu kedua April.

"Memang (harga turun karena) mendekati panen raya. Bahkan diperkirakan hingga pertengahan Mei karena kebutuhan masyarakat menurun. Terlebih karena efek penyebaran Covid-19 ini," ujarnya.

Untuk harga cabai rawit di tingkat petani saat ini berada di harga Rp 8.500/kg untuk cabai jenis brenggolo, cabai prentul Rp 6.000/kg, cabai ori Rp 11.000/kg.

Suyono mengakui bahwa sekarang ini kualitas cabai rawit dari petani tergolong bagus. Terutama yang berasal dari daerah dataran tinggi di Kabupaten Kediri.

"Selain panen melimpah, faktor pengiriman cabai terutama ke Jabodetabek tersendat imbas dari penerapan pembatasan sosial berskala besar dan lokal juga menjadi penyebab anjloknya harga. Juga karena pengiriman antarpulau yang tersendat akibat sulitnya kapal bersandar. Pasar di Jatim pun permintaannya turun, imbas dari sepinya konsumen," katanya.

Sampang

Harga cabai rawit di Sampang, Pulau Madura, Jatim, juga anjlok membuat petani menjerit. Saat ini harga hanya Rp 7.000/kg padahal biasanya Rp 80.000/kg.

Kondisi ini dialami petani cabai rawit di Desa Jeruk Purut, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang, Madura. Biasanya, tengkulak membeli cabai mereka dengan harga Rp 50.000 hingga Rp 80.000, kini hanya berkisar Rp 6.000 hingga Rp7.000.

Akibat anljoknya harga cabai ini, untuk mengembalikan modal, petani memanen sendiri cabai tanpa menggunakan pekerja lain. Padahal pada masa panen tahun lalu, petani bahkan sampai mempekerjakan puluhan orang untuk membantu memanen cabai.

Salah satu petani cabai rawit, Sulaiman (55) mengaku tidak mengetahui persis penyebab anjloknya harga. Dia menduga, harga cabai anjlok karena dampak pandemi Covid-19 yang membuat pengiriman ke kota besar terganggu atau stok cabe rawit yang sangat melimpah.

"Sekarang cabai murah, hanya Rp6.000-Rp7.000. Beda dengan tahun lalu yang mencapai Rp50.000-Rp80.000 per kilogram," katanya.

Selain dihargai sangat murah, petani cabai rawit ini juga mengaku tanamannya mulai diserang penyakit. Daun cabe terlihat mulai mengering dan buahnya keriput. [ARS/J-11]

Destinasi Wisata Minat Khusus Dorong Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat

[BENGKULU] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang diwakili Sekretaris Direktorat Jenderal sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pemulihan Lahan Akses Terbuka, Sigit Reliantoro, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bengkulu dalam rangka Promosi Kawasan Wisata Minat Khusus Lahan Bekas Tambang Bukit Kandis, pantauan kualitas udara (a*ir quality monitoring system*) dan bersih pantai (*coastal cleanup*), Jumat (4/9) hingga Minggu (6/9). Kunjungan utama dilakukan di lokasi hasil pemulihan Lahan Akses Terbuka Bukit Kandis yang berlokasi di Desa Durian Demang, Kabupaten Bengkulu Tengah.



ISTIMEWA

Sigit Reliantoro

Bukit Kandis dikenal dengan keanekaragaman hayati khas yaitu tanaman Asam Kandis dan Durian.

Kawasan Bukit Kandis diangkat menjadi ikon wisata bekas tambang yang menjadi destinasi pilihan masyarakat. Destinasi Wisata Minat Khusus Bukit Kandis memiliki keunggulan sebagai perbukitan batu andesit dengan pesona alam yang luar biasa, asri, dan memukau. Keunggulan ini mengantarkan kawasan ini Bukit Kandis dinobatkan sebagai Objek Wisata Terpopuler ketiga untuk kategori wisata olahraga dan petualangan Indonesia dari ajang bergengsi tahunan Pariwisata Terpopuler–Anugerah Pesona Indonesia (API),yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata.

Sigit Reliantoro mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah saat ini tengah menargetkan wilayahnya sebagai sentra durian. Keberadaan komiditi buah unggulan tersebut, harus ditunjang dengan sebuah kawasan wisata yang menarik sehingga wisatawan memiliki antusiasme untuk berkunjung.

"Oleh karena itu, Destinasi Wisata Minat Khusus Bukit Kandis hadir untuk mendukung. Kawasan wisata ini diharapkan menjadi wahana atraksi yang menghadirkan lokasi olah raga panjat tebing dan perkemahan. Sehingga pada akhirnya kedua keunggulan tersebut, dapat membantu perekonomian masyarakat," papar Sigit Reliantoro, Sabtu (5/9).

Bupati Bengkulu Tengah Ferry Ramli yang hadir menjelaskan, lokasi Bukit Kandis sebelumnya adalah penambangan tanpa izin batu andesit. Pada tahun 2018, kolaborasi antara Kementerian LHK, Pemerintah Provinsi Bengkulu maupun Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah telah mentransformasi Bukit Kandis yang rusak akibat penambangan menjadi kawasan wisata alam yang mengusung tema kawasan wisata alam minat khusus dengan kegiatan wisata fotografi, perkemahan, dan olahraga panjat tebing. Promosi ini juga dilakukan dengan melengkapi pengelolaan wisata melalui Pelatihan Panjat Tebing. Di rangkaian kunjungan ini pula dibuka pelatihan panjat tebing oleh Dinas LHK Provinsi Bengkulu serta penanaman pohon.

Berdasarkan data KLHK 2019, bukaan pertambangan di Provinsi Bengkulu seluas 4.175 ha. Dari kondisi bukaan pertambangan tersebut, terdapat usaha dan/atau kegiatan pertambangan sebanyak 36 IUP Operasi Produksi Mineral Logam dan Batubara, serta 187 IUP-IUPK Operasi Produksi Batuan (Dinas ESDM Provinsi Bengkulu Tahun 2017). Selain itu, di Provinsi Bengkulu juga terdapat kegiatan pertambangan tanpa izin sekitar 75 lokasi.

Dari sejumlah aktivitas pertambangan tersebut, membutuhkan komitmen bersama antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, walaupun terjadi pergeseran kewenangan di bidang pertambangan. Pada era sebelum tahun 2014, kewenangan terdistribusi ke kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Pada era 2014-2020, kewenangan bergeser ke provinsi dan pusat. Pascaterbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, bergeser menjadi kewenangan pusat dan dapat didelegasikan ke provinsi untuk jenis batuan dan Izin Pertambangan Rakyat. [143]

Zona Merah Covid-19

Belajar Tatap Muka di Surabaya dan Sidoarjo Belum Bisa Dilaksanakan

[SURABAYA] Proses perluasan pembelajaran tatap muka tingkat SMA, SMK dan SLB di Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim), belum bisa dilakukan, karena kedua daerah tersebut masih berstatus zona merah Covid-19.

"Sekolah yang ingin membuka pembelajaran secara tatap muka harus mendapat rekomendasi dari Gugus Tugas Penanganan Covid-19 kabupaten/kota. Dan untuk Surabaya dan Sidoarjo belum," kata Kepala Dinas Pendidikan Jatim Wahid Wahyudi, Minggu (5/9).

Di Jatim, uji coba proses belajar mengajar SMA, SMK dan SLB tatap muka, kata Wahid, dilaksanakan sejak 18-30 Agustus. Pembelajaran tersebut berjalan dengan baik.

Pada saat uji coba, masing-masing kabupaten/kota dibatasi hanya satu SMA, SMK, dan SLB. Selanjutnya mulai 31 Agustus, jumlah SMK-nya ditambah menjadi masing-masing daerah 25% dari total jumlah sekolah. Di provinsi ini terdiri dari 38 kabupaten/kota.

Pada tahap kedua uji coba pembelajaran tatap muka, yang diperbanyak baru jenjang SMK. Apabila suatu daerah ada 7 SMK, maka hanya 2 SMK yang diizinkan melakukan belajar tatap muka.

"Khusus untuk jenjang pendidikan SMA masih belum dilakukan penambahan dan akan diberlakukan secara bertahap," kata Wahid.

Ia menambahkan, sebagai langkah antisipasi Pemprov Jatim menggelar rapid test massal untuk guru dan tenaga pendidikan SMA/SMK/SLB.



ANTARA FOTO/SYAIFUL ARIF

Sejumlah siswa SMK Negeri 3 jurusan teknik jaringan tenaga listrik mengikuti pembelajaran praktik secara tatap muka di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Jumat (4/9).

Rapid test tahap pertama dilakukan terhadap 10.000 guru dan tenaga pendidik. Selanjutnya dilaksanakan pada tahap dua kepada 10.000 guru lainnya.

Wahid menambahkan, hasil *rapid test* seluruhnya ada pada Dinas Kesehatan Jatim yang tes cepat Covid-19 tersebut.

Korbankan Belajar

Sementara Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menegaskan, pihaknya lebih baik mengorbankan tidak melakukan belajar tatap mupa untuk kalangan pelajar selama setahun, dari pada mengizinkan mengaktifkan sekolah di tengah pandemi Covid-19 yang masih mengancam.

"Saya belum mengizinkan sekolah untuk belajar tatap muka di sekolah. Proses belajar masih secara daring. Resikonya berat untuk pelajar jika belajar tatap muka di sekolah. Potensi pelajar terpapar sangat besar," ujar Edy Rahmayadi, Minggu.

Mantan Pangkostrad ini mengaku mempunyai alasan yang kuat tidak mengizinkan sekolah melaksanakan belajar tatap muka. Pasalnya, tren penyebaran dan penularan virus *corona* semakin meningkat di tengah masyarakat, dan pelajar bisa terpapar akibat pandemi tersebut.

"Beban pemerintah semakin berat jika mengaktifkan kembali untuk belajar tatap muka. Saya tidak menginginkan generasi muda penerus bangsa ini terpapar. Kasihan mereka jika sudah terpapar. Pandemi Covid-19 ini jangan dianggap sepele," katanya.

Menurutnya, Pemprov Sumut tidak mau terburu - buru mengambil keputusan untuk sekolah melakukan belajar tatap muka. Pemerintah akan mempertimbangkan sekolah dibuka jika tren kasus Covid-19 mengalami penurunan di seluruh daerah.

"Saya adalah orangtua dari seluruh pelajar di daerah, yang tidak menginginkan anak - anak saya ini terpapar virus *corona*. Saya meminta orangtua murid bisa memahami tujuan baik ini. Semua pihak harus bisa menahan diri dan bersabar karena pandemi ini," sebutnya. [TG/155]

Protokol Kesehatan

Sleman Beri Sanksi Sita KTP hingga Pembinaan Bela Negara

[YOGYAKARTA] Pemerintah Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, mulai menerapkan peraturan yang ketat bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan Covid-19, termasuk pemberian sanksi pembinaan bela negara, kerja sosial, penyitaan sementara kartu tanda penduduk (KTP), dan denda paling banyak Rp 100.000. Seluruh sanksi ini diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Sleman Nomor 37.1/2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-2019.

Bupati Sleman Sri Purnomo menegaskan, Pemkab Sleman mulai menegakkan aturan secara ketat menuju masyarakat yang produktif dan aman dari Covid-19.

Disebutkan, dalam Pasal 8 Perbup 37.1/2020, diatur warga yang tidak patuh wajib dikenai sanksi. "Perbup ini merupakan ikhtiar Pemkab Sleman untuk bersama-sama memutus rantai penyebaran Covid-19," ujar Sri Purnomo, Minggu (6/9)

Dikatakan, perbub itu menyasar perorangan, pelaku usaha, dan pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum.

Smentara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman Arip Pramana menambahkan, sebelum penerapan sanksi, saat ini tengah dilakukan sosialisasi, dan karena peraturan baru, maka tahapan yang harus dilakukan adalah sosialisasi yang melibatkan petugas gabungan dari TNI dan Polri.

Sanksi-sanksi yang diatur dalam perbup tidak serta-merta diterapkan, sebab sanksi tersebut bertingkat, dengan berdasar database para pelanggar yang sebelumnya terjaring dalam patroli.

"Jika pelanggar melakukan pelanggaran lagi baru akan diberikan sanksi yang lebih berat. Sanksi dibagi menjadi dua, sanksi untuk perorangan dan pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum," katanya.

Bagi perorangan yang melanggar protokol kesehatan, Satpol PP akan memberikan sanksi berupa teguran lisan, peringatan tertulis, pembinaan Bela Negara, kerja sosial, kerja olahraga, penyitaan KTP, dan denda administrasi paling banyak Rp 100.000.

Sementara bagi pelaku usaha dan pengelola, penyelengara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum, sanksi berupa teguran lisan, peringatan tertulis, denda administrasi sebesar Rp100.000, dan paling berat adalah penutupan atau penghentian sementara operasional usaha.

Sedang kuliah tatap muka, Pemkab Sleman juga mewajibkan bahwa setiap mahasiswa yang beraktivitas secara luring, harus memiliki surat sehat dan negatif Covid-19.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman Joko Hastaryo membenarkan, mahasiswa yang datang dari luar DIY harus membawa surat keterangan sehat. Kalau dari daerah PSBB atau zona merah harus dengan *rapid test* atau *swab test*.

"Kalau sudah sampai di Yogya atau Sleman harus mau karantina mandiri atau *swab* ulang. Ya dengan persyaratan khusus itu,"sambungnya.

Persyaratan kedatangan mahasiswa tersebut juga tertera dalam Surat Edaran Bupati Sleman Nomor 443/01352 Tahun 2020 Tentang Panduan Penerimaan Kedatangan Mahasiswa dari Luar Daerah.

Dalam surat edaran tersebut, tugas pimpinan Perguruan Tinggi adalah memastikan mahasiswa dalam keadaan sehat dengan bukti surat keterangan sehat. [152]

PP Pertina

Mantan Pangdam Udayana Yakin Dapat Dukungan

[JAKARTA] Mantan Panglima Kodam (Pangdam) IX/ Udayana, Mayor Jenderal (Purn) Komaruddin Simanjuntak percaya diri mendapat banyak dukungan untuk maju pada bursa pencalonan Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Tinju Amatir Indonesia (PP Pertina) 2020-2024. Guna memantapkan dukungan, mantan Ketua Pengprov Pertina Kalimantan Selatan itu mengumpulkan para pemilik suara di Bogor, Jawa Barat, Sabtu malam (5/9).

"Saya kalau melihat dari data yang ada sangat optimistis, dari 34 pengurus provinsi Pertina, 23 sudah menyatakan dukungannya kepada saya. Saya yakin dukungan ini bukan karena paksaan," kata Komaruddin Simanjuntak di Jakarta, Minggu (6/9).

Komaruddin Simanjuntak juga mengaku sudah menyiapkan program jika terpilih menjadi orang nomor satu di induk organisasi tinju Indonesia itu. Ia bahkan berjanji akan membuat tinju di Indonesia kembali berjaya di kancah internasional. "Janji saya pertama pembenahan manajemen organisasi tinju dari dalam, lalu saya akan memperbaiki organisasi pembinaannya supaya prestasi nasional kembali seperti dulu dan bisa bertarung di kancah internasional," katanya.

Meski tim pemenangan sudah siap, waktu pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) PP Pertina belum ditetapkan. Saat ini, posisi ketua umum masih dipegang oleh Irjen Pol Johanis Asadoma. "Ada beberapa strategi yang bisa dilakukan di musyawarah nasional dalam rangka menggalang dukungan dari pengurus provinsi. Kami sudah melakukan langkah yang sesuai aturan dengan mengirimkan surat kepada KONI dan PP Pertina, sebanyak dua kali tetapi sampai hari ini belum ada tanggapan," kata Ketua Pengprov Pertina Kalimantan Timur, Nasir Balfast.

Dukungan untuk Komaruddin Simanjuntak juga diberikan oleh Ketua Pertina Maluku Utara, Jasman Abubakar. Menurut dia, mantan Pangdam Udayana ini dinilai tepat memimpin PP Pertina dan pihaknya berharap orang baru tersebut mampu menghilangkan gap antara pusat dan daerah dalam hal pembinaan tinju nasional. [Ant/A-21]

AS Terbuka

Mimpi Serena Williams Makin Dekat



AFP

Petenis putri Amerika Serikat, Serena Williams, mengembalikan bola ke lawannya yang juga sesama petenis Amerika Serikat, Stephens Sloane, pada laga putaran ketiga turnamen tenis Grand Slam Amerika Serikat Terbuka 2020 di Flushing Meadows, Sabtu (5/9) waktu setempat. Serena melaju ke putaran keempat setelah menang lewat permainan tiga set atas Sloane.

[NEW YORK] Serena Williams semakin mendekati mimpinya merebut gelar Grand Slam ke-24, setelah memastikan tiket putaran keempat turnamen tenis Grand Slam Amerika Serikat (AS) Terbuka 2020. Di putaran ketiga, ia menghentikan langkah sesama petenis Amerika Serikat, Sloane Stephens, dengan skor 2-6, 6-2, 6-2 pada laga di Flushing Meadows, Sabtu (5/9).

Serena Williams mengaku, Sloane memaksanya mengeluarkan seluruh penampilan terbaik agar bisa mewujudkan mimpinya tersebut. "Laga ini berlangsung sangat ketat. Kami, setiap kali bertemu, selalu terlibat dalam pertandingan-pertandingan yang sulit dipercaya. Setiap kali berhadapan dengan Sloane, ia memaksa saya untuk mengeluarkan seluruh kemampuan terbaik saya," kata Serena setelah pertandingan.

Di putaran keempat, Serena sudah ditunggu petenis asal Yunani, Maria Sakkari. Pertemuan keduanya di babak 16 besar ini menjadi ulangan perjumpaan dua pekan lalu di ajang turnamen pemanasan AS Terbuka, Western&Southern Terbuka. Ketika itu, Serena Williams dibuat tidak berkutik. Karena itu, untuk tetap menghidupkan mimpi menjadi peraih Grand Slam terbanyak, maka Serena harus mampu mengatasi petenis ini sekaligus membalas kekalahan tersebut.

Hanya saja, Sakkari cukup berhemat tenaga di putaran ketiga. Ia hanya butuh waktu 55 menit untuk menghentikan langkah Amanda Anisimova pada laga sebelumnya di Stadion Louis Amstrong. Ia menang 6-3, 6-1. Dengan unggul tenaga dan waktu istirahat yang sedikit lebih banyak dari Serena, maka Sakkari patut tidak dianggap enteng oleh Serena.

23 Gelar Grand Slam

Hingga saat ini, Serena Williams baru mengoleksi 23 gelar Grand Slam. Petenis 38 tahun itu sudah menyamai rekor gelar Grand Slam yang dikumpulkan Margaret Court. Dan, gelar Grand Slam terakhir yang direbutnya adalah Australia Terbuka pada 2017. Setejak itu, ia tidak merasakan lagi gelar juara Grand Slam.

Selain menatap gelar Grand Slam ke-24, Serena juga menjadi petenis putri keempat Amerika Serikat yang tersisa hingga hari keenam kejuaraan ini. Mereka adalah sisa dari 11 petenis AS yang bisa tembus ke putaran ketiga, jumlah terbesar yang terjadi di Flushing Meadows sejak 1992. Tiga lainnya adalah Jennifer Brady yang diunggulkan di posisi ke-28, Sofia Kenin yang diunggulkan di tempat kedua, dan Shelby Rogers yang masuk kelompok pemain non unggulan.

Sementara itu dari sektor tunggal putra, petenis Austria, Dominic Thiem, melaju ke babak 16 besar setelah menghentikan petenis Kroasia, Marin Cilic, 6-2, 6-3, 3-6, 6-3 di lapangan Arthur Ashe, Sabtu (5/9) malam waktu setempat. [usopen.org/Sky Sports/A-21]



FCB/MARCA.COM

Foto dokumentasi Barcelona ini memperlihatkan Lionel Messi (kanan) melakukan latihan di pusat latihan klub itu belum lama ini.

[BARCELONA] Lionel Messi dijadwalkan mulai mengikuti latihan bersama pasukan Ronald Koeman pada Senin (7/9) ini waktu setempat, setelah mengumumkan bahwa dia bertahan di Camp Nou hingga kontraknya habis. Ini untuk pertama kalinya ia mengikuti sesi latihan, setelah sempat menolak latihan menyusul permintaan resminya untuk dijual dengan status bebas transfer pada jendela transfer musim panas 2020.

Sebelum bergabung dengan pasukan Koeman, Messi harus menjalani tes PCR guna memastikan bahwa pemain internasional Argentina itu tidak terpapar virus *corona*. Bila dinyatakan bebas, ia akan bergabung dengan para pemain lainnya yang sudah menjalani latihan sejak Senin pekan lalu.

Messi masih absen latihan pada Sabtu (5/9) lalu, setelah dia mengumumkan secara resmi untuk tetap bertahan di Camp Nou. Padahal, Messi tidak sedang berlibur atau membela negaranya di ajang internasional. Philippe Coutinho saja, yang mengantar Bayern Muenchen menjuarai Liga Champions 2020, sudah mengikuti persiapan pramusim bersama para pemain lainnya. Adapun para pemain Barcelona yang masih membela negara masing-masing di ajang Liga Nasional Eropa juga belum mengikuti latihan bersama pelatih Ronald Koeman. Barcelona menjalani laga pertama persiapan pramusim pada Sabtu (12/9) mendatang melawan Nastic de Tarragona di Estadi Johan Cruyff.

Berdasarkan jadwal La Liga Spanyol musim 2020-2021, Messi akan kembali mengenakan jersei *Blaugrana* dalam kompetisi resmi pada akhir pekan 26-27 September mendatang. Barcelona akan menantang Villarreal pada ajang La Liga di Camp Nou.

Adapun tentang nasib Messi selanjutnya akan sangat tergantung perkembangan di Barcelona dalam waktu-waktu mendatang. Yang pasti, Messi akan bertahan di Camp Nou hingga kontraknya habis 30 Juni 2021. Ia juga tidak bisa pergi pada jendela transfer musim dingin 2021. Sebab bila tetap ingin pergi, Messi dan Barcelona harus menyelesaikan sengketa kontrak ini di pengadilan. Padahal, *La Pulga* mengambil keputusan untuk bertahan karena tidak ingin menyelesaikan kasus ini di pengadilan.

Untuk musim-musim selanjutnya keberadaan Messi di Barcelona sangat tergantung seperti apa hubungan dia dengan Josep Maria Bartomeu. Bila keduanya berdamai maka Messi bisa saja disodori kontrak baru dan akan tinggal di klub itu hingga gantung sepatu. Kondisi ini juga sangat tergantung hasil pemilihan Presiden Barcelona tahun depan yang tanggal pemungutan suaranya akan ditentukan antara 15 Maret hingga 4 April 2021.

Presiden terpilih saat itu akan sangat menentukan masa depan Messi di Camp Nou. Dia akan duduk satu meja dengan sang kapten untuk mendiskusikan kontrak baru. Presiden terpilih juga harus bisa meyakinkan peraih enam Ballon d'Or itu dengan proyek ambisius di lapangan sehingga membuatnya tertarik tetap bertahan di klub yang dibelanya sejak usia 13 tahun tersebut.

Suarez ke Juventus

Sementara itu, Luis Suarez semakin dekat pindah ke Juventus pada jendela transfer musim panas 2020. Pemain 33 tahun ini sudah mencapai kesepakatan dengan *Bianconeri* untuk dikontrak selama dua musim dengan opsi diperpanjang satu musim lagi. Masalah gaji juga sudah dibicarakan. Juventus akan membayar gaji sebesar 10 juta euro per tahun kepada Suarez. Meski lebih kecil dari yang diterima di Barcelona, tetapi karena sistem pajak di Italia dan Spanyol berbeda, maka Luis Suarez tetap menerimanya.

Masalahnya sekarang adalah bagaimana mengakhiri kontrak dengan Barcelona yang tersisa satu tahun dengan opsi perpanjangan satu musim lagi. Bila Barcelona mau menendang Suarez dari Camp Nou, maka mereka harus membayar hak-hak Suarez atas kontraknya tersebut. Pada saat yang sama, Barcelona juga berpikir bagaimana bisa mendapat pemasukan dari penjualan Suarez ke *La Vecchia Signora*, meski tidak besar.

Berhadapan dengan persoalan ini, Barcelona bisa mengambil jalan seperti yang mereka pilih saat melepas Ivan Rakitic ke Sevilla pekan lalu. Barcelona tidak membayar kepada Ivan Rakitic atas kontraknya yang masih berlaku, tetapi rela hanya mendapat pemasukan 1,5 juta euro dari penjualan Rakitic ke Sevilla. Barcelona masih bisa mendapatkan 9 juta euro lagi, tergantung penampilan Rakitic bersama klub Andalusia tersebut.

Menurut *Marca.com*, kemungkinan besar Barcelona menempuh cara yang sama untuk Suarez. Artinya, mereka menjual Suarez dengan harga sangat murah sambil berharap mendapat bonus besar dari penampilan penyerang striker Timnas Uruguay itu bersama Juventus di Liga Serie A dan Liga Champions musim depan. [Marca.com/A-21]

Liga Nasional Eropa

Tanpa Ronaldo, Portugal Tetap Perkasa

[PORTO] Tanpa Cristiano Ronaldo, penampilan Tim Nasional (Timnas) Portugal pada partai pembuka Liga Nasional Eropa musim 2020-2021 tetap perkasa. Mereka membantai finalis Piala Dunia 2018, Kroasia, dengan skor telak 4-1 pada pertandingan yang berlangsung di Estadio do Dragao, Porto, Minggu (6/9) dini hari WIB.

Ronaldo absen pada laga ini karena mengalami cedera infeksi pada tumit. Dan, ini untuk pertama kalinya bintang Juventus dan peraih lima gelar pemain terbaik dunia itu absen dari Timnas Portugal sejak 2018. Alhasil, Ronaldo tidak bisa merayakan penampilan ke-100-nya bersama jawara Piala Eropa 2016 itu.

Sementara di kubu Kroasia, mereka tidak diperkuat oleh dua bintangnya di La Liga Spanyol, yaitu gelandang Real Madrid Luka Modric dan Ivan Rakitic yang baru saja kembali ke Sevilla dari Barcelona. Absennya kedua pemain itu, setelah disetujui federasi sepakbola Kroasia, membuat penampilan tim kotak catur itu tidak menggigit. Mereka menjadi bulan-bulanan Portugal.

Sebelum gol pertama Portugal muncul, tiga kali bola tendangan para pemain *Selecao das Quinas* membentur mistar gawang. Kebuntuan baru pecah pada menit ke-41 lewat Joao Cancelo. Hujan gol baru terjadi di 45 menit kedua masing-masing lewat Diogo Jota menit ke-58, Joao Felix menit ke-70, dan Andre Silva saat pertandingan hendak berakhir. Adapun, satu-satunya gol Kroasia dilesakkan Bruno Petkovic menit tambahan pertama, tepatnya menit ke-90+1.

Pelatih Kroasia, Zlatko Dalic marah karena anak asuhnya tidak memperlihatkan permainan Timnas Kroasia sesungguhnya. Untuk laga berikutnya, ia mengancam coret para pemain yang tampil asal-asalan dan digantikan pemain-pemain yang duduk di bangku cadangan. "Harus diakui bahwa kami tidak bermain bagus. Ini terjadi karena kami tidak bermain bersama untuk waktu yang lama. Dan, kami harus segera melupakan kekalahan ini dan mempersiapkan diri untuk laga selanjutnya. Meskipun melakukan pemulihan dalam tiga hari juga bukan hal mudah," katanya.



AFP/MIGUEL RIOPA

Penyerang Kroasia, Ante Rebic (kanan), berebut bola dengan penyerang Portugal, Bernardo Silva, pada pertandingan Liga Nasional Eropa di Estadio do Dragao, Porto, Minggu (6/9) dini hari WIB. Portugal menang 4-1.

Bermain Agresif

Pada laga berikutnya, Dalic meminta anak asuhnya bermain lebih agresif plus energi yang lebih bagus lagi. "Kami harus mengevaluasi apa yang salah dan tidak boleh tampil seperti ini lagi. Bila ada pemain yang lelah, silahkan bicara biar tidak dimainkan pada laga melawan Prancis karena kami masih punya banyak pemain bagus di bangku cadangan. Ini bukan tim Kroasia yang saya kenal. Kami membiarkan lawan melakukan apa yang mereka inginkan. Sebaliknya kami kehilangan agresi. Seharusnya, kami tertinggal 0-4 pada babak pertama dan saya tidak tahu apa alasannya. Yang pasti ini buruk sekali," katanya lagi.

Sementara pelatih Portugal Fernando Santos bangga dengan apa yang diperlihatkan para pemainnya. Mereka menunjukkan sebagaimana diperlihatkan selama latihan. Dengan absennya Ronaldo, ia lebih leluasa pemain-pemain baru yang mendukung skemanya. Dan ternyata, pilihan pemainnya tidak keliru.

"Saya berharap, para pemain bisa menampilkan apa yang sudah mereka latih dalam minggu ini, tetapi ternyata tidak mudah. Kedua tim sama-sama butuh perjuangan. Dan, melawan tim yang hebat kami harus bisa memberikan 100%," kata Fernande Santos.

Pada laga terpisah di Friends Arena, Solna, jawara dunia Prancis hanya memetik kemenangan tipis 1-0 atas tuan rumah Swedia. Gol tunggal kemenangan *Les Blues* dicetak pemain muda Kylian Mbappe menit ke-42. [Uefa.com/ESPN/A-21]

Tuntaskan ITF Sunter, Aktivitas Usaha Bisa Berkembang

[JAKARTA] Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah atau Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter, Jakarta Utara, yang sedianya dikelola PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dengan pihak swasta masih mangkrak hingga saat ini.



SP/CARLOS ROY FAJARTA

Suasana salah satu sisi dari kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah atau Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter, Jakarta Utara, yang tampak sepi. Belum ada aktivitas pengerjaan proyek yang sudah dicanangkan sejak Desember 2018 lalu.

Program yang dicanangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Desember 2018 lalu masih mengalami sejumlah kendala. Sejumlah kalangan berharap agar program strategis itu segera dituntaskan karena mempunyai dampak yang besar dan bermanfaat.

Demikian disampaikan warga sekitar lokasi ITF Sunter dan pendiri aplikasi pengelolaan sampah Mountrash, Gideon W Ketaren, secara terpisah kepada *SP* di Jakarta.

Johan (56) dan Ahmari (47) adalah dua warga yang sebelumnya tinggal di calon lokasi ITF Sunter, namun sekarang harus mengungsi tak jauh dari kawasan itu. Keduanya sangat berharap agar proyek ITF Sunter segera berjalan sehingga banyak warga yang menganggur bisa bekerja lagi.

"Siapa tahu nanti kalau proyeknya sudah selesai maka kita direkrut sebagai tenaga kebersihan ataupun pekerjaan lainnya. Sekarang ini saya cuman jadi kuli bongkar muat pasir di Jalan RE Martadinata untuk memenuhi kebutuhan keluarga," kata Ahmari.

Ahmari mengatakan harapannya agar mereka warga yang dahulunya bermukim di sekitar ITF Sunter dapat dipekerjakan agar bisa melanjutkan nafkah mereka. Meskipun dengan keahlian yang minim, dia yakin ITF Sunter membutuhkan banyak tenaga kerja.

Selain itu, keduanya juga melihat ada peluang usaha yang bisa dilakukan warga sekitar jika ITF Sunter mulai dibangun hingga beroperasi nanti. Dengan demikian, dampak dari pembangunan ITF Sunter bisa membantu kehidupan warga yang tinggal di sekitarnya.

Sementara itu, Gideon W Ketaren menegaskan Mountrash sangat mendukung sekali adanya ITF Sunter tersebut. Keberadaan ITF tersebut akan mengoptimalkan banyak sampah yang selama dibuang karena dianggap tidak memliki nilai ekonomis.

"Pengelolaan dan pengolahan sampah melalui ITF sangat diperlukan. Kami yang bergerak dalam pengumpulan sampah secara digital pun akan beroperasi untuk memasok sampah sehingga semuanya bisa bernilai ekonomis," jelasnya, Minggu (6/9).

Memasok

Dia yakin kebutuhan sampah yang mencapai ribuan ton per hari akan memobilisasi berbagai kalangan terkait untuk mengumpulkan dan memasok sampah ke ITF. Mountrash yang saat ini masih fokus pada sampah plastik pun akan mengoptimalkan sumber daya dan jaringannya guna memasok sampah dalam jumlah yang banyak.

"Ini berarti banyak pihak yang akan bergerak dan menghidupi banyak kalangan. Mountrash sudah menyiapkan aplikasi bank sampah yang dapat disinergikan untuk pemberdayaan sirkular ekonomi," kata Gideon yang juga Chief Executive Officer (CEO) PT Mountrash Avatar Indonesia ini.

Dia menegaskan bahwa jika ITF sudah beroperasi Mountrash siap akan memasok sampah sesuai syarat yang diberikan. Aplikasi yang kami kembangkan akan mendukung percepatan pasokan bahan baku sampah. Dengan demikian banyak bisnis dan rantai pasok yang harus diaktifkan.

Sebelumnya, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah merekomendasikan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengganti PT Jakpro selaku pelaksana proyek ITF tersebut. Pasalnya, PT Jakpro dinilai gagal menyelenggarakan proyek tersebut sehingga tidak satupun ITF dibangun. Rekomendasi ini disampaikan langsung oleh Ida selaku Ketua Komisi D DPRD dalam Rapat Pimpinan Gabungan dan Rapat Banggar pada 1 September 2020 lalu.

"Kami merekomendasikan agar Gubernur mencabut Pergub Nomor 33 Tahun 2018 dan Pergub Nomor 65 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan fasilitas pengelolaan sampah di dalam kota karena PT Jakarta Propertindo sebagai pelaksana proyek gagal dalam melaksanakan Pergub tersebut," ujar Ida, Kamis (3/9).

Padahal, kata Ida, ITF sebagai solusi seharusnya mengatasi situasi darurat sampah di DKI Jakarta menjadi prioritas gubernur Anies dalam RPJMD 2017-2020. Hingga saat ini, pembangunan ITF di empat wilayah, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat dan Jakarta Selatan masih sebatas wacana dan tak satupun yang telah dibangun.

Direktur Pengembangan Bisnis Jakpro Hanief Arie Setianto mengungkapkan saat ini pembangunan ITF Sunter masih dalam tahapan pendanaan. Pihaknya sedang membahas isu-isu *bankability* dengan para pemangku kepentingan termasuk dengan lembaga keuangan.

"Kendala yang dihadapi adalah belum semua isu *bankability* terselesaikan," ujar Arie, Senin (31/8).

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Justin Adrian, Jumat (4/9), mengatakan Pemprov DKI Jakarta harus terlibat dalam pendanaan proyek ITF Sunter tersebut. "Kompleksitas masalah pendanaan atau finansial membuat proyek ITF Sunter ini mandek sampai sekarang. Karena itu, kita minta pemerintah lebih berperan aktif dalam menangani pendanaan proyek ini," ujar Justin Adrian.

Peran Pemprov DKI dalam pendanaan proyek ITF, kata Justin, bisa dilakukan dengan beberapa skema. *Pertama*, skema pembiayaan melalui Penanaman Modal Daerah (PMD).

"Jika melalui PMD, maka tidak ada lagi hambatan pembiayaan, serta di masa mendatang tidak membebani anggaran daerah dalam bentuk *tipping fee* per ton sampah," tandas dia.

Kedua, lanjut Justin, menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha-Availability Payment (KPBU-AP).

Menurut dia, skema KPBU-AP ini akan sangat menyederhakan proses pembiayaan dan pelaksanaan proyek, sekaligus tidak terlalu membebani anggaran daerah. "Keuntunggan menggunakan KPBU-AP adalah pihak pemerintah baru membayar kepada kontraktor setelah proyek selesai dan bisa dibayar secara bertahap misalnya per bulan/tahun," jelas dia. [YUS/C-7/H-12]

Wali Kota Bekasi Tinjau Kebocoran Sumur Bor di Jatisampurna



ISTIMEWA

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi bersama Kapolrestro Bekasi Kota Kombes Pol Wijonarko meninjau lokasi kebocoran sumur bor di Jatisampurna, Minggu (6/9).

[JAKARTA] Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi bersama jajarannya didampingi Kapolrestro Bekasi Kota Kombes Pol Wijonarko meninjau lokasi kebocoran sumur bor di Jalan Lembur I Nomor 31, Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jatisampurna.

Di lokasi tersebut, terdapat semburan lumpur dari lubang sumur pengeboran yang dilakukan oleh warga, yang tak jauh dari pabrik air minum.

"Sampai saat ini, masih ditangani oleh pemilik untuk dilakukan perbaikan. Kami juga mengerahkan Tim Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi membantu di lokasi," ujar Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, Minggu (6/9).

Kejadian ini sempat meresahkan warga setempat karena terjadi semburan air berlumpur.

Semburan pertama kali terjadi pada Sabtu (5/9) dikarenakan adanya kebocoran gas yang berada di dalamnya. Hal ini, telah ditindaklanjuti tim Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi dengan menutup lubang menggunakan batu dan semen sehingga mengurangi dampak semburan.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi telah berkoordinasi dengan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pengecekan penyebab semburan tersebut agar sumber kebocoran dapat teratasi dengan cepat. [160]

Mobil Wisata Sepi



SP/HERI SOBA

Mobil wisata keliling di Desa Pasir Laja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, sepi peminat selama pandemi Covid-19, belum lama ini. Minimnya penumpang karena sebagian besar keluarga masih mematuhi protokol kesehatan. Namun kondisi tersebut menyebabkan pemasukan bagi pengelola kendaraan wisata itu turun drastis.

Membenahi Jabodetabek-Punjur

Menteri ATR Usul Tim Koordinasi Daerah

[JAKARTA] Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengusulkan adanya pembentukan tim koordinasi antara pusat dan daerah guna mendukung rencana penataan Tata Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur).



ANTARA/YULIUS SATRIA WIJAYA/FOC.

Kawasan Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang membutuhkan pembenahan secara bersama dengan kawasan Jabodetabek lainnya.

Dalam rapat koordinasi dengan Tim Koordinasi Penataan Ruang Kawasan Jabodetabek-Punjur, Menteri Sofyan menjelaskan penyelesaian permasalahan Jabodetabek-Punjur sebelumnya sudah dilaksanakan melalui Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabodetabek-Punjur. BKSP merupakan badan kerja sama antar daerah yang terdiri atas ketua yang memimpin secara bergantian dengan sekretariat dan tidak melibatkan Pemerintah Pusat.

"Untuk melakukan perluasan dan penguatan ruang lingkup, tugas dan wewenang, tata kerja, dan kapasitas dari BKSP, diperlukan pengintegrasian posisi BKSP Jabodetabek-Punjur ke dalam Tim Koordinasi Jabodetabek-Punjur guna menghindari adanya dualisme kelembagaan terhadap fokus atau substansi dan wilayah yang sama," kata Sofyan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (6/9).

Sofyan menjelaskan tim koordinasi tersebut akan memiliki beberapa tugas dan wewenang yang lebih kuat dari BKSP. Misalnya melakukan evaluasi program dan rekomendasi anggaran. Tim koordinasi antara pusat dan daerah ini akan dibantu oleh tim pelaksana, pokja sektoral dan *project management office* (PMO).

Menurut dia, kompleksitas permasalahan di kawasan Jabodetabek-Punjur sangat membutuhkan peran dan kerja sama antar daerah serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan terkait dalam penyelesaiannya. Oleh karena it, pemantapan kelembagaan dari tim koordinasi Jabodetabek-Punjur diperlukan. Usulan pembentukan tim koordinasi ini pun mendapat dukungan, salah satunya dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Basuki menjelaskan integrasi BKSP ke dalam tim koordinasi Jabodetabek-Punjur akan memperkuat kinerja sehingga membuahkan hasil yang lebih baik.

"Saya kira kalau ada dua kelembagaan pasti tidak akan efektif, maka saya setuju untuk melebur BKSP," kata Basuki.

Seperti diketahui, terdapat enam isu strategis yang perlu dibenahi, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur).

Isu strategis pembenahan Jabodetabek-Punjur meliputi kemacetan, kawasan kumuh dan bangunan ilegal, banjir, ketersediaan air bersih, sampah dan sanitasi, serta kebutuhan lahan penataan pantai utara.

Dukung

Secara terpisah, Pemerintah Kota Bogor menyetujui usulan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk membentuk lembaga yang tugasnya mengintegrasikan penataan ruang di Jabodetabek-Punjur.

"Pembentukan lembaga baru yang diusulkan Kementerian ATR/BPN itu tujuannya agar ada penyelarasan perencanaan program antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah," kata Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, di Kota Bogor, Sabtu.

Rencana pengintegrasian tata ruang kawasan Jabodetabek-Punjur diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2020. [Ant/VEN/H-12]

Pemuda Tewas Dianiaya Pemotor Bersenjata Tajam

[JAKARTA] Seorang pemuda Muhammad Raffi Rizali (17), tewas setelah dikeroyok sekelompok orang yang mengendarai sepeda motor dan bersenjata tajam, di sekitar lampu merah Permata Hijau, Jalan Letjen Supeno, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Kapolsek Kebayoran Lama Kompol Indra Ranudikarta mengatakan, peristiwa penganiayaan itu terjadi sekitar pukul 03.00 WIB, Sabtu (5/9) kemarin.

"Telah terjadi penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia di lampu merah ITC Permata Hijau," ujar Indra, Minggu (6/9).

Dikatakan Indra, kronologi kejadian bermula ketika korban bersama teman-temannya berjumlah enam orang berangkat dari rumah ke arah Cidodol untuk jalan-jalan dan cari makan dengan mengendarai sepeda motor. Selesai makan, sekitar pukul 02.30 WIB, korban dan rekan-rekannya pulang melawati Jalan Letjen Supeno mengarah Lampu Merah Permata Hijau.

Sesampainya di depan ITC Permata Hijau, korban yang berboncengan dengan saksi Daffa dan Rian, tiba-tiba dihampiri sekelompok orang mengendarai sekitar 20 sepeda motor. "Kemudian langsung membacok kaki korban, karena korban posisinya di belakang berboncengan dengan saksi," ungkapnya.

Indra menyampaikan, seketika korban terjatuh dari sepeda motor. Sementara, kedua temannya berusaha menyelamatkan diri dan mengejar teman lainnya yang berada di depan.

"Setelah bertemu dengan teman lainnya, saksi menyampaikan kabar kalau korban dibacok. Kemudian teman-teman korban balik arah ke tempat kejadian untuk mencari korban. Tapi korban sudah tidak ada karena sudah dibawa (pengguna jalan yang menolong) ke Rumah Sakit Pusat Pertamina," katanya. [BAM/H-12]



SP JOANITO DE SAOJOAO

Kawasan Kampung Akuarium di Penjaringan, Jakarta Utara, yang akan dibangun rumah susun (Rusun) oleh Pemprov DKI Jakarta.

Membenahi Kampung Akuarium

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal membangun rumah susun (Rusun) di kawasan Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara setelah sempat digusur 2016 lalu. Pembangunan Rusun itu rencananya akan dimulai pada September 2020 ini untuk menjalankan amanat Keputusan Gubernur DKI No 878/2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat. Berikut kondisi Kampung Akuarium yang dipotret fotografer "SP" Ruht Semiono dan Joanito De Saojoao.



SP/RUHT SEMIONO

Warga melakukan aktivitas di Kampung Akuarium, Jakarta. Pemprov DKI Jakarta akan membangun Kampung Akuarium dengan anggaran mencapai Rp 62 miliar.



SP/RUHT SEMIONO

Warga membongkar bangunan semi permanen di Kampung Akuarium, Jakarta, belum lama ini. Kawasan ini pernah digusur pada tahun 2016 lalu untuk dibenahi menjadi pemukiman yang layak huni.



SP RUHT SEMIONO

Lahan kosong siap dibangun Kampung Susun Akuarium, Jakarta, yang rencananya dimulai September 2020 ini.



SP/RUHT SEMIONO

Seorang anak bermain di Kampung Akuarium, Jakarta. Pembangunan Kampung Akuarium menjadi Kampung Susun akan dimulai pada September 2020 ini.

Reza Beli Paket Sabu-sabu Rp 1,2 Juta

[JAKARTA] Penyanyi Reza Artamevia membeli satu paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp 1,2 juta dari tangan seorang pengedar.



SP/JOANITO DE SAOJOAO

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus (tengah), menunjukkan penyanyi Reza Artamevia (dua kiri) dalam rilis kasus pengungkapan tindak pidana narkotika di Polda Metro Jaya, Jakarta, Minggu (6/9). Ditresnarkoba Polda Metro Jaya menangkap Reza Artamevia pada Jumat (4/9) di rumah makan kawasan Jatinegara, Jakarta Timur serta mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 0,78 gram.

"Dia membeli satu klip sabu-sabu dengan berat 0,78 gram Rp 1,2 juta," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus di Mako Polda Metro Jaya, Minggu (6/9).

Reza mengaku baru empat bulan mengkonsumsi sabu-sabu. "Hasil pemeriksaan dia mengakui menggunakan sabu-sabu ini sekitar empat bulan, semasa pandemi Covid-19. Kami masih mendalami terus karena pengakuan seperti itu," ujar Yusri.

Dikatakan Yusri, penyidik juga masih mendalami motif atau latar belakang yang bersangkutan mengkonsumsi barang haram itu.

"Motifnya seperti apa kami masih dalami. Biasanya memang setiap orang yang ditangkap, beberapa publik figur kita amankan pasti akan menyampaikan bahwa ini mengisi kekosongan waktu karena memang di rumah saja, sehingga terpengaruh menggunakan barang haram ini," ungkapnya.

Diketahui, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, menangkap Raza terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, di salah satu restoran, di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat (4/9). Penyidik menyita barang bukti satu klip sabu-sabu sebanyak 0,78 gram di dalam tasnya.

Menurut Yusri, Reza ditangkap bersama dua rekannya di restoran itu. Namun, setelah dilakukan tes urine dua rekannya negatif, hanya Reza yang positif.

"Kita amankan inisialnya RA, pada saat penangkapan ditemukan di dalam tasnya sabu-sabu satu klip. Kemudian kita lakukan penggeledahan di kediamannya di daerah Cirendeu, Tangerang Selatan. Di dalam rumahnya yang kita temukan adalah bong atau alat hisap dan juga korek api," tandasnya.

Saat ini, polisi memburu seseorang berinisial F selaku pemasok narkotika jenis sabu-sabu kepada tersangka Reza.

"Kita melakukan pendalaman kepada yang bersangkutan untuk mengetahui dari mana asal muasal barang haram ini. Kemudian tersebut satu nama yang sekarang menjadi DPO, pengajaran kita inisialnya adalah F. Ini masih terus kita lakukan pengajaran kepada F mudah-mudahan segera ditangkap," ujar Yusri.

Dikatakan Yusri, F merupakan bandar atau pengedar biasa, tidak ada hubungannya dengan publik figur. "Ini bandar biasa, pengedar, tidak ada hubungannya dengan publik figur. Sudah ada saksi-saksi yang telah kita periksa, dan ini masih kita kejar," ungkapnya.

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya telah memeriksa urine Reza. Hasilnya, urine yang bersangkutan positif mengandung sabu-sabu.

"Hasil tes urine positif amfetamin atau masuk dalam kategori narkotika jenis sabu-sabu," ujar Yusri.

Sementara itu, pakar rehabilitasi narkoba, Anang Iskandar mengatakan, Reza harus direhabilitasi, karena sehingga tidak menggunaka narkoba lagi.

"Tujuan undang-undang narkotika adalah menjamin penyalah guna seperti penyanyi Reza Artamevia mendapatkan upaya rehabilitasi," katanya.

Menurut Anang, musisi senior tersebut potensial ketergantungan narkotika. "Artinya, kalau Reza diasesmen, dia dipastikan menderita sakit ketergantungan narkotika (menjadi pecandu)," katanya.

Siapa pun yang sakit ketergantungan narkotika, lanjut mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) dan mantan Kabareskrim Mabes Polri ini, harus direhabilitasi sampai tuntas.

Individu

Sementara itu, Kabag Humas BNN, Kombes Pol Sulistyo Pudjo Hartono, mengatakan, kembalinya seorang publik figur menggunakan atau pun menyalahgunakan narkotika amat tergantung pada individu dan lingkungannya.

"Jadi tidak bisa serta-merta menyalahkan institusi rehabilitasi narkotika gagal. Karena ini amat tergantung pada individu tersebut dan lingkungannya. Misalkan saja ada maling tertangkap dipenjara, keluar dari penjara dia maling lagi, apakah yang salah insitusinya? Tentunya itu amat tergantung dari orang itu sendiri," ujarnya.

Ia menyebutkan, jika seseorang kembali mengulang perbuatannya, seperti menyalahgunakan narkotika, lebih disebabkan kepribadian, niat, dan lingkungan.

"Jadi tidak ada urusannya sama rehabilitasi. Itu tergantung orangnya. Kami (BNN) saat dimintai rekomendasi rehab dari pihak kepolisian juga tidak bisa sembarang memberikan rehabilitasi begitu saja. Pasti kita asesmen dengan ketat apakah dia pengedar, bandar, kurir, atau penyalahguna," tegas Pudjo.

Koordinator Kelompok Ahli BNN, Ahwil Luthan menjelaskan, seseorang yang sudah pernah menggunakan narkotika apalagi dalam jangka waktu lama maka akan sulit untuk benar-benar pulih.

"Rehabilitasi itu artinya orang yang sudah *addict* diharapkan kembali sembuh. Setelah rehabilitasi ada *after care*, kembali ke masyarakat, keluarga, dan lingkungan. Jadi kemungkinan untuk kembali lagi ada, tetapi amat tergantung pada lingkungan sekitarnya," kata Ahwil Luthan.

Ia menjelaskan, narkotika merupakan zat yang membuat otak rusak, dan meskipun seseorang menjalani rehabilitasi tidak mungkin bisa sembuh permanen 100%.

"Sembuhnya tidak akan sempurna atau tidak maksimal. Bisa saja sembuh sempurna asalkan ada keinginan kuat dari pribadinya. Kalau pemakai sudah begitu berat, apabila ada kondisi stres bisa kembali menjadi pemakai. Bisa jadi dia kembali berkumpul dengan teman-temannya yang juga mengkonsumsi narkoba," jelas Ahwil Luthan.

Untuk itu, ia menyebutkan pendamping dari pihak keluarga dan orang terdekat amat penting untuk membuat seorang eks pengguna narkoba tidak kembali menggunakan narkotika.

"Paling tepat dia berkumpul bersama keluarganya yang *care* dengan dia. Jadi kalau orang di sekitar lingkungannya ada yang mengajak, dia punya benteng untuk melindungi dirinya. Lagi pula tidak mungkin orang direhabilitasi di institusi rehabilitasi secara terus-menerus, paling hanya tiga bulan, dan paling lama satu tahun," tandas Ahwil Luthan. [BAM/G-5/C-7]

Reza: Jangan Contoh Kesalahan Saya

Penyanyi senior Reza Artamevia meminta maaf kepada keluarga dan anak-anaknya setelah ditangkap polisi terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu.

"Izinkan saya Reza Artamevia pada kesempatan ini menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada anak-anak saya, Zahwa dan Aliya, kepada orang tua saya, omi dan papa atau abi, kepada adik-adik saya, keluarga besar saya, guru-guru saya, para sahabat dan kerabat, dan pastinya untuk semua pihak yang selalu mendukung dan membantu perjalan karir menyanyi saya," ujar Reza yang mengenakan kemeja tahanan warna oranye, di Mapolda Metro Jaya, Minggu (6/9).

Reza menyampaikan, kasus penyalahgunaan narkotika ini menjadi pembelajaran baginya dan semoga tidak ditiru orang lain.

"Saya mohon maaf lahir batin atas kesalahan saya yang sudah saya perbuat. Semoga kesalahan ini tidak dicontoh oleh siapa pun juga dan menjadi pelajaran berharga buat saya khususnya. Mohon doanya," ungkapnya.

Sebelumnya, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, menangkap Raza terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, di salah satu restoran, di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat (4/9). Penyidik menyita barang bukti satu klip sabu-sabu sebanyak 0,78 gram di dalam tasnya.

Pada 2016 lalu, Reza sempat berurusan dengan polisi juga terkait kasus serupa. Saat itu, Reza turut berada di salah satu kamar Hotel Holden Tulip, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 4, Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat, ketika polisi menangkap guru spiritualnya Gatot Brajamusti dan istrinya Dewi Aminah. Mereka ditangkap terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, akhir Agustus 2016.

Pelantun lagu *Satu Yang Tak Bisa Lepas* itu sempat dinyatakan positif. Namun, ketika dilakukan pemeriksaan kembali, hasilnya negatif. Diduga kadar penggunaannya rendah dan sudah hilang. Reza kemudian menjalani rehabilitasi untuk memastikan dirinya tidak kecanduan narkotika.

Kemudian, Reza justru melaporkan Gatot Brajamusti terkait kasus penipuan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya, Jumat 10 Oktober 2016. Laporan itu dibuat terkait penggunaan aspat yang ternyata mengandung zat adiktif atau sabu-sabu. Aspat itu kerap digunakan Gatot dan pengikutnya di padepokan.

"Hari ini saya datang melaporkan masalah aspat. Saya tidak tahu kalau ada zat adiktif. Setelah pemeriksaan ternyata mengandung zat itu. Selama ini yang kita ketahui aspat, ternyata bukan. Saya merasa dirugikan. Saya dianggap orang pecandu, junkies, narkobais," ujar Reza, seusai membuat laporan, di Mapolda Metro Jaya, ketika itu.

Selain penggunaan aspat, Reza juga melaporkan Gatot terkait dugaan penipuan materi. Guru spiritualnya itu kerap meminta bantuan uang dengan alasan untuk aksi sosial. Namun, ternyata diduga dipakai untuk membeli aspat itu. [BAM/W-11]

Spanduk Provokatif Muncul di Depok

[DEPOK] Spanduk provokatif yang membawa nama Persyarikatan Muhammadiyah terpasang di Kota Depok, Jawa Barat, Minggu (6/9). Terkait hal ini, Pengurus Daerah (PD) Muhammadiyah Kota Depok langsung melapor ke Polres Metro Depok.

Sejumlah spanduk tersebut disebar di berbagai titik di Kota Depok. Salah satunya di Jalan Keadilan, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas.

Spanduk tersebut bertuliskan "Kami Warga Muhammadiyah Tidak Rela Kota Depok Dipimpin PKI Perjuangan". Spanduk tersebut berlatar belakang putih dan dilengkapi dengan logo Muhammadiyah.



SP/BHAKTI HARIANI

Spanduk yang mengatasnamakan Muhammadiyah terpasang di Jalan Keadilan, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, Minggu (6/9).

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Depok Bidang Hukum dan HAM, Ahmad Dahlan, menuturkan, pemasangan spanduk ini adalah fitnah yang keji yang mengatasnamakan Muhammadiyah apalagi menjelang Pilkada Depok pada 9 Desember mendatang.

"Ini orang yang tidak bertanggung jawab. Lihat dari logo dan corak jelas berbeda dengan logo Muhammadiyah. Ini spanduk provokatif. Kami jika memasang spanduk pasti terdapat tulisan pimpinan daerah atau pimpinan cabang atau ranting. Tidak pernah menulis warga Muhammadiyah," ujar Ahmad Dahlan.

Ahmad mengimbau warga Depok tidak terpecah belah dan terpancing atas pemasangan sejumlah spanduk liar tersebut. "Jangan merusak Kota Depok yang kondusif apalagi membawa-bawa nama ormas Islam seperti Muhammadiyah. Karena ini negara hukum. Maka kami akan melaporkan hal ini ke Polres Metro Depok," tutur Ahmad.

Pihaknya juga langsung menurunkan sejumlah spanduk liar tersebut untuk kemudian dibawa ke Polres Metro Depok untuk dilaporkan sebagai barang bukti.

"Sulit mencari saksi yang mengetahui siapa yang memasang spanduk. Maka kami langsung turunkan dan lanjutkan ke ranah hukum," tegas Ahmad.

Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Depok Luli Barlini mengungkapkan, spanduk tersebut bukan merupakan pelanggaran pemilu, tetapi merupakan ranah keamanan karena kehadiran spanduk itu mengganggu ketertiban dan bertujuan meresahkan masyarakat.

"Spanduk ini tidak menyebutkan pasangan calon jadi kepada siapa ditujukan juga tidak jelas maka sudah tepat bila PD Muhammadiyah Kota Depok melaporkan hal ini ke Polres Metro Depok. Kami juga tidak bisa memeriksa karena tidak ada laporan. Ini ranah kepolisian," kata Luli. [RIA/W-11]

Depok 1 dan 2 Bersaing di Pilkada 2020

[DEPOK] Wali Kota Depok Mohammad Idris dan pasangannya, Imam Budi Hartono bersaing dengan Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna-Afifah Alia di Pilkada Depok 2020. Hingga pendaftaran ditutup pada Minggu (6/9), hanya ada dua pasangan yang akan berhadapan di pesta demokrasi yang akan digelar 9 Desember mendatang.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok Nana Shobarna memastikan, tidak ada pasangan lain yang akan maju di Pilkada.

"Dapat dipastikan demikian. Karena semua parpol sudah menentukan berkoalisi ke mana. Jadi hanya ada dua paslon yang akan berlaga dalam gelaran Pilkada Depok. Berkas mereka semua lengkap. Sudah kami periksa keduanya, " tutur Nana di Depok.

Masa pendaftaran kedua pasangan calon berlangsung lancar dan tertib tanpa kendala. Tahapan selanjutnya, kata Nana, adalah melakukan verifikasi kepada semua persyaratan dan penetapan bakal calon pada 23 September dan penentuan nomor urut pada 24 September.

"Tanggal 26 September sudah dimulai tahapan kampanye hingga 5 Desember. Masa kampanye selama 71 hari," ujar Nana.

Berbagai metode kampanye dapat dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. "Jika tak menerapkan protokol kesehatan maka masyarakat bisa melapor kepada Bawaslu," ujar Nana.

Idris dan Imam mendaftar ke KPU pada Minggu (6/9). Saat pendaftaran, jumlah orang yang masuk ke kantor KPU Kota Depok dibatasi agar tidak menimbulkan kerumunan.

Idris-Imam didampingi para petinggi partai pengusungnya, yakni PKS, PPP, dan Demokrat. Tidak ada pengerahan massa. Hanya beberapa pengurus partai tersebut ikut mengantar keduanya.

"Kami sudah daftar. Insyaallah berkas dokumen pendaftaran lengkap. Kami sudah siap memenangi Pilkada Depok," ujar Idris.

Paslon wali kota dan wakil wali Kota Depok lainnya, Pradi-Afifah mendaftarkan diri terlebih ke KPU Kota Depok pada Jumat (4/9) lalu.

Pradi-Afifah diusung Partai Gerindra, PDI-P, PKB, Golkar, PAN, dan PSI. "Kami didukung enam partai parlemen dan enam partai non-parlemen. Bismillah, warga Kota Depok akan memilih kami yang siap untuk perubahan," tutur Pradi yang juga petahana sebagai Wakil Wali Kota Depok.

Tiga Pasangan

Sementara itu, tiga pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota akan bersaing Pilkada Tangerang Selatan 2020. Mereka telah resmi mendaftar di KPU pada Jumat (4/9) dan Sabtu (5/9).

Pasangan yang mendaftar, adalah Muhammad dan Rahayu Saraswati, Jumat. Mereka diusung sembilan partai politik, yakni PDI-P, Gerindra, PAN, PSI, Hanura, Nasdem, Perindo, Partai Garuda, dan Partai Berkarya dengan total 23 kursi.



SP/CHAIRUL FIKRI

Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan Siti Nur Azizah dan Ruhama Ben, berfoto di Kantor Komisi Pemilihan Umum Tangerang Selatan, Sabtu (6/9).

Duet berikutnya, Siti Nur Azizah dan Ruhama Ben yang diusung tiga partai, yakni Demokrat, PKS, dan PKB dengan jumlah 17 kursi. Mereka mendaftar Sabtu (5/9).

Satu pasangan lainnya, adalah Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan.

Pasangan Benyamin-Pilar diusung Partai Golkar, PPP, Partai Gelora mendaftar pada Sabtu.

Saat pendaftaran, Airin Diani, yang kini menjabat Wali Kota Tangsel mengiringi di belakangnya bersama Abdul Rosyid yang merupakan kader Golkar dan juga ketua DPRD Tangsel bersama pimpinan PPP dan Partai Gelora.

Bagi Waktu

Benyamin Davnie memastikan dapat membagi waktu dengan baik antara kerja politik sebagai bakal calon wali kota dengan jabatannya saat ini sebagai Wakil Wali Kota Tangerang Selatan. "Saya pastikan akan terpisah. Kerja dari partai dan pemerintahan tak tercampurkan," katanya.

Benyamin mengatakan, saat ini Pemkot Tangerang Selatan masih terus berupaya menekan penyebaran Covid-19 dengan menyosialisasikan program 3M.

Untuk kerja politik, setelah dia mendaftar ikut pilkada di KPU setempat, maka akan berusaha meyakinkan warga dengan menyampaikan program kerja ke depan guna peraihan suara dalam pemilihan mendatang. [CF/RIA/W-11]

BPTJ Minta DKI Lengkapi Kajian Sepeda Masuk Tol

[JAKARTA] Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit mengatakan, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta harus melengkapi kajian usulan sepeda masuk jalan tol.

Kajian itu seperti teknis penggunaan jalur tol dalam kota untuk pesepeda pada waktu tertentu. "Dishub DKI masih akan melengkapi usulan dan kajiannya," ujar Danang Parikesit kepada *SP* di Jakarta, Minggu (6/9).

Menurut Danang, sifat usulan penutupan ruas jalan tol hanya untuk *event* tertentu. Ia mengatakan, kalau dipakai untuk keperluan lain, maka jalan tol bisa ditutup untuk lalu lintas kendaraan.

Namun, jalan tol yang diusulkan tersebut, adalah jalan tol yang bisa dilalui sepeda balap tiap Minggu pada pukul 06.00-09.00.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies mengajukan permohonan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menpupera) Basuki Hadimuljono untuk memanfaatkan jalan tol lingkar dalam Cawang-Tanjung Priok di ruas Kebon Nanas-Plumpang sepanjang sekitar 10 km hingga 12 km bagi pesepeda di akhir pekan.

Dalam surat yang disampaikan pada 11 Agustus 2020 itu, tertulis bahwa terjadi peningkatan volume pesepeda setiap minggunya, khususnya di Jalan MH Thamrin-Jalan Jenderal Sudirman.

"Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat memberikan izin pemanfaatan satu ruas jalan tol lingkar dalam Jakarta (Cawang-Tanjung Priok) sisi barat sebagai lintasan *road bike* guna mengakomodasi pengguna sepeda pada setiap hari Minggu pukul 06.00-09.00," dalam tulisan pada surat tersebut.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan bila dikabulkan, jalur tol dalam kota hanya dikhususkan untuk sepeda *road bike* atau sepeda balap.

"Bukan sepeda biasa. Namanya *road bike*. Jadi menyiapkan satu jalur sendiri untuk jalur sepeda, sementara hanya untuk *road bike*," kata Syafrin.



ANTARA/HAFIDZ MUBARAK A

Pesepeda melintas pada malam hari di Jalan Sudirman, Jakarta, Sabtu (5/9). Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengimbau warga yang bersepeda pada malam hari di jalan raya agar menambahkan lampu dan mengenakan pakaian yang memantulkan cahaya sebagai penanda untuk meningkatkan keamanan.

Tutup Jalan Tol

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, mengatakan, terkait wacana sepeda diperbolehkan masuk ke jalan tol dalam kota Jakarta, dia melihat tidak ada alternatif lain selain menutup akses jalan tol selama sepeda diperbolehkan masuk.

"Saya sudah berbicara pada Menpupera, gunakan mekanisme CFD (car free day). Jadi harus tutup jalan tol. Karena sangat berbahaya. Jadi tidak bisa dicampur (sepeda dan kendaraan jalan tol), karena itu risiko tinggi dan justru membuat kecelakaan," tandas Agus Pambagio.

Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta), Azas Tigor Nainggolan juga mengatakan hal serupa.

"Saat sepeda lewat atau jam sepeda, jalan tol ya wajib ditutup. Ngacau kalau tidak ditutup. Lagi pula untuk apa memikirkan *road bike*. Yang lebih penting sekarang ini cari cara menurunkan angka Covid-19. Itu lebih prioritas, tidak usah mewacanakan *road bike* di jalan tol," tambah Azas Tigor Nainggolan.

Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI (Masyarakat Transportasi Indonesia) Djoko Setijowarno menyebutkan, banyak faktor harus dipertimbangkan terkait sepeda diperbolehkan masuk ke jalan tol.

"Jalan tol itu untuk angkutan roda empat ke atas. Jadi harus ada regulasinya kalau tol bisa dilewati kendaraan lainnya (sepeda motor atau sepeda). Apakah pembuatan kebijakan nanti sudah memikirkan apabila pesepeda nanti ingin buang air, istirahat sejenak, bahkan *selfie* di jalan tol," tambah Djoko.

Sebelumnya, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, menunggu keputusan Kempupera terkait wacana jalur sepeda di jalan tol.

"Ya saat ini kan surat dari Pemda DKI sedang ditujukan ke Kempupera. Kita tentu menunggu apa keputusan dari Kempuoera. Kalau nanti misalnya disetujui nanti kita membuat kajian-kajian bagaimana pengamanannya dan sebagainya. Kalau memang nggak disetujui kita ikuti apa keputusan pemerintah," ujar Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Sambodo Purnomo, beberapa waktu lalu.

Dikatakan Sambodo, polisi masih menunggu apa tanggapan dari Kempupera soal jalur sepeda di jalan tol itu. "Kalau kami lihat seperti apa ruas jalan mana yang disetujui dan tanggapan Kempupera itu sendiri," ungkapnya.[C-7/H-14]

Dukacita dan Simpati kami yang mendalam atas wafatnya

Bapak Dr. Abdul Gafur

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga

Doa kami, kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa menerima Almarhum di sisiNya dan keluarga yang ditinggalkan dikaruniakan kekuatan dan keikhlasan.

DR. MOCHTAR RIADY & KELUARGA

LIPPO GROUP